Cek Plagiasi

by Hairul Anam

Submission date: 04-Apr-2022 09:39AM (UTC+0700)
Submission ID: 1800821283
File name: Cek_Tesis_Hairul_Anam_Tipologi_Pemilih_-_Copy.pdf (1.45M)
Word count: 32956
Character count: 214101

TIPOLOGI PEMILIH PADA PEMILU SERENTAK 2019 DI KABUPATEN BONDOWOSO

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik

Oleh:

HAIRUL ANAM
NPM : 20550004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2022

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi identik dengan pelaksanaan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan juga diartikan sebagai rakyat berkuasa atau "government or rule by the people" Miriam Budiardjo (2005). Salah satu ciri bangsa yang menganut sistem politik yang demokrasi, dimana memposisikan rakyat sebagai pemilih hak guna memilih para wakilnya, baik yang akan duduk dieksekutif atau dan legislatif, memilih wakil-wakil yang akan mengisi dalam pemerintahan, dan berhak berpartisipasi aktif dalam percaturan politik. Robert A Dahl (2001) mengatakan bahwa ada lima hal utama dalam demokrasi, yaitu: peluang partisipasi yang efektif, kesetaraan dalam memilih, memperoleh pemahaman yang jelas, melakukan pengawasan akhir terhadap agenda, dan inklusi orang dewasa. Sedangkan Afan Gaffar (2006) menyatakan bahwa perputaran kekuasaan dan diadakannya pemilihan umum secara periodik merupakan syarat suatu negara dikatakan telah menganut sistem demokrasi. Rotasi dan estafet kekuasaan diselenggarakan pada pemilihan berkala, seperti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota. Pemilihan umum juga sering disebut sebagai ajang pembaharuan kontrak politik antara wakil dan yang diwakili disebut, rakyat menentukan pilihan siapa yang akan mewakilinya dan sebagai pesta rakyat, , Khairul Fahmi (2016).

Implementasi nyata dari demokrasi dapat amati dari penunaian hak pilih pemilih dalam pemilu, dimana setiap warga negara yang memenuhi persyaratan berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini selaras dengan penjelasan yang diberikan oleh C.B Macpherson (1973) bahwa "*One of the central value of our democratic theory has been the surpassing importance of freedom and choice*". Sebagaimana Undang-undang no 07 Tahun 2017 pasal

1 ayat 1 menjelasakna bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia untuk pertama kalinya pada 17 April 2019 untuk masa jabatan 2019-2014, ini adalah tahun politik karena pada tahun 2019 tersebut kita merayakan 2 (dua) pesta demokrasi secara bersamaan yaitu pileg dan Pilpres.

Dalam pemilu kita sering melihat kenapa ada orang tidak melakukan tindakan politik sementara yang lain melakukan tindakan politik, kenapa orang memilih partai PDIP, kenapa bukan Golkar, PKB, PPP, PAN, PKS, PBB, atau bahkan memilih PKB, kenapa bukan PDIP, PPP, PKS, atau Golkar? Kenapa orang memilih partai politik cenderung teratur memilih partai yang sama dari Pemilu ke Pemilu, sedangkan yang lain selalu berubah? kenapa dalam masyarakat tertentu memiliki cenderung punya pilihan politik yang hampir sama atau bahkan berbeda? apa Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang menentukan pilihan politiknya dalam penyelenggaraan pemilu? Begitu banyak pertanyaan serupa akan bermunculan ketika kita menganalisis tipologi pemilih dalam Pemilu. Bukan hanya bagi ilmuwan politik Pertanyaan-pertanyaan ini menarik, masyarakat awam, apalagi menarik bagi politisi. Yang menjadi persoalannya disini, apakah ada teori yang sudah "mapan" yang dapat pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Apakah ada teori yang sudah "baku" yang mampu mengungkap fenomena tipologi pemilih di hampir semua negara yang menerapkan sistem pemilu dengan pemilihan langsung?

Firman (2010), mengkaji tipologi pemilih dalam pemilu, kecenderungan secara objektif memilih calon atau partai politik yang memiliki kejelasan program dan kepekaan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.. Pemilih cenderung tidak akan memilih partai politik yang arah kebijakannya

tidak jelas. Pemilih yang lebih menekankan aspek subjektif seperti ikatan ideologi suatu partai politik, maka ia tidak akan melihat dari seberapa program kerja dan kebijakan partai. Berdasarkan perspektif diatas, dapat menganalisa tipologi pemilih dalam pemilihan umum, karena tipologi pemilih tersebut dianggap mempunyai kebebasan yang cukup tinggi untuk tidak sama dalam lingkungan dimana pemilih tersebut berada. Setiap pemilih memiliki tata nilai, kemampuan, pola berfikir serta tipologi yang membedakan antara seorang pemilih dengan yang lainnya. Lingkungan tidak menentukan tipologi pemilih, akan tetapi bisa mempengaruhi, sementara akhir dari keputusan pilihan tersebut ditentukan oleh pemilih itu sendiri.

Senada dengan yang disampaikan Zamroni (2007), tipologi adalah karakter yang unik dan spesifik yang melekat pada orang-orang tertentu yang membedakannya dengan orang lain dan pemilih adalah warga Negara yang menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Jadi tipologi pemilih adalah perilaku politik masyarakat yang berkaitan dengan pemilihan umum guna merebut hati rakyat dalam khazanah intelektual yang rasional atau non rasional. Pemilih dalam pemilihan umum tidak terlepas dari identitas pemilih baik dari factor social budaya pemilih. Pemilh rasional dapat dipengaruhi oleh program kerja partai Politik atau Calon, yang memiliki kemampuan menawarkan kepada masyarakat untuk mengangkat kesejahteraan rakyat dan solusi tepat atas berbagai macam masalah yang dialami oleh masyarakat. Sebaliknya pemilih non rasional bukan memperhatikan program kerja partai politik atau calon, melainkan siapa yang memberikan bantuan lebih besar ketika kampanye baik tertutup ataupun kampanye terbuka.

Tipologi selanjutnya adalah nilai tradisional pemilih Chapman (1983). Nilai tradisional dimaksudkan setiap pemilih memiliki warisan serta mempunyai kemampuan untuk berbeda dengan lainnya. Itu tentu akan dipengaruhi oleh pemilih pada proses dalam diri setiap pemilih dalam menentukan pilihan tersebut. Pengaruhi tingkat ekonomi atau pendidikan pemilih dalam menentukan keputusan. Kecenderungan menggunakan pertimbanagn non rasional bagi pemilih yang tidak memiliki pendidikan tinggi

dalam menentukan keputusan, factor isu (wacana), emosional, *stereotype,* dan opini yang ada pada masyarakat mempengaruhi pemilih dan menjadi pertimbangan pemilih dalam penentuan keputusan hak politiknya mereka . Adapun pemilih yang memiliki level pendidikan yang lebih tinggi memiliki kecondongan lebih selektif untuk menetukan pilihan, informasi yang didapat oleh pemilih tidak semerta-merta dibenarkan tetapi mereka akan memilah-milah apakah kabar itu berasal dari sumber atau referensi yang dapat dipercaya ataukah tidak. Letak geografis juga mempengaruhi cara pemilih dalam melakukan analisa terhadap sesuatu, pemilih yang tinggal didaerah perkotaan cenderung lebih terbiasa mendapatkan beragam informasi yang bervariatif dibandingkan dengan pemilih yang tinggal dipedesaan. Berdasarkan deskripsi diatas ada 4 (empat) tipologi pemilih yaitu, pemilih tradisional, pemilih kritis, pemilih rasional serta pemilih skeptis.

Faktor politik uang atau vote buying yang dilakukan oleh calon dapat mempengaruhi tipologi pemilih. Oleh karenanya diperlukan proses analisa yang bisa mengkorelasikan fenomena perilaku memilih, baik yang terjadi di dalam atau di luar individu. Asrinaldi (2012) menyatakan bahwa dengan mengkorelasikan perilaku memilih dengan variabel-variabel yang ada, dapat dijumpai kenapa seseorang tidak melakukan tindakan politik, sedangkan yang lain melakukan tindakan politik. Pemahaman terhadap perilaku memilih di suatu daerah, dapat bermanfaat bagi partai politik untuk melakukan pemetaan pemilih yang merupakan fondasi dalam mendesain kampanye kompetisi elektoral yang efektif dan efisien. Sigit Pamungkas (2012).

Berbagai faktor yang turut serta mempengaruhi tipologi pemilih dalam menentukan pilihannya akan menjadi kajian menarik. Faktor agama, identifikasi kepartaian, asal daerah atau kedaerahan calon, serta kedekatan pemilih dengan partai atau calon, program calon yang dianggap akan memberikan keuntungan kepada seseorang jika si calon terpilih. Meyer (2004) mengatakan bahwa kebudayaan berbasis agama dipengaruhi praktik kebiasaan beragama.

Dalam berbagai studi tipologi pemilih, maka terdapat data yang mencukupi untuk digunakan sebagai inferensi- inferensi teoritis. Riset terkait kepemiluan adalah salah satu unsur penting dalam tata kelola pemilu. Riset bukan hanya untuk memberikan rasionalitas akademik mengenai suatu substansi pemilu akan tetapi luas lagi untuk menjadikan dasar empirik mengenai persoalan atas fenomena yang menjadi perdebatan. Kemudian hasil riset menjadi program dan kebijakan kepemiluan tidak semata-mata diambil atas spekulatif, postulat, tetapi dibangun dengan didasarkan pada argument empirik dan rasional serta prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Dalam demokrasi yang menjadi elemen penting adalah partisipasi pemilih dalam demokrasi perwakilan. Partisipasi pemilih menjadi fondasi dalam praktik demokrasi perwakilan. Persoalan partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi masalah tersendiri pada pelaksanaan pemilu, namun tidak banyak telusuri dan diungkap serta terkadang masih menyisakan pertanyaan. Ada beberapa persoalan terkait dengan partisipasi pemilih dalam pemilu meliputi; rendahnya tingkat kehadiran pemilih ke tempat Pemungutan suara (TPS), tingginya surat suara yang tidak sah, maraknya politik uang, rendahnya pengetahuan masyarakat, dan minimnya sikap kesukarelawanan dan partisipasi politik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso pada 3 (tiga) periode pelaksanaan Pemilu sebagaimana berikut:

TABEL 1.1

Partisipasi Pemilih

No	Pemilu	DPT	Menggunakan Hak Pilihnya	%	Tidak Menggunakan Hak Pilihnya	%
1	2009	577.362	432.890	74 %	144.472	25 %
2	2014	597.128	478.849	80%	118.279	19 %
3	2019	599.017	503.567	84%	95.450	15,93%

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2009 dari pemilih terdaftar dalam Daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 577.362, sementara itu pemilih yang mengguakan hak pilihnya 432.890 atau 74 % pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan ada sejumlah 144.472 atau 25 % pemilih tidak menggunakan Hak pilihnya.

Pada pemilu 2014, pemilih terdaftar dalam Daftar pemilh tetap (DPT) sejumlah 597.128, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 478.849 atau 80% pemilih terdaftar dalam Daftar pemilh tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, sementara ada 118.279 atau 19 % pemilih tidak menggunakan Hak pilihnya.

Pada Pemilu Serentak 2019 dari jumlah Daftar Pemiliih tetap (DPT) sejumlah 599.017, pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 503.567, sehingga kalau dirata-rata ada 84% pemilih terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) yang mengguakan hak pilihnya, dan ada 95.450 atau 15,93% pemilih tidak menggunakan Hak pilihnya..

Berdasarkan data tersebut diatas, ternyata dalam setiap priode pemilu masih ada pemilih yang tidak hadir ketempat pemungutan suara (TPS) atau pemilih golput, tidak menggunakan hak pilihnya masih cukup tinggi yaitu diatas 15 %, pemilih yang seperti ini yang lazim kita kenal dengan pemilih skiptis, pemilih yang acuh tak acuh terhadap pemilu sehingga yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena tersebut perlu dibedah dan diuraikan sedemikian rupa untuk diketahui akar permasalahan dan dicari solusi jalan keluarnya.

Meminjam istilah Greetz (1960) mengkategorikan membagi masyarakat Islam dalam dua bagian yang pertama Islam abangan dan Islam Santri. Kalaupun kedua kelompok ini sama-sama Islam akan tetapi karena latar belakang keagamaannya berbeda maka dalam afiliasi politiknya pun tidak sama. Kelompok Islam Santri cenderung memilih partai Islam sedangkan Kelompok Islam abangan memilih partai Nasionalis. Disisi yang lain, Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah dari segi letak wilayahnya terletak diwilayah tapal kuda. Sebagaimana kita ketahui diwilayah

tapal kuda terkhusus di Kabupaten Bondowoso mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam dengan latar belakang Nahdiyin yang memiliki kecenderungan pilihan politiknya kepada partai politik yang memiliki kedekatan ideology, faham, agama yang biasa disebut sebagai pemilih tradisional. Pemilih tradisional jenis ini dimana pemilih tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau calon menjadi hal yang penting dalam pengambilan keputusan namun lebih kepada tingginya orientasi ideology. Pemilih tradisional lebih mengutamakan kedekatan social-budaya, asal usul, nilai, paham dan Agama sebagai tolak ukur dalam memilih partai politik. Pemilih tradisional mengutamakan figure dan kepribadian pemimpin, nilai histori, dan mitos sebuah partai politik atau calon. Pemilih jenis ini biasanya memiliki pendidikan relatif rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianutnya. Pemilih jenis ini yang sangat mudah gerakkan selama masa kampanye. Pemilih tradisional mempunyai loyalitas tinggi, apa yang disampaikan oleh pemimpin pada partai politik adalah suatu kesahihan yang sukar untuk disanggah. Sebagai pemilih tradisional yang mayoritas pemilihnya berlatar belakang Nahdiyin maka kiyai sangat memberikan pengaruh dalam menentukan pilihan politiknya kepada partai politik untuk dipilih dalam pemilihan umum. Pemilih ini memandang ideology menjadi dasar dalam menentukan pilihan politik mereka serta pola sikapnya, serta terkadang keyakinan tersebut tidak dapat digeser. Kecenderungan pemilih ini dalam menentukan pilihan politiknya kepada partai politik seperti PKB atau PPP. Salah satu karakteristik dari masyarakat patrimonial dengan pola sosial *Patron–Clien* dimana pandangan kepada Kiyai masih menjadi simpul dalam mengendalikan terhadap pilihan politik masyarakat. Kiyai atau ulama sebagai patron yang sangat dihormati sekaligus akan menjadi panutan dalam kehidupan spiritualnya dalam bentuk pengejewantahan nilai penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bondowoso terkhusus pesantren. Secara turun temurun hal ini diwariskan dari generasi ke generasi yang kemudian diperkuat dengan kegiatan keagamaan yang marak seperti acara pengajian, Sholawatan, istighosah, yasinan, tibaan, ziarah kemakam wali

songo dan kegiatan keagamaan lainnya yang merupakan ciri yang sangat mudah kita lihat, dapat diamati dan berbeda dengan kelompok lainnya. Namun seiring perjalanan waktu, dengan semakin terbukanya akses informasi maka pemilih jenis ini berangsur-angsur mengalami perubahan. Kiyai sebagai patron dan masyarakat (santri) sebagai clien, tidak kemudian semerta-merta apa yang disampaikan kyai atau menjadi petunjuk dalam pilihan politik kemudian dijalankan begitu saja. Dalam kontek ini bisa jadi ada pergeseran tipologi pemilih yang semula memiliki tipologi pemilih tradisional bergesek kepada tipologi pemilih rasional atau bahkan bergeser kepada pemilih jenis non-rasional atau tipologi yang lainnya. Ini diperkuat dengan data dari hasil perolehan kursi partai politik dalam beberapa penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2009 hingga 2019 di Kabupaten Bondowoso, sebagaimana tabel berikut:

TABEL 1.2

Perbandingan Perolehan Kursi Partai Politik Tahun 2009-2019

No	Partai	Perolehan Suara			
		Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
1	PKB	23	6	12	14
2	Gerindra			3	4
3	PDIP	6	5	8	7
4	Golkar	7	4	5	6
5	PKS	1	5	5	5
6	PPP	6	5	5	6
7	PAN		1	1	1
8	Demokrat	1	3	3	2

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2004 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 23 kursi, kemudian pada tahun 2009 memperolah 6 kursi, pada pemilu 2014 memperolah 12 kursi dan pada tahun 2019 mendapatkan 14 kursi. Dari data ini PKB mendominasi perolehan kursi pada pemilu 2004 yaitu 23 kursi dibandingkan perolehan partai yang lain, perolehan kursi ini mendominasi lebih dari 50% dari total kursi yaitu 45 kursi di DPRD. Sementara itu mengalami penurunan perolehan

kursi pada tahun 2009 yang hanya memperoleh 6 kursi dan kembali mengalami kenaikan kursi ditahun 20014 yaitu 12 kursi kemudian pada pemilu tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 14 kursi. Jika kita analisa dari data perolehan kursi diatas, bahwa puncak perolehan kursi PKB itu berada pada tahun 2004 dengan 23 kursi, jika dibandingkan dengan perolehan kursi periode penyelenggaraan pemilu terakhir yaitu 14 kursi tentu masih sangat jauh perolehan kursinya dibandingkan pada pemilu 2009. Artinya jika kita bandingkan antara perolehan kursi PKB di 2004 dengan pemilu 2019 , partai ini telah mengalami pengurangan perolehan kursi 9 kursi. Sementara perolehan partai politik yang berideologi nasionalis/pancasila cenderung stabil memperoleh kursi dalam pelaksanaan pemilu, misalkan perolehan partai PDIP pada pemilu 2004 memperolah 6 kursi, pemilu 2009 memperolah 5 kursi, pemilu 2014 memperolah 8 kursi dan pada pemilu 2019 mendapatkan 7 kursi, perolehan kursi di DPRD partai ini cenderung stabil, baik kenaikan perolehan kursi dan penurunan perolehan kursinya. Termasuk juga partai Golkar, pada pemilu 2004, memperoleh 7 kursi, pemilu 2009 memperoleh 4 kursi, dan pada pemilu 2014 memperoleh 5 kursi, kemudian pada pemilu 2019 memperoleh kursi 6 kursi. Termasuk juga partai-partai yang lain dalam memperoleh kursi dalam setiap pelaksanaan pemilu cenderung stabil, jika pun mengalami kenaikan perolehan kursi berkisar mendapatan penambahan 1 kursi, demikian juga jika mengalami penurunan perolehan kursi hanya berkisaran 1 kursi. Jika dibandingkan dengan perolehan kursi PKB pada pemilu 2004 mendapatkan 23 kursi kemudian pada pemiu 2019 hanya mendapatkan 14, tentu ini penurunan kursi yang sangat drastis, artinya dari data ini ada pengurangan 9 kursi.

Maka jika dilihat dari perolehan partai politik diatas khususnya PKB yang sebelumnya sangat mendomininasi dalam memperoleh 23 kursi pada pemilu 2004 dan mengalami penurunan ditahun 2019 hanya memperoleh 14 kursi. Maka berdasarkan fenomena tersebut dan jika dikaitkan dengan tipologi pemilih di Kabupaten Bondowoso, maka dimungkinkan ada pergeseran tipologi pemilih dari semula bertipologi pemilih tradisonal bergeser ketipologi

pemilih rasional, ini dikarenakan dengan semakin luasnya akses informasi yang diperoleh oleh pemilih, sehingga pemilih mendapatkan banyak informasi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan pilihan politiknya. Demikian juga bisa jadi ada pergeseran tipologi tradisional kepada non rasional dikarenakan maraknya praktik money politik sehingga pemilih ini dalam menentukan pilihan politiknya didasarkan pada siapa yang memberikan sesuatu, baik berbentuk barang atau uang kepada pemilih tersebut, atau seberapa besar nominal uang yang diterima pemilih itu yang akan dipilih dalam pemilu.

Maka didasarkan pada paparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Tipologi Pemilih Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bondowoso.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apa tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan memotret tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tipologi pemlih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten bondowoso

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat peneltian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya tipologi pemilih, sosial-ekonomi, politik pemilih di Kabupaten Bondowoso, berdasarkan umur, jenis kelamin, wilayah, pendidikan, pekerjaan, ormas dan pilihan politik legislative.
2. Tersusunnya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemilih di Kabupaten Bondowoso dalam menentukan pilihan politik pada saat pemilu serentak 2019. Termasuk disini adalah seberapa kuat mempengaruhi pilihan politiknya. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini menggunakan pendekatan emosional (pertimbangan paham ideologis, agama, budaya), tradisional (identifikasi partai) dan rasional (pertimbangan ekonomi, program, isu).

1.5 Batasan Istilah

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka batasan/ definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

a. Tipologi Pemilih

Tipologi rediri dari kata type yaitu berasal dari kata typos (bahasa yunani), yang bermakna gambaran, bentuk, impresi, jenis, atau karakter suatu objek sedangkan logy adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu, sehingga tipologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang gambar, impresi, bentuk, jenis atau karakter dari suatu objek. Menurut Zamroni (2007) Tipologi yaitu karakter yang unik dan spesifik yang melekat pada orang-orang tertentu yang membedakannya dengan orang lain.

Sementara definisi pemilih pada Undang-undang no 07 tahun 2017 adalah warga Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Sehingga tipologi pemilih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah karakter yang unik dan spesifik yang melekat pada pemilih yang membedakannya dengan pemilih yang lain.

b. Pemilu

Pengertian Pemilihan umum sebagaimana pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anngota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden , dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakn secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarakan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan instrument dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, tentu dalam pelaksanaan terknisnya dibutuhkan seperangkat aturan yang khusus, oleh karenanya pelaksanaan pemilu saja menjadi suatu jaminan dari demokrasi itu sendiri, akan tetapi pemilu merupakan cara dari didapatkannya kekuatan dan pengakuan publik atas kekuasaan terhadap rezim dalam pemerintahan. Menurut lances Castle yang dikuatkan Yoyoh Rohaniah (2015), pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dalam kehidupan politik Negara demokrasi modern.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti seperti, Penelitian yang dilakukan oleh Roni Jaya winangun dan Dini Valdiani 2020 tentang Tipologi Partisipasi Politik Pemilih Laki-laki Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Penggunaan Sumber Informasi. Tujuan penelitian ini adalah Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana karatekristik, prefensi dan perilaku pemilih laki-laki di Kabupaten Bogor serta untuk mengelompokan pemilih kedalam tipologi pemilih berdasarkan pemanfaatan sumber informasi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode kuantitatif digunakan sebagai pendekatan metodologis, 200 pemilih laki-laki diambil sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuota sampling berdasarkan distrik pemilihan, dan Detektor Interaksi Otomatis Chi-Square (CHAID) adalah digunakan sebagai analisis data. Hasil dari penelitian adalah Dalam konteks dewasa ini, partisipasi politik masyarakat sedikit berubah sebagai hasil perkembangan teknologi. Pada tahun 2018, pemilihan kepala daerah kita gagal mencapai target minimal tingkat partisipasi politik yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah menargetkan 77,5 persen tetapi kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai 73,24 persen karena rendahnya tingkat partisipasi pemilih laki-laki. Penelitian ini menemukan bahwa televisi dan internet adalah yang paling media yang sering digunakan, sedangkan alat peraga kampanye dan televisi merupakan sumber informasi politik yang paling terpercaya. Tipologi pemilih laki-laki dengan persentase tertinggi di Kabupaten Bogor adalah pemilih apatis (34%) diikuti oleh pemilih naif (29,5%). pemilih yang terasing (19%) dan pemilih setia (17,5%). Penggunaan sumber informasi politik yang banyak digunakan oleh pemilih laki-laki diKabupaten Bogor secara berurutan adalah Televisi, media social, internet, Koran/surat kabar dan radio. APK dan berita televise adalah sumber informasi yang dipercaya pemilih laki-laki.

ekonomi, agama dan pendidikan. Namun demikian, juga terdapat perbedaan antara peneltian terdahulu diatas tersebut dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaan tersebut terletak pada unit analisisnya yaitu didasarkan pada basis pemilih atau segmentasi pemilih. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan emosional, tradisional dan rasional untuk mengetahui tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 dikabupaten Bondowoso. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 2.1

Penggunaan Pendekatan Emosional, Tradisional dan Rasional

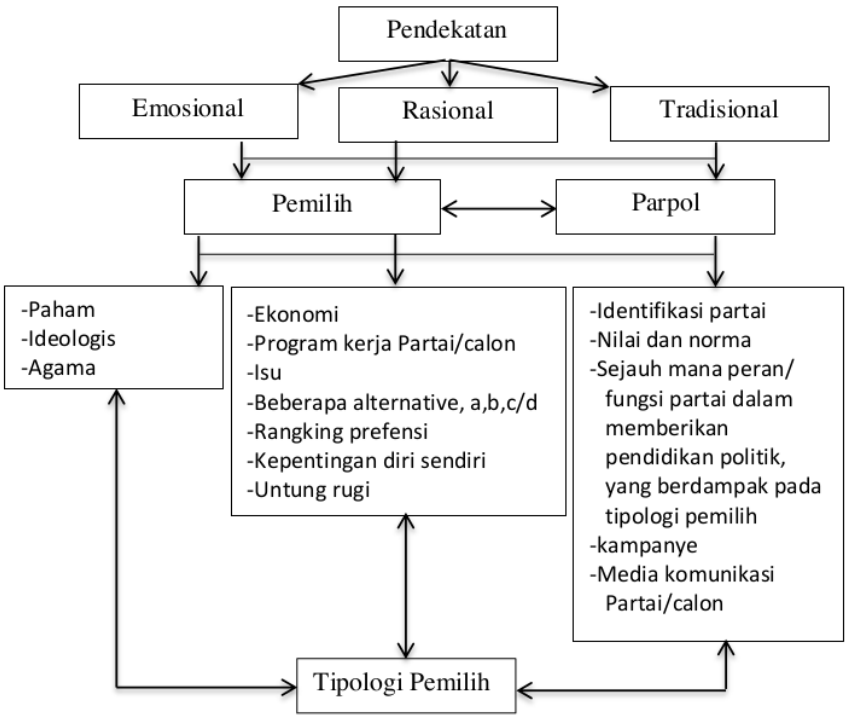

Adapun Penggunaan pendekatan emosional, tradisional dan rasional dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.2

Penggunaan Pendekatan Emosional, Tradisional dan Rasional

Pendekatan	Pertimbangan
Pendekatan emosional	1. Paham 2. Ideologis 3. Agama 4. Budaya
Pendekatan Tradisional	1. Identifikasi partai 2. Nilai dan norma 3. Sejauh mana peran/ fungsi partai dalam memberikan pendidikan politik, yang berdampak pada tipologi pemilih 4. kampanye 5. Media komunikasi
Pendekatan Rasional	1. Ekonomi 2. Program kerja Partai/calon 3. Isu 4. Beberapa alternative, a,b,c/d 5. Rangkin prefensi 6. Kepentingan diri sendiri 7. Untung rugi

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Demokrasi

Kita mengenal berbagai istilah demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan sebaginya. Dari beberapa konsep tersebut memakai istilah demokrasi yang berasal dari kata rakyat berkuasa atau *government by the the people* (kata Yunani *Demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/ berkuasa. Meski demikian demokrasi telah dikatakan dirancang dengan berdirinya Negara-negara kota (*polis*) pada masa yunani kuno sejak sebelum

dimualinya tarikh Masehi, tetapi perlu proses yang sangat lama untuk menuju era demokrasi yang dapat kita alami hingga sekarang. Para pemikir sosial dan politik yunani kuno dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera telah mengajukan gagasan cemerlang. Pidato pericles dihadapan masyarakat Athena pada waktu itu sebagai pertanda dimulainya sejarah demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai *equality* (kesamaan), didasarkan atas kemampuan dan toleransi atas perbedaan dalam kehidupan masyarakat. dalam memilih orang.

Aristoletes kemudian melanjutkan pemikiran Pericles ini dengan mengajukan '*social-base-democracy'*. Paham ini melihat demokrasi tidak hanya mengejar kekayaan (*Wealth*) tetapi lebih pada memerhatikan aspek social. Pemikiran mereka kemudian lebih dikembangkan dalam sejarah pemikiran Eropa dengan melahirkan pemikir-pemikir demokrasi modern seperti: Monstesguieu, Machiavelli, Hobbes, John Stuart Mills, John Locke, Tocqueville dan Rousseau. Jika menyebutkan beberapa pemikiran demokrasi diantara mereka yang bisa dikatakan memberikan landasan bagi terbentuknya pemerintahan demokrasi sampai sekarang ini.

Melalui Monstesguieu kita mengetahui pembagian politik yaitu lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif yang dikelompokan dalam tiga lembaga (*trias politica*), Sementara itu Tocqueville senantiasa mengingatkan bahwa suara terbanyak tidak selalu mencerminkan kebenaran karena posisi '*the tyranny of the mayority*' (tirani mayoritas) akan selalu membayang-banyangi demokrasi. Oleh karenanya yang sangat dibutuhkan perimbangan kekuasaan yang memberikan '*counter-balance*' dan alternative bagi masyarakat dalam demokrasi.

Demokrasi diartikan sangat luas dan begitu beragam, Studi literature yang dilakukan oleh Collier dan Levitsky (1997) menunjukkan bahwa tidak kurang terdapat definisi demokrasi. Schumpeter (1947) mengartikan demokrasi sebagai '*for arriving at political decision in wich*

individuals acquire the power to decide by mean of a competitive struggle for the people vote'. Sementara itu Beetham (1994) melihat bahwa sistem demokrasi bisa dikatakan berjalan jika dipenuhinya beberapa karakteristik seperti pemilihan umum yang fair dan periodik, pertanggungjawaban Negara didepan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan dalam berekspresi dan berorganisasi. Demokrasi hingga saat ini mengalami perkembangan dengan mengkorelasikan paham kebebasan induvidu (*liberalism*) ke dalam demokrasi. Menurut Fukuyama (2006) teori demokrasi modern sarat dipengaruhi oleh doktrin demokrasi liberal. Setelah Francis Fukuyama (1992) mengungkapkan dalam '*the end of history'* bahawa demokrasi liberal adalah akhir dari bentuk pemerintahan, perhatian terhadap demokrasi liberal semakin tinggi. Diamond (2003) mengartikan demokrasi liberal sebagai suatu system politik yang melindungi kebebbasan individu dan kelompok, didalamnya terdapat ruang bagi masyarakat sipil serta ruang privat yang independen serta terlepas dari control pemerintah. Dalam perspektif ini kebebasan individu dan kelompok untuk bersikap, bertindak dan untuk mengespresikan diri berkaitan dengan demokrasi.

Dewasa ini, seiring dengan semakin meningkatnya isu global tentang gerakan emansipasi (femisis), perlindungan hak dan ruang privat, mesin kapitalis dunia seperti IMF dan bank Dunia ataupun perussahaan multinasional yang memaksa diterapkannya system ini dan munculnya organisasi seperti freedem house dan human right watch sebagai pertanda adanya tekanan untuk menjadikan demokrasi liberal semakin tinggi. Demokrasi dikatakan tidak liberal jika pada pemilu secara periodik sudah dilaksanakan namun ada pelanggaran hak asasi menusia. Pemilu dilaksanakan secara periodik serta pergantian kekuasaan belum secara optimal menghasilkan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat. Disis laiin, pengadilan juga dirasa gagal dalam memberikan solusi dan fair, jujur atas perselisihan yang terjadi ditataran horizontal (antara individu, individu dengan kelompok masyarakat, dan antar kelompok masyarakat) ataupun

vertical (antara indvidu atau kelompok yang memiliki strata social dan konfigurasi kuasa berbeda). Situasi seperti ini kerap disebut sebagai pseudo-demokrasi. Demokrasi tidak liberal juga dapat didefinisikan sebagai demokrasi yang lebih mengutamakan semangat kolektivitas dari pada individualitas. Menurut demokrasi jenis ini bukan hanya sekedar mengejar kepentingan perorangan namun lebih penting lagi semangat memelihara keharmonisan dan kesamaan guna mencapai tujuan bersama.

Tujuan yang memungkinkan adanya suatu pola pemerintahan dapat terciptanya kesejahteraan dan keadilan rakyat merupakan berasal dari dasar pemikiran demokrasi sebuah. Proses yang mengantarkan dan pembentukan kekuasaan ini tidak dapat dicapai jika tidak mencerminkan dan merepresentasikan mayoritas keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Dalam demokrasi sangat dibutuhkan konstitusi yang jelas dan transparan, untuk mengatur tugas dan kewenangan masing-masing lembaga dalam struktur Negara , Diamond (2003). Gagasan yang diajukan tentang pembagian kekuasaan, diaharapkan tidak dapat dengan sewenang-wenang mencengkramkan kekuasaannya mereka untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Gagasan dasar tersebut yang menjadi pemikiran, kemudian dikembangkan untuk mendemokrasikan atau demokratisasi diseluruh Negara didunia dengan banyak campur tangan dari Negara-negara kuat seperti Amerika Serkat.

Dilain sisi, demokratisasi dimaksud untuk menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat disuatu Negara yang pada gilirannya diera global juga kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Akan tetapi, disisi yang lannya terjadi konflik kepentingan yang secara alami tidak akan dapat dihindari dalam realitas suatu gagasan. Kepentingan – kepentingan yang ada didalam masyarakat harus terwadahi dalam suatu organisasi politik melalui pemilu.

Menurut Hungtinton (1991), demokrasi mengacu pada usaha-usaha yang dilakukan untuk memulai, menerapkan dan menginstitusionalisasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dimana demokrasi tidak dengan sendirinya akan terjadi, sehingga diperlukan perangkat social yang bisa membentuk dan mengkondisikan suatu iklim demokrasi. Menurut Lipet (1959) terdapat beberapa karakteristik structural sebagai prasyarat demokrasi, seperti lapisan kelas menengah yang cukup besar, adanya kelompok-kelompok kewirausahaan (*entrepreneurship*) swasta, ditambah lagi dengan rendahnya angka buta huruf dan kesadaran masyarakat sipil. Tidaklah secara otomatis proses transisi suatu rezim non demokratis ke bentuk pemerintahan demokratis. Rustow (1970) menyatakan ada tiga tahapan yang biasanya dilalui dalam suatu system politik untuk menuju kepada system demokrasi. Pertama adalah tahapan persiapan, biasanya pada tahap ini dimulai dengan runtuhnya rezim non-demokratis. Kedua adalah tahapan pengambilan kepuutusan yang ditandai dengan ditanamkannya tatanan demokratis. Ketiga adalah konsolidasi, yang mana demokrasi sudah tertanan suatu tatanan dalam budaya politik. Usaha yang bersifat formal maupun informal sangat dibutuhkan dalam proses demokratisasi, untuk menciptakan kondisi terbuka atau transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan tidak deskriminatif serta menghargai suatu perbedaan. Membangun dan menseminasi nilai-nilai demokrasi sangat diperlukan kepada masyarakat luas guna terwujudnya satu kesepemahaman atas konsep dan pengertian demokrasi.

Menurut Teguh Prasetyo (2017), mengungkapkan bahwa demokrasi dapat dikatakan merupakan metode yang paling baik untuk mencapi tujuan-tujuan tertentu, namun demokrasi itu dalam dirinya sendiri bukan tujuan. Dalam Negara hukum nilai demokrasi itu (semua etika politik) masih harus ditundukkan kepada hokum yang berlaku. Meski ada suatu anggapan yang begitu kuat memihak metode yang demokratis dalam menentukan tempat yang nyata bahwa suatu tindakan politik secara kolektif

itu dibutuhkan. Akan tetapi masih saja muncul persoalan yaitu apakah metode demokratis itu memamng benar-benar diinginkan untuk memperluas penguasaan dan pengawasan bersama haruslah ditentukan diatas dasar yang lain, ketimbang prinsip demokrasi itu sendiri.

2.2.1.1 Demokrasi Di Indonesia

Menurut Miriam Budiardjo (2008) mengungkapkan bahwa demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi yang berdasarkan pada pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan cirinya terdapat berbagai penafsiran dan pandangan. Beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945 tetapi yang tidak dapat dipungkiri masih belum diamandemen. Selain itu Undang-undang Dasar 1945 kita secara ekplisit menyebutkan dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 mengenai system pemerintahan Negara yaitu:

1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak didasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

2. Sisten Konstitusional, pemerintahan berdasarkan atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah *Rechtsstaat* dan sistem konstitusi, sudah sangat jelas bahwa demokrasi konstitusional tersebut merupakan demokrasi yang menjadi dasar dalam Undang-undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Oleh karenanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dmuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar menjadi corak khas demokrasi Indonesia.

Sejak berdirinya Republik Indonesia, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, permasalahan pokok yang dihadapi adalah baik dari budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi didamping itu juga membina kehidupan sosial dan politik yang demokratis dan bagaimana didalam masyarakat yang beragam ini, Permasalahan tersebut berkisaran pada penyusuan suatu system politik yang mana pemimpin relatif kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *nation building*, dengan pelibatan partisipasi masyarakat serta menghindari timbulnya dictator, baik dictator yang bersifat perorangan, partai ataupun militer.

Dilihat dari sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, menurut Miriam Budiardjo (2008) maka dapat dibagi menjadi empat masa, yaitu:

1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), adalah masa demokrasi (konstitusional) dimana peran parlemen yang menonjol serta partai dan karena itu dapat dikatakan demokrasi Parlementer.

2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa demokrasi terpimpim, didalam banyak aspek telah banyak menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan, dan menunjuk beberapa aspek demokrasi rakyat.

3. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional dengan menonjolkan system presidensial.

4. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi dari praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

2.2.2 Teori Pemilu

Demokrasi identik dengan pelaksanaan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan juga diartikan sebagai rakyat berkuasa atau "government or rule by the people" Miriam Budiardjo (2005). Dimana rakyat memiliki hak untuk memilih para wakilnya, baik yang duduk di parlemen, memilih pemimpin yang akan memerintah negara (eksekutif), dan mempunyai hak untuk terlibat aktif dalam kontestasi politik itu sendiri merupakan salah satu ciri bangsa yang menjunjung sistem politik yang demokratis. Robert A Dahl (2001) mengungkapkan bahwa terdapat lima hal pokok dalam demokrasi, yaitu: persamaan dalam memberikan suara, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, kesempatan untuk partisipasi yang efektif, mendapatkan pemahaman yang jernih, dan pencakupan orang dewasa. Sedangkan Afan Gaffar (2006) menyatakan adanya rotasi kekuasaan secara teratur dan dilakukan melalui pemilihan umum, adalah syarat sebuah negara dikatakan menganut sistem yang demokratis. Salah satu bentuk rotasi kekuasaan dan pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur di Indonesia adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat di didaerah. Pemilihan umum merupakan ajang dimana rakyat menentukan pilihan tentang siapa yang akan mewakilinya, sekaligus pembaruan kontrak politik antara wakil dan yang diwakili dan sering disebut sebagai pesta rakyat, Khairul Fahmi (2016).

Sebagai konstitusi Negara Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maha karya para pendiri Bangsa, telah meletakan dasar atau landasan Konstitusional yang kuat dan konkret dalam menata dan membangun system pemerintahan yang demokratis sebagai jalan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita nasional.

Susunan Negara berbentuk republik yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimanan pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Oleh secara konkret dan ekplisit dalam amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang pemilihan umum sebagai perumusan kedaulatan rakyat Rakyat memiliki tanggung jawab, kedaulatan, hak dan kewajiban secara demokratis untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan dan parlemen.

Melalui penggunaan hak pilih universal dalam pemilu pelaksanaan demokrasi dapat dilihat, dimana setiap warga negara yang memenuhi persyaratan berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini selaras dengan penjelasan yang diberikan oleh C.B Macpherson (1973) bahwa "*One of the central value of our democratic theory has been the surpassing importance of freedom and choice*". Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Undang-undang no 07 Tahun 2017 pasal 1 ayat 1. Untuk pertama kalinya di tahun 2019 tepatnya pada 17 April 2019 bangsa Indonesia merayakan 2 pesta demokrasi (Pesta rakyat) secara bersamaan yaitu pemilu dan Pilpres. Pemilu serentak 2019 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota serta Presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 2019-2024.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat, penjelasan ini termuat pada pasal 6A ayat 1. Kemudian dalam pasal 22E ayat 2 UUD 1945 menyebutkan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dalam proses pergantian kepemimpinan baik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan melalui pemilihan umum sebagai bukti Negara yang menjunjung tinggi proses demokrasi. Sehingga sebagai bangsa yang menganut sistem demokrasi, maka pemilu sebagai perwujutannya untuk memilih para wakil rakyat dilaksanakan dalam setiap 5 tahun sekali.

Salah satu cara atau sarana guna memilih calon yang akan mewakili rakyat dalam pemerintahan itu dilaksanakan melalui pemilu. Proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu mulai Presiden, Wakil Rakyat. Pemilu adalah merupakan suatu usaha mendorong masyarakat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan upaya atau kegiatan retorika , komunikasi massa, public relation, *lobby* dan bentuk lainnya merupakan esensi dari Pemilihan umum. Agitasi dalam dunia yang demokrasi itu dikecam tetapi dalam pelaksanan kampanye pada pemilu, teknik propaganda dan agitasi juga marak dipakai para kandidat dan atau politisi selaku kominikator politik guna meraih simpati dan dukungan rakyat.

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat merupakan konsepsional pemilu. Dengan diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakinya yang ada diparlemen atau pemerintahan menjadi pemilu sebagai legitimasi kekuasaan rakyat. Rakyat dalam sewaktu-waktu dapat meminta pertanggung jawaban kekuasaan kepada pemerintah atau wakilnya yang duduk diparlemen melalui mekanisme tersebut.

Menurut G.J. Wolhoff (1960) mendefinisikan pemilu memulai dari konsep demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Oleh karenanya rakyat secara

keseluruhan dapat ikut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung sehinga system pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa. Rakyat memilih menurut salah satu system pemilihan untuk wakil-wakilnya agar menjalankan pemerintahan atas nama rakyat didalam demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.Sehingga menurut Wolhoff, bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandate dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.

Pemilu menurut Joseph Scumpeter (1947) adalah salah satu utama dari sebuah demokrasi merupakan suatu konsepsi modem yang menetapkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan periodik sebagai kriteria utama bagi sebuah system politik agar dapat disebutkan sebagai sebuah demokrasi. Dengan diselenggarakannya pemilu dianggap mampu menyuarakan suara rakyat yang sebenarnya pemilu menjadi pencerminan dari sistem demokrasi. Pemilihan Umum sebagai alat untuk memberikan kesempatan kepada Rakyat untuk ikut serta dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan system politik yang berlaku. Oleh karenanya pemberiaan suara pada pemilihan umum merupakan bentuk dari partisipasi Politik rakyat dalam Negara-Negara yang sudah demokratis,. Sudiono (1995).

Menurut Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat dengan system perwakilan atau yang disebut dengan representative democracy. Yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan yang kita kenal dengan parlemen ini merupakan praktik demokrasi. Para wakil rakyat kemudian bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wkail rakyat itu yang akan menentukan corak dan cara kerjanya pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu panjang atau pendek. Maka wakil-wakil rakyat tersebut harus

ditentukan sendiri oleh rakyat dalam pemilu (*general election*) supaya wakil wakil rakyat tersebut betul-betul bertindak atas nama rakyat,.

Sementara itu menurut Dahlan Thaib mengatakan bahwa pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Dalam sebuah Negara yang mengatut prinsip-prinsip demokrasi, maka pemilu dipandang sangat penting dilaksanakan sebagai bagian kegiatan politik sebagi bentuk dari proses penyelenggaraan kekuasaan. Maka prinsip-prinsip pemilu, jika merujuk pada prinsip dasar pemilu yang digariskan dalam konstitusi, sehingga wakil-wakil yang terpilih dalam pemilu guna menjankan pemerintahan yang demokratis, merupakan definisi secara langsung dari makna pemilu, seperti prinsip langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Menurut Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa pemilu telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilu dapat mengubah struktur pemilih tidak baik kekuasaan yang dianggap pemilih tidak baik atau mempertahankan struktur kekuasaan yang dianggap mayoritas pemilih sudah baik. Asumsi dasar pemilu baik, jika kualitas wakil-wakil rakyat yang terpilih akan baik maka jika pemilunya baik. Maka wakil-wakil yang terpilih dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di DPR sehingga DPR sebagai lembaga legislative dapat berfungsi dengan baik. Pemilu sebagai tolak ukur dalam melakukan reformasi kearah perbaikan merupakan inti yang harus menjadi perhatian. Sehingga secara sederhana pemilu dapat dimaknai sebagai upaya memilih DPR, dimana DPR terpilih tersebut dapat melakukan control terhadap pemerintah, dengan pola yang dapat menciptakan mekanisme *check and balance* yang baik apabila pemilu yang dilaksanakan juga baik.

Dengan mengutip Afan Gaffar yang juga mendasarkan pemikirannya pada Douglas W.Rae, Indra Pahlevi dalam memahami

kepemiluan, mengatakan bahwa terdapat dua pemahaman mendasar terkair kepemiluan, yaitu *electoral proses* dan *electoral laws*. *Electoral proses* dapat diartikan sebagai mekanisme yang dijalankan dalam pemilu seperti pencalonan, kampanye dan cara perhitungan penentuan hasil, dan lain sebagainya yang bersifat teknis penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah proses. Pemilu sebagai proses, mahwa pemilu sebuah proses pasti berjalan secara dinamis, sehingga pemilu merupakan proses yang bersifat teknis dan dilakukan oleh penyelengga pemilu.

Sementara menurut Syamsuddin Haris mengatakan, bahwa pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang menggunakan terbentiknya sebuah pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai aktivitas politik, maka sebagai aktivitas politik yaitu kegiatan praktis untuk membentuk pemerintahan. Oleh karenya pemerintahan. dibentuk melalui hasil pemilu, dimana semakin demokratis suatu pemilu berjalan menurut sistem hukum yang berlaku, maka pemerintahahn yang akan terbentuk juga akan menghargai demokrasi.

Menurut Rush Michael dan Althoff Philip megatakan Pemilu sebagai salah satu sarana dalam melaksanakan kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi perwakilan. Pemilu dipandang sebagai proses penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan rakyat kepada orang partai politik yang dipercayai. Orang atau partai politik kemudian menguasai pemerintahan, sehingga lewat pemilu diharapkan akan menghasilkan pemerintahahn yang representative. Oleh karenya pemilihan umum pada hakekatnya dimaksud sebagai proses demokrasi untuk memilih sejumlah pemimpin dan wakil rakyat.

Sementara menurut harris G.Warren dkk mengatakan pemilu merupakan:" Election are the accostions when citizens choose their officials and cecide, what they want the government to do. These decisions citizens

determine what right they want to have and keep. Jika melihat definisi menurur Warren, pemilu adalah wujud keinginan masyarakat untuk memilih pejabat yang akan dan akan memutuskan kepentingan mereka. masyarakat menentukan kemana hak mereka tersebut akan disalurkan untuk memilih pejabat yang akan memerintahnya.

Berbeda yang disampaikan oleh A.Hamid S. Attamini terkait dengan pemilu, ia mengatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 (lima) Tahun sekali harus dipahami sebagai pemilihan oleh dan untuk rakyat yang diperintah, bukan rakyat yang berdaulat, pemilihan umum tidak dapat disebut sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Attamini melihat bahwa pemilihan umum merupakan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan kekuasaan kepeda pemimpin yang mereka percaya. Dalam hal ini, pemilu bukan merupakan sarana untuk mewujudkan "kedaulatan rakyat".Konsep agak berbeda dengan konsep atau definisi dari ahli-ahli lainnya yang menempatkan bahwa pemilu adalah sarana implementasi kedaulatan rakyat.

Menurut Ali Moertopo mengatakan pemilu pada hakikatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai asa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu pada dasarnya adalah lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam DPR,DPRD yang pada gilirannya bertugas bersama-sama dengan pemerintah menetapkan kebijakan politik dan menjalankan pemerintahan Negara. Pemilu dipandang sebagai lembaga demokrasi untuk memilih anggota parlemen. Artinya pemilu adalah mekanisme demokratis yang diselenggrakan oleh lembaga yang demokratis untuk memilih orang-orang yang akan memerintah dengan cara-cara yang demokratis, maka merekalah yang akan menetapkan demokrasi tidaknya suatu pemerintahan.

Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Joko Prihatmoko (2008)

dalam *journal of Democracy*, bahwa pemilu disebut bermakna apabila memenuhi kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, keefektifan. Sebagai salah satu sarana demokrasi, Pemilihan umum sebagai bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat masal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam melakukan pendewasaan dan mencerdaskan pemahaman politik masayarakat. Melalui pemilu akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi dalam membangkitkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan memahami bahwa fungsi pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintahan secara teratur. Haris (1998).

14 Pada sistem yang demokratis, tujuan dari dilaksanakannya pemilu harus mencerminkan adanya kehendak dan partisipasi masyarakat. Pemilihan umum memiliki beberapa tujuan. Menurut Surbakti (1992) ada tiga hal dalam tujuan pemilu, yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternative kebijakan umum.
2. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi tetap terjamin.
3. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadapa Negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Oleh karenanya tujuan pemilu adalah sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan legitimasi rakyat serta mengikutsertakan masyarakat dalam prose politik serta fungsi pemilu sebagai alat dari demokrasi.

Pemilihan umum merupakan sarana yang sangat penting guna memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam sebuah proses pembuatan kebijakan Negara. Pemilihan umum diikuti partai politik sebagai peserta pemilu, Partai-partai mewakili kepentingan warga Negara. Kepentingan seperti nilai-nilai Agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya sering kali disampaikan oleh partai waktu pelaksanaan kampanye. Oleh karena itu, system pemilihan umum yang baik adalah system yang mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan yang berbeda dimasyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan Negara.

Menurut R. Willian Liddle dan Efriza (2012) mengemukakan bahwa dalam sistem pemerintahan yang demokratis, Pemilu dianggap sebagai penghubung antara kedaulatan rakyat sementara itu praktik pemerintahan dilaksnakan oleh elit politik. Setiap warga Negara yang sudah cukup umur dan memenuhi kriteria sebagaimana Undang-undang dapat memilih wakil mereka diparlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Jaminan wahwa hasil pemilihan umum tersebut mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat kepastian yang tercantum dalam Undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Selain itu Lawrence Le Duc juga berpendapat bahwa pemilihan umum adalah sebuah lembaga politik yang mendorong (*leads*) dan mencerminkan banyak kecenderungan social, politik dan ekonomi. Meski pemilihan dan demokrasi bukan konsep yang sinonim, namun adanya pemilihan yang bebas dan kompetitif tidak bisa dielakan sebagai salah satu ciri ktitis yang menetapkan suatu bangsa sebagai bangsa yang demokratis. Sedangkan Manuel (2012) berpendapat pemilu penting karena memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim yang baru. Pemilu yang berfungsi untuk mempertahankan *status quo* bagi rezim akan akan mempertahankan kekuasaannya dan bila pemilu dilaksanakan dalam kontek ini maka legitimasi dan *status quo* inilah yang akan dipertaruhkan.

Menurut yoyoh Rohaniah dan Efriza (2015) Pemilu adalah cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi didalam system demokrasi perwakilan modern. Sebuah sarana yang dibutuhkan dalam partisipasi adalah system pemilu. Jika system pemilu ini tidak memberikan pilihan dan prefensi politik mereka, maka pemilu bisa menjadi kegiatan yang tidak bermakna. Lebih lanjut Dieter Nohlen mengungkapkan bahwa pemilu satu-satunya metode demokratik untuk memilih wakil rakyat. Pemilu merupakan instrument politik yang dibentuk yang paling spesifik, terkait dengan hubungannya antara pemilu dan demokrasi. Dimana menurut Maurice Duverger menyatakan dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitu ada demokrasi. Pemilu merupakan instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin Negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seleuruh rakyat yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur UU mempunya hak melekukan pemilihan dan sebagai rakyat untuk menjadi pemimpin mereka. Jadi melalui pemilu rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, pemilu merupakan sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga Negara dalam prose pemilihan sebagai rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.

Sementara menurut Sigit Pamungkas yang dikuatkan oleh yoyoh Rohaniah (2015) mengungkapkan bahwa pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perorangan dan parpol tetapi yang paling utama adalah parpol. Parpol mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.

Menurut Teguh Prasetyo (2017), bahwa pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dihasilkan wakil rakyat dan pemerintah Negara. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang demikian itu harus bersifat demokratis sebagaimana dikehendaki, atau merupakan roh yang diderivasi dari dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ditambahkan dalam penjelasan UU Pemilu , I umum pragraf kesatu, bahwa pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksnakan menurut Undang-undang dasar. Makna dari kedaulatan ,berada ditangan rakyat, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalnnya pemerintahan.

Menurut Like Wilardjo (1990), mengungkapkan bahwa pancasila sebagai sumber dari sega sumber hukum bangsa Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dibuat setidaknya didorong oleh empat pertimbangan pokok. Keempat pertimbangan pokok tersebut telah dirumuskan dalam bagian menimbang (*desideratum*) atau yang dikenal dengan konsideran dari UU Pemilu. Keempat pertimbnagan itu harus dilihat sebagai desiderata bagi penyelenggaraan pemilu.

Adapun pertimbangan (*desideratum*) yang dimaksud antara lain adalah keberadaan pemilu dapat menjadi pertanda akan adanya jaminan pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Sebagaimana dikemukakan dalam UU Pemilu cita-cita dan tujuan nasional itu termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Sebagaimana tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, serta ikut melaksnakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Dalam perspektif dan cita-cita nasional, sebagaimana disebutkan diatas maka dirasa perlu menyelenggarakan pemilu. Dengan ini yang dimaksud penyelenggaraan pemilu, sebagaimana UU pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagai salah satu mekanisme dalam pemerintahan yang demokratis diseluruh dunia, pemilu tidak saja diatur oleh rezim hukum domestic suatu Negara, tetapi para ahli membuat suatu standar universal mengenai pemilu. Dengan standar tersebut, pemilu diseluruh dunia memiliki prinsip-prinsip dan dasar yang sama, sehingga rezim suatu Negara tidak bisa menggunakan pemilu sebagai alat untuk memanipulasi rakyat dengan kekuasananya. Sumber yang yang dapat kita jadikan sumber atau rujukan dimuat dalam buku panduan standar-standar internasional untuk pemilihan umum yang disusun oleh International Institute For Democracy and Election Assistence (International IDEA) pada tahun 2002, dimana ditetapkan prinsip-prinsip international yang menjadi standar pemilu yang demokratis. Ada 16 perinsip yang ditetapkan dalam memandang pemilu yang demokratis, yaitu:

1. Menggunakan standar pemilu yang diakui international
2. Harus ada kerangka hokum pemilu yang dimiliki oleh masing-masing Negara.
3. Memiliki system pemilu yang jelas
4. Ada penetapan batasan
5. Hak untuk dipilih dan memilih
6. Memiliki badan pelaksana pemilu
7. Ada pendaftaran pemilih dan daftar pemilih
8. Akses suara bagi partai politik dan para kandidat

9. Kampanye pemilu yang demokratis
10. Akses ke media dan kebebasan berekspresi
11. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
12. Pemungutan suara
13. Penghitungan dan mentabulasi suara
14. Ada peranan perwakilan partai dan kandidat
15. Ada pemantau pemilu
16. Ada kepatuhan terhadap penegakan Undang-undang pemilu.

Berdasarkan 16 standar yang ditetapkan oleh international IDEA tersebut untuk memastikan demokratis tidaknya suatu pemilu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemilu merupakan kedaulatan rakyat yang memiliki kerangka hukum dengan keterlibatan berbagai komponen masyarakat disuatu Negara dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat dalam membentuk pemerintahan yang didasarkan pada hukum. Guna membentuk Pemerintahan yang berdasarkan hukum, maka pemilu yang diselenggarakan harus patuh dan taat pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemilu merupakan elemen penting dalam memelihara kedaulatan rakyat. Pada pemerintahan yang demokratis, kedaulatan rakyat (*people's sovereignty)* menjadi konsep tertinggi dalam memastikan bahwa kekuasaan pemerintah (*the power of government, de macht van de overhead*) harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan pemerintah sebagai wujud dan fondasi dasar suatu Negara yang demokratis. Maka dalam membatasi kekuasaan pemerintahan tersebut harus dilakukan pergantian secara berkala dan tertib agar tidak terjadi disharmoni dalam suatu masyarakat. Terciptanya ketertiban, keadilan, dan perdamaain bagi semua pihak dalam proses pergantian kekuasaan merupakan titik utama dari upaya adanya pembatasan pemerintahan. Rakyat dalam pemilu, ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan primer (*premairy sovereignty*). Yang dimaksud dengan rakyat bukanlah penjumlahan dari individu-individu didalam Negara, melaikan adalah satu kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu sendiri yang

memiliki kehendak. Kehendak individu tersebut diperoleh melalui perjanjian masyarakat atas kehendak umum yang dimanefestasikan pada penyelenggaraan pemilu.

2.2.3 Teori Tipologi Pemilih

Dalam penyelenggaraan pemilu sering kita temukan kenapa ada orang melakukan tindakan politik sementara yang lain tidak, kenapa orang memilih partai PDIP, kenapa bukan Golkar, PKB, PPP, PAN, PKS, PBB, atau bahkan memilih PKB, kenapa bukan PDIP, PPP, PKS, atau Golkar? Kenapa orang memilih partai politik cenderung konsisten dari Pemilu ke Pemilu, sedangkan yang lain berubah- ubah? kenapa dalam masyarakat tertentu memiliki cenderung punya pilihan politik yang hampir sama atau bahkan berbeda? apa Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang menentukan pilihan dalam suatu penyelenggaraan pemilu? Begitu banyak pertanyaan senada akan muncul apabila kita menganalisis tipologi pemilih dalam Pemilu. Bukan hanya bagi ilmuwan politik Pertanyaan-pertanyaan ini menarik, masyarakat awam, apalagi menarik bagi politisi. Yang menjadi persoalannya disini, apakah ada teori yang relatif "mapan" yang dapat pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Apakah ada teori yang relatif "baku" yang mampu mengungkap fenomena tipologi pemilih di hampir semua negara yang menerapkan sistem pemilihan umum dengan pemilihan langsung?

Tipologi tediri dari kata type yaitu berasal dari kata typos (bahasa yunani), yang bermakna impresi, bentuk, gambaran, jenis, atau karakter suatu objek sedangkan logy adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu, sehingga tipologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang impresi, gambar,bentuk, jenis atau karakter dari suatu objek. Menurut Zamroni (2007) Tipologi yaitu karakter yang unik dan spesifik yang melekat pada orang-orang tertentu yang membedakannya dengan orang lain. Sementara definisi pemilih sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang

no 07 tahun 2017 adalah warga Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Zamroni (2007) menyebutkan tipologi adalah karakter yang unik dan spesifik yang melekat pada orang-orang tertentu yang membedakannya dengan orang lain dan pemilih adalah warga Negara yang menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Jadi tipologi pemilih adalah perilaku politik masyarakat yang berkaitan dengan pemilihan umum guna merebut hati rakyat dalam khazanah intelektual yang rasional atau non rasional. Pemilih dalam pemilihan umum tidak terlepas dari identitas pemilih baik dari factor social budaya pemilih. Pemilh rasional dapat dipengaruhi oleh program kerja partai Politik atau Calon, yang memiliki kemampuan menawarkan kepada masyarakat untuk mengangkat kesejahteraan rakyat dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebaliknya pemilih non rasional bukan memperhatikan program kerja partai politik atau calon, melainkan siapa yang memberikan bantuan lebih besar ketika kampanye baik tertutup ataupun kampanye terbuka.

Kajian terkait tipologi pemilih tidak bisa dilepaskan dari aspek perilaku politik, menurut gaffar (2013) perilaku pemilih adalah keputusan seseorang dalam memberikan suara kepada kandidat tertentu. Hal demikian terjadi pada setiap perhelatan politik baik pemilihan kepala daerah ataupun Pemilihan umum. Artinya dalam sebuat perhelatan politik tersebut dapat membawa efek yang merujuk pada prefensi politik bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Sehingga prefensi politik pemilih tentunya akan menggambarkan segmentasi yang berbeda-beda pula. Melihat dari realitas tersebut maka, masyarakat sebagai pemilih dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat preferensi politik mereka, menurut Firman (2013):

1. Konstituen, Konstituen adalah kelompok masyarakat yang diwakili dan memiliki kedekatan dengan suatu partai atau kandidat. Kelompok masyarakat ini yang merupakan basis pendukung kandidat. Konstituen

memiliki loyalitas yang paling tingi dibandingkan dengan jenis pemilih lainnya.

2. Non partisan, adalah massa mengambang yang masih belum memutuskan partai politik mana yang mereka dukung. No partisan tidak mengikatkan diri dengan suatu partai politik apapun Biasanya jenis pemilih ini menjatuhkan pilihan diakhir periode kampanye, atau mereka sama sekali tidak memilih karena merasa tidak ada kandidat yang sesuai dengan harapan mereka.

3. Pendukung atau konstituen kandidat lain, adalah masyarakat yang memiliki pendapat berbeda dalam memandang kandidat mana yang pantas untuk menjadi peminpin mereka.

GAMBAR 2.2

Pembagian Jenis Pemilih

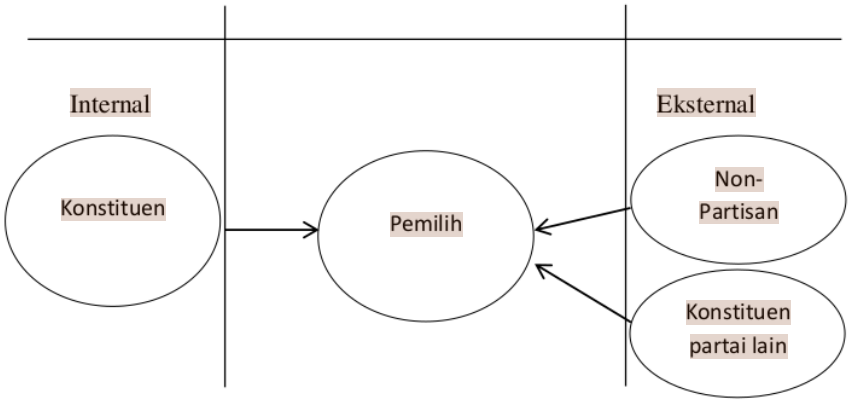

Pada gambar 2.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa, konstituen adalah yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi partai politik. Konstituen merupakan kelompok pemilih yang sudah jelas memiliki keterikatan dengan partai politik. Konstituen adalah kelompok pendukung atau basis masa partai

politik baik dari internal partai ataupun dari eksternal partai lainnya. Sementara pemilih merupakan kelompok masyarakat biasa yang bukan merupakan konstituen partai politik, kelompok pemilih ini memiliki beragam kelompok. Pada kelompok non partisan, yang mana pandangan terkait tujuan politik dan ideologi mereka tidak dikorelasikan dengan parpol tersebut, kelompok ini senantiasa menunggu sampai ada partai politik yang dapat menjanjikan program yang terbaik, kemudian pemilih akan memilih partai politik yang terbaik.

Upaya menjelaskan tipologi pemilih sudah menjadi diskusi dan analisis para akademisi dan juga politikus semenjak Down (1957) mempublikasikan buku yang berjudul *An economic theory of democracy*, kita semua sadar bahwa keputusan memilih (*to vote*) berbeda sangat signifikan dengan keputusan ekonomi serta komersial pada umumnya. Keputusan memilih (*to vote*) dalam pemilu dapat dianalogikan sebagai perilaku pembelian (*puschasing*) di dunia bisnis serta komersial. Dalam dunis bisnis serta komersial, keputusan pembelian (*to vote*) yang salah akan mempunyai dampak langsung terhadap subjek dengan kehilangan utilitas (*utility loss*) barang atau jasa yang dibelinya. Sementara itu keputusan yang salah dalam pemilihan umum tidak memiliki efak langsung bagi si pengambil keputusan, karena keputusan individu tidak akan memiliki memiliki arti apa-apa kecuali dalam jumlah yang besar. Keputusan individu merupakan bagian kecil dari keputusan kolektif. Hanya pada individu-individu yang memiliki posisi dengan kemampuan untuk memberikan pengaruh dan opini publik lebih luas. Menurut Down (1957) partisipasi politik lebih dilihat sebagai aksi masing-masing individu untuk mempertahankan dan mempertahankan institusi demokrasi.

Menurut Schumpeter (1966) mengatakan pemilih mendapatkan informasi politik dalam jumlah besar (*overload*) dan beragam, kerapkali berasal dari bermacam sumber yang sangat mungkin bersifat kontradiktif . Dalam kondisi seperti ini pemilih akan dihadapkan pada situasi yang sangat sulit untuk mengklafikasikan informasi. Apakah informasi-informasi

tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya, informasi yang baik atau hanya sekedar isu, rumor politik yang tidak berdasar pada pondasi yang kokoh, hanya didasarkan pada *judgement* dan persepsi semata. Sehingga ini yang menjadikan pemilh rasional atau tidak rasional dalam mengambil keputusan (*to vote*) dalam pemilihan umum. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan pendekatan emosional (pertimbangan paham ideologis, agama, budaya), tradisional (identifikasi partai) dan rasional (pertimbangan ekonomi, program, isu).

Pemilih dalam pengambilan keputusan, selalu dihadapkan dengan pilihan yang rasional atau tidak rasional. Menurut Popper (1974) tentang rasionalitas' I have a deep ingrained fear of big words, such as rationality. Weber (1972) mengklasifikasikan rasionalitas nilai (*value-rationallity*) dengan rasionalitas tujuan (*goal-rationallity*). Berdasarkan suatu nilai seperti etika, moralitas, agama, hal-hal yang bersifat kesukaan, asal usul atau estetika, maka rasionalitas nilai seperti ini diartikan sebagai orientasi aksi. Rasionalitas setipa orang diukur dari sejauhmana dalam mengambil keputusan (to vote) didasarkan pada nilai-nilai yang mereka pegang dan bukan dari tujuan yang hendak mereka capai. Sementara itu rasionalitas tujuan merupakan orientasi keputusan dan aksi berdasarkan kesesuaian dengan tujuan akhir. Metode pencapainnya dan konsekuensi individu akan dinilai rasional ketika keputusan dan aksinya mendukung tujuan akhir.

Sementara Evans dan Over (1996,1997) membedakan kedua konsep rasionalitas. Pertama, rasionalitas diartikan sebagai berfikir, berbicara, berargumen, mengambil keputusan dan beraksi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (R1). Rasionalitas jenis ini lebih mengedepankan alasan-alasan pribadi guna mencapai tujuan personil. Kedua, rasionalitas diartikan sebagai berfikir, berbicara, berargumen, megambil keputusan dan beraksi berdasarkan system normative tertentu (R2). Rasionalitas jenis ini lebih menitik beratkan pada seberapa kuat derajat persamaan (*konformitas*) diantara keputusan individu dangan best

practice yang ada dan atas kebenaran yang diyakini pada masyarakat. Semakin ada kesamaan keputusan individu dengan standar sosial, maka akan semakin diangap rasional pula. Kedua rasionalitas ini tidak berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Seseorang dapat dikatakan sangat rasional dalam usaha mencapai tujuannya (rasional pertama), namun bisa jadi bertolak belakang (perilaku penyimpangan sosial) dengan standar umum yang ada didalam masyarakat. Dengan menyakini pada sistem perbedaan ini, setiap orang dapat meraih tujuannya terlepas dari diskusi apakah tujuannya yang hendak dicapai tersebut rasional atau tidak. Kemudian masing-masing individu akan menterjemahkan tujuan yang akan dicapainya dengan cara yang berlainan pula.

Definisi yang serupa tentang rasionalitas, sebagaimana dikemukakan oleh Chater dkk (2003). Meraka membedakan rasionalitas kalkulasi dan rasionalitas deskripsi. Rasionalitas kalkulasi didefinisikan sebagai proses berfikir yang menggunakan teknik atau metode probabilistic, logika, dan proses pengambilan keputusan. Sementara itu derajat keputusan atau perilaku dibandingkan dengan standar hasil yang ditelorkan merupakan arti rasionalitas kalkulasi rasionalitas deskripsi. Gigerenzer dan Goldstein (1996) menyakini bahwa pandangan klasik rasionalitas (bahwa aturan rasional adalah standar yang harus digunakan dalam proses pengambilan keputusan) harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Banyak kalangan berpendapat bahwa metode satatistik, game theory probabilistic, dan kalkulasi adalah metode yang harus digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut Linderberg (1985) konsep rasionalitas berangkat dari konsep individu yang memilki prefensi dan dihadapkan pada kendala (*constraints*) ketika harus mengambil keputusan. Biasanya premis dasarnya adalah bahwa individu memiliki sifat egois, penuh kalkulasi dan bermaksud memaksimalkan utilitas. Sehingga semakin seorang individu mampu memaksimalkan keuntungan sekaligus menekan biaya (*cost*), maka yang bersangkutan dianggap semakin rasional. Demikian juga sebaliknya, ketika individu tidak menggunakan rumus perhitungan untung rugi dalam

proses pegambilan keputusan, maka yang bersangkutan dianggap sembrono dan tidak rasional. Sementara berbeda dengan Breen (1999), ia berpendapat bahwa pengambilan keputusan dan beraksi berdasarkan sistem nilai dan keyakinan (*belief*) yang mereka pegang, bukannya berdasarakan kalkulasi untung rugi. Sistem kepercayaan dan nilai mendorong setiap individu untuk mengambil keputusan. Dengan demikian sistem keyakinan dan nilai memiliki kekuatan lebih untuk mendorong keputusan yang akan diambil dibandingkan dengan logika dan perghitungan kalkulasi. Keyakinan atau beliefs adalah hasil dari proses non rasional. Diambilnya system keyakinan (*beliefs system*) pada studi proses pengambilan keputusan didasarkan pada kenyataan bahwa individu atau actor tidak pernah mempunyai informasi yang utuh. Ketika yang bersangkutan dihadapkan pada situasi ini, sistem keyakinanlah yang akan menuntun mereka memilih seseorang apakah memilih X ketimbang X', hanya karena percaya X lebih baik ketimbang X', Boudon (1999) bahwa dalam tradisi Freud, Marx dan Durkheim. Senada yang disampaikan Converse (1968) mengatakan bahwa keyakinan politik pada kelas masyarakat yang berpendidikan rendah secara keseluruhan terfragmentasi dan *chootic*. Dia mengemukakan bahwa pada banyak fenomena, keyakinan ini bukanlah hasil dari kalkulatif dan analisis logis. Keyakinan tersebut tumbuh dan berkembang dari proses pengalaman in-vivo serta internalisasi (*dogmatisasi*) keyakinan yang dipegang teguh oleh masyarakat pada umumnya. Keyakinan individu atas sesuatu sangat sulit untuk diminta argumentasi serta alasan yang melatarbelakangi keyakinan tersebut. Dimana, keyakinan dari keyakinan bersifat baku dan sulit digoyahkan. Masyarakat meyakini bahwa keyakinan sebagai sesuatu yang *taken-for-granted* atau memang sudah begitu adanya. Setiap upaya yang ditujukan untuk mempertanyakan kebenaran atau alasan suatu kebenaran akan dianggap sebagai perilaku kurang ajar, menyimpang, bermoral rendah tidak tahu diri, dan semua stereotype negative lainnya.

Sementara pilihan rasional menurut coleman menekankan bahwa seorang individu melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut

akan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai sebuah tujuan, artinya tindakan seseorang itu merupakan tindakan purposif atau tujuan. Teori gagasan coleman itu tampak pada gagasan yang memandang tindakan seseorang mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut merupakan tindakan yang ditentukan oleh nilai atau prefensi pilihan. Menurut coleman aktor rasional memilih tindakan yang dapat memaksimakan kebutuhan mereka dan sumberdaya adalah setiap potensi yang ada dan dimiliki baik (potensi yang ada dalam diri seseorang) sumber daya manusia.

Pendekatan pilihan rasional meletakkan logika berfikir pada pendekatan ekonomi yang dianjurkan oleh Down (1957). Jika pilihan rasional bisa menjelaskan mekanisme pasar, maka teori ini tentunya mampu menjelaskan "pertukaran" suara dalam politik. Dalam konteks tersebut Downs menulis:

> Our main thesis is that paties in democratic politics are analogous to entreneurs in a profit-seeking economy. So as, to attain their private ends, they formulate whatever policies they believe will gain the most votes, just as entrepreneurs produce whatever product they belive will gain the most profits for the same reason. In onder to examine the implications of this thesis, we have to assused that cirizens behave rationality in politics. This premis is itself a second major hypothesis.

Sejalan dengan uraian diatas, Budge dan Farlie (1977) yang dikuatkan Leo Agustino (2020), menerangkan dua faktor penting dalam pendekatan pilihan rasional. Pertama, partai politik yang menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Kedua, pemilih yang ingin memenuhi kepentingan politik dan ekonomi mereka. Proses pemilihan didasarkan pada "lembaga pertukaran" antara pemilih dan partai politik untuk saling mencapai keuntungan masing-masing. Disatu sisi pemilih menggunakan suaranya untuk memaksimalkan manfaat yang hendak diperolehnya, Sementara partai politik akan memformulasikan kebijakan dan program propemilih agar meraih suara dalam pemilihan

umum. Argumentasi utamayang melatarbelakangi teori pilihan rasional adalah konsep "pertukaran yang rasional" (rasionalitas)

Menurut Ramlan Surbakti (2015), dalam pendekatan pilihan rasional, ia melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapakan. Akan tetapi digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mecalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemrintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung rugi digunakan utuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Sementara itu Brennan dan Lomasky (1977) serta Fiorina (1976) menyatakan bahwa keputusan memilih selama pemilu adalah perilaku '*ekpresif*'. Perilaku ini tidak jauh berbeda dengan perilaku *supporter* yang memberikan dukungannya pada sebuah tim sepakbola, volly dan olah raga lainnya. Maka faktor loyalitas dan ideologi mempengaruhi perilaku memilih mereka. Jika tidak ada loyalitas pemilih kepada partai politik yang dijagokan maka keputusan dalam memberikan suara serta dukungan tidak akan terjadi**.** Sementara itu sebaliknya jika mereka menganggap partai politik tidak loyal dan konsisten terhadap janji politik dan harapan yang telah mereka berikan maka pemilh tidak akan memberikan suaranya,. Sehingga dari sini dapat dilihat, konsepsi loyalitas dari dua arah, yaitu dari partai politik ke konstituen dan konstituen kepada partai politik. Selain itu tipologi pemilih juga sarat dengan kedekatan ideologi antar pemilih dengan partai politik. Kemudian masing-masing kontestan membawa ideologi yang berbeda antara partai yang satu dengan partai lainnya. Kecenderungan partai politik atau kontestan tidak akan dipilih dalam pemilu jika tidak ada kejelasan program kerjanya. Sementara sebaliknya pemilih yang mementingkan ikatan ideology partai politik atau kontestan akan cenderung menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti: kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi dan psikografis. Oleh karenanya semakin

dekat kesamaan suatu partai politik atau kontestan maka pemilih dengan orientasi ideology seperti ini akan cenderung memberikan suaranya kepada partai atau kontestan tersebut.

Analisis yang mendalam dan komprehensif sangat dibutuhkan dalam memahami tipologi pemilih. Kompleksitas dari tipologi pemilih berdasarkan karakteristik bila hanya klasifikasikan pada pendukung dan massa mengambang saja. Para pendukung partai politik atau calon dan massa mengambang mempunyai karakteristik pemilih rasional atau non rasional. Diamana kedua karakteristik tersebut dapat ditemuai pada masing-masing pemilih. Hanya saja yang membedakan adalahderajat dan kadarnya saja. Menurut firmanza (2008) mengemukakan pada setiap pemilih terdapat dua orientasi sekaligus: (1) orientasi *policy problem-solving* dan (2) orientasi *ideology*. Penilaian pemilih kepada partai politik atau calon legislatif jika didasarkan pada orientasi *policy problem-solving,* maka yang paling penting dalam pandangan pemilih adalah sampai seberapa sejauh mana partai politik atau kontestan dapat menjanjikan program kerja dan tawaran solusi atas permasalahan masyarakat tersebut. Objektifitas pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih partai yang mempunyai kepekaan terhadap penyelesaian masalah dan cara partai politik atau calon pada tawaran program kerjanya. Dalam kontek yang lain pemilih yang mementingkan ikatan ideology partai politik atau kontestan akan lebih memperioritaskan aspek-aspek subjektivitas seperti: kedekatan emosi, agama, nilai, norma, budaya, moralitas dan psikografis. Maka kaena itu aspek tersebut lebih mendekati kesamaan suatu partai politik atau calon maka pemilih dengan orientasi ideologi seperti ini akan mempunyai cenderung memberikan suaranya kepada partai atau calon tersebut.

Firman (2010), mengkaji tipologi pemilih dalam pemilu akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan calon yang memiliki kepekaan terhadap masalah dan kejelasan program. Kecenderungan pemilih tidak adakan memilih partai politik yang arah kebijakannya tidak jelas sementara itu pemilih yang lebih mementingkan

ikatan ideologi suatu partai atau seorang calon, cenderung mempunyai aspek-aspek sebjectivitas yang mempengaruhi pemilih. Berdasarkan perspektif diatas, dapat menganalisa tipologi pemilih dalam pemilihan umum, karena tipologi pemilih tersebut dianggap mempunyai tingkat kebebasan yang cukup tinggi untuk berbeda dengan orang lain pada lingkungannya dimana mereka tinggal. Masing-masing pemilih mempunyai sistem nilai, cara berfikir, kemampuan, serta tipologi yang tidak sama antara pemilih yang satu dengan lainnya. Lingkungan tidak menentukan tipologi pemilih tetapi akan tetapi dapat mempengaruhinya, sementara keputusan akhirnya terdapat pilihan tersebut ditentukan oleh pemilih itu sendiri. Adapaun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih dapat dilihat pada gambar beikut ini:

GAMBAR 2.3

Faktor Determinan Memilih

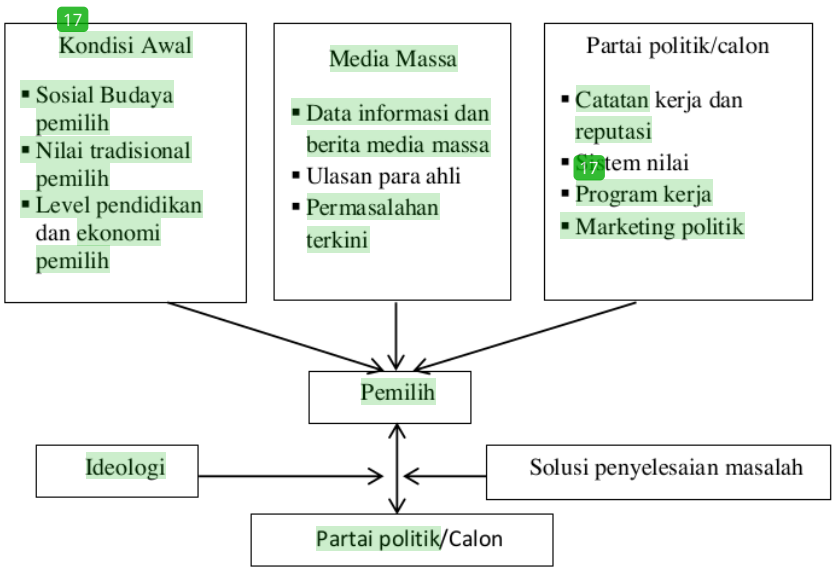

Berdasarkan gambar 2.3 diatas dapat dijelaskan bahwa pertimbangan pemilih dipengaruhi oleh 3 faktor pada saat bersamaan (1)

kondisi awal pemilih, (2) Media massa dan (3) partai politik atau Calon. Kondis awal digambarkan adalah karakteristik yang melekat pada pemilih. Setiap pemilih memiliki dan mewarisi system nilai serta kepercayaan yang berbeda satu sama lainnya. Senada dengan yang diungkapkan Chapman dan Palda (1983) Individu yang tidak memiliki pendidikan tinggi akan cenderung mengunakan aspek non-rasional dalam pengambilan keputusan. Faktor emosional, rumor, isu, dan pendapat umum merupakan hal penting dalam proses pengambilan keputusan. Masing–masing indiividu mempunyai kemampuan untuk berbeda antara satu pemilih dengan pemilih lainnya, ini akan sangat mempengaruhi dalam proses menetukan pilihan. Tingkat ekonomi dan pendidikan diyakini dapat mempengaruhi pemilih dalam membuat keputusan kepada partai politik atau kontestan. Sementara itu pemilih yang memiliki pendidikan tinggi akan cenderung lebih selektif dan sangat berhati-hati dalam proses pilihan politik mereka. Informasi-informasi yang mereka peroleh tidak kemudian semerta-merta langsung diterima, namun akan dilakukan verifikasi apakah opini publik, informasi, wacana tersebut dari sumber yang dapat dipercaya atau tidak. Selanjutnya ialah lokasi geografis yang diyakini juga dapat mempengaruhi cara pemilih dalam menganalisa informasi, pemilih yang tinggal didaerah perkotaan relative sudah terbiasa dengan informasi-informasi yang bermacam-macam dan bertolak belakang dibandingkan dengan pemilih yang tinggal dipedesaan.

Pola berinteraksi pemilih sangatlah penting, dimana faktor lingkungan dimana pemilih tinggal dan, seperti kondisi sosial budaya dan nilai tradisional. Apa yang ada pada lingkungan eksternal mempengaruhi cara berfikir dan bertindak setiap pemilih. Dalam lingkungan keluarga, pemilih misalnya dibesarkan dalam keluarga yang memiliki ideology Islam, maka terdapat kecenderungan individu tersebut untuk meniru dan mempraktikan nilai-nilai Islam tersebut, karena mereka sudah terbiasa dengan prinsp Islam pada kehidupan keseharian mereka.

Faktor kedua adalah media massa mempengaruhi pemilih, Hotstetter (1978) mengatakan bahwa kemampuan media massa untuk

mendistribusikan informasi merupakan kekuatan untuk membentuk opini publik. Maka seberapa besar opini publik tersebut didasarkan oleh seberapa luas informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketika pemberitaan media massa terhadap partai politik bersifat positif, maka masyarakat cenderung menilai partai tersebut positif. Dan juga sebaliknya jika media massa ramai-ramai memberitakan keburukan partai politik, maka masyarakat cenderung menilai partai atau kontestan tersebur negatif. Hubungan media massa dalam memandang partai politik tidak selalu objektif dan netral, bahkan cenderung bisa calam memberikan potren dan deskripdi informasi terkait partai politik dan calon, Trent dkk (2001). Faktor factor biasnya informasi tersebut disebabkan karena wartawan dan jurnalis yang menulis berita memiliki sistem nilai, moralitas, memiliki tingkat pendidikan dan budaya yang dapat mempengaruhi analisis terhadap berita yang ditulis. Bahkan, diperparah lagi dengan adanya wartawan dan media massa cenderung memiliki keberpihakan pada partai politik tertentu karena memang menjadi kader atau simpatisan partai politik tertentu.

Faktor ketiga adalah karakteristik partai politik dan calon itu sendiri. Partai politik memiliki atribut seperti citra, reputasi, image, latar belakang, ideology serta kualitas para calonya akan mempengaruhi penilain pemilih. Pemilih seringkali mencampuradukan antara kualitas calon dengan partai politik yang menjadi kedaraannya. Aktivitas dan perilaku para politikus partai politik sangat mudah dinilai oleh masyarakat melalui kualitas orasi, program kerja, kepedulian, sikap yang ditunjukkannya sebagai barometer sebuah partai politik. Menurut Fiorina (1981) mengungkapkan bahwa membangun reputasi sebuah partai politik atau seorang kontestan membutuhkan waktu yang tidak sekejap dan merupakan hasil dari akumulasi inforamasi serta kinerja dalam jangka waktu yang lama. Karp dkk (2002) berpendapat bahwa peranan seorang pemimpin dalam partai politik sangat penting. Sorang pimpinan partai politik dapat memberikan petunjuk singkat dan gambaran tentang kualitas partainya. Hal demikian sangatlah berguna bagi pemilih ketika yang bersangkutan

dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainly) tentang partai mana yang harus dipilih, Sniderman dkk (1991).

Dari ketiga hal diatas dapat mempengaruhi (*judgment*) pemilih terkait kedekatan dan ketertarikan mereka terhadap partai politik. Pengaruh dari ketiga factor tersebut memiliki kadar yang berbeda-beda. Media massa mempunyai peranan pada pembentukan opini public (*public opinion*) maka faktor ini sangat mempengaruhi cara perfikir dan pola bertindak pemilih. Termasuk juga juga faktor keluarga yang lebih kuat dan masing-masing individu yang ada didalamnya, pendidikan didalam keluarga sangat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politik dalam pemilu.

Setiap pemilih memiliki warisan dan daya, kemampuan yang berbeda-beda antar satu pemilih dengan pemilih lainnya. Hal itu tentu akan dapat dipengaruhi oleh pemilih pada proses pada diri pemilih ketika akan menjatuhkan pilihannya. Ekonomi dan tingkat pendidikan pemilih mempengaruhi pada proses pengambilan keputusan. Pemilih yang memiliki pendidikan rendah memiliki kecondongan akan menggunakan aspek non rasional dalam pilihan politiknya, faktor-faktor kedekatann emosional, isu, rumor *stereotype*, dan oponi publik, pendapat umum merupakan hal yang tidak penting dalam pengambilan keputusan hak politiknya. Dilain hal pada pemilih yang berpendidikan yang lebih tinggi akan condong lebih selektif ketika akan membuat keputusan terhadap pilihan poliitk mereka. Informasi-informasi yang didapat oleh pemilih tidak semerta-merta akan ditelan mentah-mentah akan tetapi mereka akan menfilter, memverifikasi dakan menganalisa apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya atau tidak. Letak geografis juga mempengaruhi cara pemilih dalam melakukan analisa terhadap sesuatu, pemilih yang tinggal didaerah kota cenderung sudah lebih terbiasa mendapatkan informasi yang bermacam-macam dan bahkan bertolak belakang dibandingkan dengan pemilih yang tinggal dipedesaan. Berdasarkan deskripsi diatas terdapat empat tipologi pemilih yaitu, pemilih tradisional, pemilih kritis, pemilih rasional serta pemilih skeptis.

Tipologi pemilih juga sering dipengaruhi dengan pemberian dari calon yang lazim disebut vote buying atau politik uang. Dibutuhkan suatu analisa yang menghubungkan fenomena-fenomena perilaku memilih, baik yang terjadi di dalam atau di luar individu. Asrinaldi (2012) menyatakan bahwa dengan menghubungkan variabel-variabel yang ada dalam perilaku memilih, dapat diketahui mengapa seseorang melakukan tindakan politik, sementara yang lain tidak. Dengan mengetahui perilaku memilih di suatu daerah, juga berguna bagi partai politik untuk melakukan pemetaan pemilih yang merupakan fondasi dalam mendesain kampanye kompetisi elektoral yang efektif dan efisien. Sigit Pamungkas (2012).

Tipologi pemilih menjadi kajian menarik, karena berbagai faktor turut mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Faktor tersebut diantaranya seperti faktor kedaerahan / daerah asal calon, identifikasi kepartaian / kedekatan pemilih dengan partai pengusung calon, dan program-program pasangan calon yang dianggap akan memberikan keuntungan bagi mereka jika si calon terpilih, dan faktor agama. Meyer (2004) mengatakan bahwa kebudayaan berbasis agama dipengaruhi praktik kebiasaan beragama.

Dengan adanya sejumlah studi tipologi pemilih, maka tersedia data yang memadai untuk melakukan inferensi- inferensi teoritis. Riset pemilu merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen pemilu. Riset tidak hanya memberikan rasionalitas akademik mengenai suatu substansi pemilu. Riset lebih jauh memberikan pijakan empirik mengenai persoalan atas hal yang menjadi perdebatan. Hasil riset memastikan program dan kebijakan kepemiluan tidak dibangun atas postulat spekulatif, tetapi dikontruksi berlandaskan pada argument empirik dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan. Ia adalah fondasi praktik demokrasi perwakilan. Persoalannya, terdapat sejumlah masalah menyangkut partisipasi pemilih yang terus menggelayut dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sayangnya, persoalannya itu tidak banyak diungkap dan sebagian

menjadi ruang yang terus menyisakan pertanyaan. Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya adalah fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, gejala politik uang, misteri derajat melek politik warga, dan langkahnya kesukarelaan politik.

Oleh karenanya untuk menggambarkan tipologi pemilih, menurut Firman (2012) membagi tipologi pemilih kedalam kelompok:

1. Pemilih Rasional, pemilih pada level ini tidak mementingkan fanatisme pada partai politik maupun kandidat, mereka cenderung melihat apa yang telah dilakukan oleh partai politik maupun seorang kandidat sebelumnya dengan hitungan untung rugi.

2. Pemilih Kritis, artinya pemilih yang selalu menganalisis ideology partai politik atau kandidat dengan kebijakan yang telah dan akan dilakukan, sehingga mereka akan selalu memiliki keinginan memperbaiki kenerja dan kebijakan partai politik dan kandidat. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka mereka kan mengalihkan pilihan politiknya pada partai politik atau kandidat lainnya. Dengan begitu tipologi ini merupakan perpaduan antara orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kandidat dan akan orientasi mereka hal-hal yang bersifat ideologis.

3. Pemilih Tradisional, adalah pemilih yang memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dalam mengambil keputusan politik tidak mempertimbangkan aspek rasional maupun kritis. Prefensi politik mereka didasarkan pada kedekatan social-budaya, nilai asal-usul, faham, dan agama. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanya, loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri yang paling tampak pada pemilih jenis ini.

4. Pemilih Skeptis, ikatan pemilih terhadap partai maupun kandidat sangat rendah, dengan demikian maka prefensi politik mereka sangat kurang, hal ini ditandai dengansikap apatis pemilih serta tidak memperdulikan

ideology partai maupun program kerja dan kebijakan partai politik maupun kandidat.

Adapun untuk lebih jelasnya tipologi pemilih berdasarkan krakteristik dan indikatornya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.3

Tipologi Pemilih Rasional, Krakteristik dan Indikator

Tipologi	krakteristik	Indikator
Pemilih Rasional	• Tidak begitu mementingkan ideolgi • Program kerja Partai/calon • Isu • Beberapa alternative, a,b,c/d • Rangkin prefensi • Kepentingan diri sendiri • Untung rugi	• Pemilih memiliki orientasi tinggi pada 'policy-problem-solving' dan berorientasi rendah untuk factor ideology. • Factor seperti agama, faham, nilai tradisional, asal usul, budaya dan psikografis akan menjadi pertimbangan, tapi bukan hal yang utama. • Pemilih ini lebih memandang pada kemampuan partai politik/peserta pemilu dan calon yang dilihat pada program kerjanya. Program kerja (platform) dilihat dari: a. kinerja partai dimasa lalu (ketika duduk diparlemen). b. Tawaran program dan solusi dalam penyelesaian permasalahan.

Berdasarkan tabel 2.3 dapat kita lihat pada Pemilih Rasional, pemilih pada level ini tidak mementingkan fanatisme pada partai politik maupun kandidat, mereka cenderung melihat apa yang telah dilakukan oleh partai politik maupun seorang kandidat sebelumnya dengan hitungan untung rugi. Pemilih rasional memiliki orientasi tinggi pada 'policy-problem-solving' dan berorientasi rendah untuk faktor ideology. Pada pemilih rasional faktor seperti agama, faham, asal usul, nilai tradisional, dan budaya

memang menjadi pertimbangan, tapi tidak menjadi hal yang utama. Pemilih rasional ini cenderung mengedepankan pada kemampuan partai politik peserta dan calon legislatif yang dapat dilihat pada sebagus dan semenarik apa program kerja yang ditawarkan. Program kerja (platform) dilihat dari: kinerja partai dimasa yang lalu ketika partai tersebut berkuasa atau duduk diparlemen serta tawaran program dan janji politik untuk anternatif penyelesaian masalah yang ada.

TABEL 2.4

Tipologi Pemilih Kritis, Krakteristik dan Indikator

Tipologi	krakteristik	Indikator
Pemilih Kritis	• Ikatan ideologis • Pemilih kritis	• Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akn hal-hal yang bersifat ideologis. • Ikatan ideologis membuat loyalis pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah '*rational voter*' untuk berpaling ke partai yang lain. • Pemilih menjadikan nilai ideologi sebagai pijakan kepada partai politik mana meraka akan berpihak. Selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan dan sudah dilakukan.. • Pemilih jenis ini, tertarik dulu kepada program kerja yang ditawarkan sebuah partai politik atau kontestan, kemudian mereka mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. • Pemilih selalu menganalisis kaitan antara system nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. • Jika ada perbedaan nilai ideology

		dengan platform partai , maka mereka memberikan kritik internal, frustasi, dan membuat partai baru yang memiliki kemiripan dengan karakteristik ideology dengan partai lama.

Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat kita lihat pada Pemilih Kritis, artinya pemilih yang selalu menganalisis ideology partai politik atau kandidat dengan kebijakan yang telah dan akan dilakukan, sehingga mereka akan selalu memiliki keinginan memperbaiki kenerja dan kebijakan partai politik dan kandidat. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka mereka kan mengalihkan pilihan politiknya pada partai politik atau kandidat lainnya. Dengan begitu tipologi ini merupakan perpaduan antara orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kandidat dan akan orientasi mereka hal-hal yang bersifat ideologis. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akn hal-hal yang bersifat ideologis. Ikatan ideologis membuat loyalis pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah '*rational voter*' untuk berpaling kepartai yang lain. Pemilih menjadikan nilai ideologi sebagai pijakan kepada partai politik mana meraka akan berpihak. Selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan dan sudah dilakukan. Pemilih jenis ini, tertarik dulu kepada program kerja yang ditawarkan sebuah partai politik atau kontestan, kemudian mereka mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih akan mengaitkan dan menganalisa antara system nilai, ideologi partai dengan kebijakan strategis yang dijalankan. Jika ada perbedaan nilai ideology dengan platform partai , maka mereka memberikan kritik internal, frustasi, dan membuat partai baru yang memiliki kemiripan dengan karakteristik ideologi dengan partai lama.

TABEL 2.5

Tipologi Pemilih Tradisional, Krakteristik dan Indikator

Tipologi	krakteristik	Indikator
Pemilih Tradisional	• Orientasi ideology sangat tinggi • Tidak terlalu melihat kebijakan rtai/kontestan • Social budaya • Nilai • Asal usul • Agama • Tingkat pendidikan dah • Mudah dimobilisasi selama masa kampanye • Loyalitas tinggi.	• Pemilih jenis ini mempunyai orientasi ideology yang sangat tinggi. • Pemilih tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan • Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan social-budaya, nilai, asal usul, paham dan Agama sebagai ukuran dalam memilih partai politik. • Pemilih jenis ini mengutamakan figure dan kepribadian pemimpin, mitos, dan nilai histori sebuah partai politik atau kontestan. • milih jenis ini memiliki pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut. • Pemilih jenis ini yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye. • Pemilih jenis ini memiliki loyal s tinggi. • Apa yang dikatakan oleh seorang pimpinan partai politik adalah kebenaran yang sulit antah. • Pemilih jenis ini memandang ideology sebagai suatu landasan dalam membuat keputusan serta bertindak, serta terkadang kebenarannya tidak bisa diganggu gugat

Berdasarkan tabel 2.5 diatas pada pemilih Tradisional, adalah pemilih yang memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dalam mengambil keputusan politik tidak mempertimbangkan aspek rasional maupun kritis. Prefensi politik mereka didasarkan pada kedekatan social-budaya, nilai asal-usul, faham, dan agama. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanya, loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri yang paling tampak pada pemilih jenis ini. Pemilih jenis ini mempunyai orientasi ideology yang sangat tinggi. Pemilih jenis ini tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan social-budaya, nilai, asal usul, paham dan Agama sebagai ukuran dalam memilih partai politik. Pemilih jenis ini mengutamakan figure dan kepribadian pemimpin, mitos, dan nilai histori sebuah partai politik atau kontestan. Pemilih jenis ini memiliki pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut. Pada pemilih jenis ini yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye, dimana Pemilih tradisional ini memiliki loyalitas tinggi kepda partai politik. Apa yang disampaikan pimipinan partai politik adalah sebuah keyakinan yang diyakini akan kebenarannya dan sulit untuk dibantah. Pemilih jenis ini memandang ideologi sebagai suatu pondasi dalam membuat keputusan politik mereka, serta terkadang kebenarannya tidak bisa diganggu gugat.

TABEL 2.6

Tipologi Pemilih Skeptis, Krakteristik dan Indikator

Tipe	krakteristik	Indikator
Pemilih Skeptis	• Tidak memiliki orientasi ideology cukup tinggi. • Tidak memiliki ikatan emosional dengan partai politik.	• Pemilh jenis ini tidak memiliki orientasi ideology tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan,dan tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. • Keinginan berpartisipasi / atau

		terlibat dengan partai politik untuk jenis pemilih ini sangat kurang karena ikatan ideology mereka sangat rendah sekali. • Mereka juga kurang mempedulikan platform dan kebijakan partai politik atau kontestan. • Golongan putih (golput) didominasi oleh jenis pemilih ini. • Kalaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara biasanya mereka melakukannya secara acak atau ramdom. • Mereka berkeyakinan siapapu, partai apapun atau kontestan apapun yang menang tidak akan membawa bangsa kearah yang lebih baik atau perbaikan menurut harapan mereka.

Berdasarkan tabel 2.6 diatas pada Pemilih Skeptis,dimana ikatan pemilih terhadap partai maupun kandidat sangat rendah, dengan demikian maka prefensi politik mereka sangat kurang, hal ini ditandai dengan sikap apatis pemilih serta tidak memperdulikan ideologi partai maupun program kerja dan kebijakan partai politik maupun kandidat. Pemilh jenis ini tidak memiliki orientasi ideology tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan,dan tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan berpartisipasi / atau terlibat dengan partai politik untuk jenis pemilih ini sangat kurang karena ikatan ideology mereka sangat rendah sekali, mereka juga kurang mempedulikan platform dan kebijakan partai politik atau kontestan. Golongan putih (golput) didominasi oleh jenis pemilih ini, kalaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara biasanya mereka melakukannya secara acak atau ramdom. Mereka berkeyakinan siapapun, partai apapun atau kontestan apapun yang menang tidak akan

membawa bangsa kearah yang lebih baik atau perbaikan menurut harapan mereka.

2.2.3.1 Basis Pemilih

Untuk mempermudah dan memperjelasan batasan terhadap unit analisis dalam penelitian, maka ditetapkanlah basis pemilih atau segmentas pemilih, adapun basis pemih tersebut sebagai berikut:

1. Basis Pemilih keluarga

   Keluarga meruapakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dalam semua institusi. Keluarga m merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang memiliki jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan dan adopsi. Pada akhirnya semua basis pemilih yang ad ditengah masyarakat akan kembali kepada keluarga.

2. Basis Pemilih Pemula

   Basis pemilih pemula merupakan pemilih yang sudah berumur 17-21 tahun atau baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Kecenderungan pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya ketikan pertama kali memilih akan cenderung untuk memilih pad pemilu berikutnya. Pemilih pemula pada umunya mereka yang duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

3. Basis pemilih Perempuan

   Basis pemilih perempuan memiliki peran strategis didalam keluarga, ia sebagai pendidik dan mengasuh anaknya ketika menjadi ibu rumah tangga. Disamping itu juga perempuan dapat memotivasi lingkungan setidaknya kepada komunitas. Perempuan dapat membentuk pola pirik, pola sikap, dan pola tingkah laku anak. Peran perempuan memiliki pengaruh yang dominan didalam keluarga baik secara langsung

atau tidak langsung merupakan struktur terkecil dalam pembentukan struktur sosial politik. Pertimbangan dari segi jumlah pendudukan perempuan lebih banyak dari laki-laki khususnya dikabupaten Bondowoso. Perempuan rentan dimobilisari ketika masa pemilu. Dari segi pendidikan, rata-rata pemilih perempuan memiliki pendidikan lebih rendah dari pemilih laki-laki. Pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran domestic sehingga urusan public sering terabaikan.

4. Basis pemilih Penyandang disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas. Yang dimaksud penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatsan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi denganlingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kecenderunagn basis pemilih disabilitas tidak menggunakan hak pilihnya jika tidak ada kepastian jika yang bersangkutan tidak mempunya informasi yang memadai terkait dengan pemilu.

5. Basis pemilih Berkebutuhan Khusus

Pada basis pemilih berkebutuhan khusus yaitu pemilih yang mencakup masyarakat diwilayah perbatasan atau terpencil, pasien atau petugas rumah sakit, pekerja perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.

6. Basis pemilih Marginal

Pada basis pemilih marginal, dimana mereka tidak mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang cukup mumpuni, diperparah dengan akses informasi yang terbatas dan kepercayaan diri yang cukup. Dalam kehidupan sosial politik mereka cederung kurang memiliki motifasi untuk berpartisipasi dalam pemilu.

7. Basis pemilih Komunitas

Pada basis pemilih komunitas, merupakan kelompok pemilih yang memiliki kepedulian antara atu dengan yang lainnya. Dalam komunitas mereka terdapat hubungan yang kuat antar komunitas, mereka menyakini memiliki kesamaan tujuan. Basis pemilih komunitas secara umum memang jauh dari aktivitas politik, tetapi bukan berarti mereka miskin akan informasi. Tak jarang juga anggota –anggota komunitas membahas isu-isu politik. Pada dasarnya angggota komunitas, pada sisi pendidikan dan finansial sudah mapan, sehingga memiliki kemandirian. Satu atau dua orang yang berpengaruh dalam komunitas akan mampu mengajak atau mengarahkannya anggota yang lain.

8. Basis pemilih Keagamaan

Pada basis pemilih Keagamaan pada umumnya diorientasikan pada tokoh-tokoh agama dan anggota atau jamaahnya. Dalam kehidupan sosial, kelompok ini tidak hanya membahas tentang agama saja, tetapi orientasi pembahasan mereka terkait isu-isu politik. Peran tokoh agama sangat signifikan dlam memberikan arahan, petuah dan petunjuk kepada pada anggota atau jamaahnya termasuk dalam pilihan politiknya.

9. Basis pemilih Keagamaan

Meningkatnya akses informasi para pengguna internet terus bertambah setiah tahunnya. Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII) tahun 2016, pengguna internet diindonesi sudah mencapai 132,7 juta. Dari jumlah itu, sebanyak 70% menggunakan perangkat gerak atau mobile gadget. Aktivitas dan akses informasi melalui internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pada basis pemilih warga internet saling tukar informasi terkait isu-isu politik sudah rumlah dilakukan. Oleh karenanya keberadaan basis pemilih warga

internet ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pilihan politik pada penyelenggaraan pemilu.

2.3. Kerangka Berfikir

GAMBAR 2.3

Kerangka Berfikir

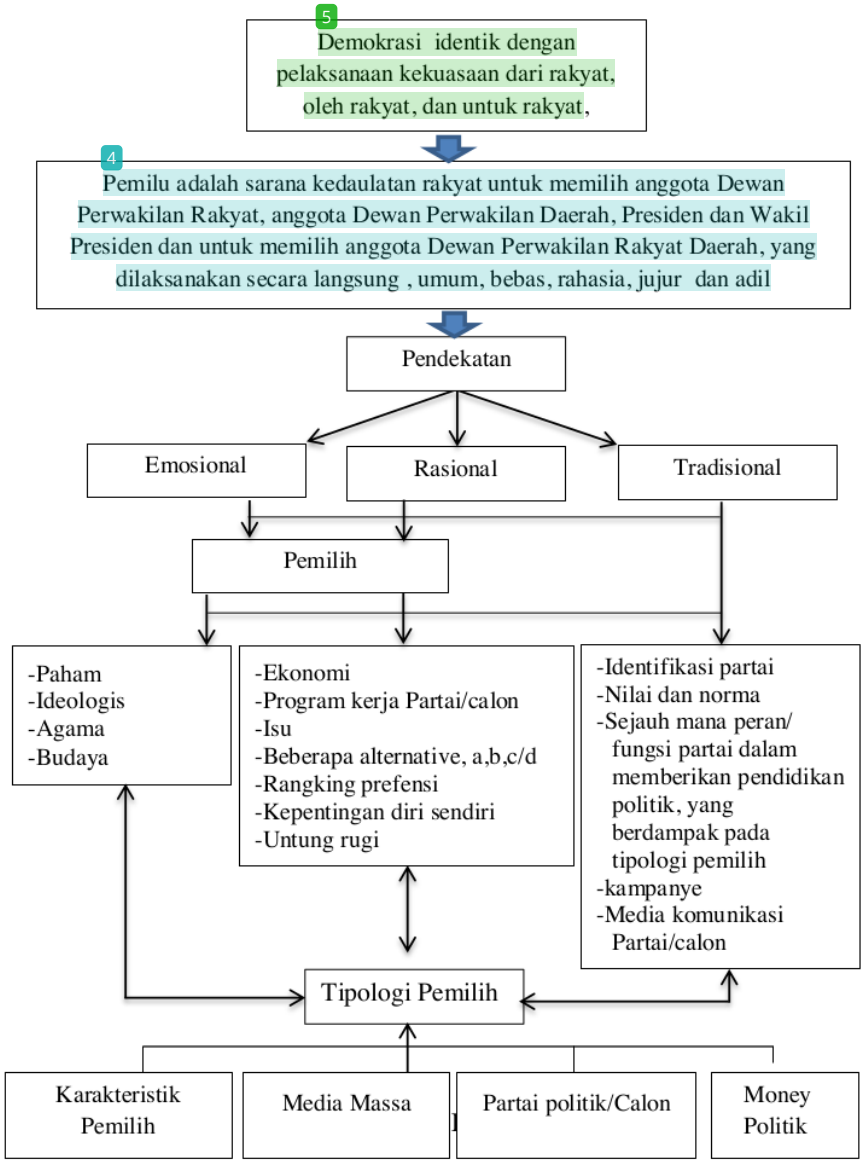

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif, dengan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data secara intensif dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya dalam hal ini mengenai tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif (*descriptive research*), menurut Saiful Azwar (2004) yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih muda untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat di kembalikan langsung pada data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 dikabupaten Bondowoso.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso, Peneliti mengambil lokasi penelitian yang tersebar di 23 Kecamatan dan atau di 209 Desa.

3.3 Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup signifikan, peneliti sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya dia dapat melakukan peran semua itu secara maksimal dan tidak mendapat hambatan.

3.4 Subyek penelitian

Subyek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah pemilih yang ada di Kabupaten Bondowoso. Yang di bagi berdasarkan sekmentasi pemilih sebagaimana berikut:

1) Basis Pemilih keluarga.

2) Basis pemilih pemula

3) Basis pemilih perempuan

4) Basis pemilih disabilitas

5) Basis pemilih marginal

6) Basis pemilih komunitas

7) Basis pemilih keagamaan

8) Basis pemilih berkebutuhan khusus

9) Basis pemilih warga internet

3.5 Sumber Data

Dalam suatu penelitian alat pengambilan data menentukan kualitas data yang dapat di kumpulkan dan kualitas data itu menentukan kualitas penelitiannya. Menurut Sutopo (2004) dalam bukunya menjelaskan bahwa pemahaman mengenai berbagai sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh 2 data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data. Hal tersebut dapat berupa wawancara (*Interview*), Data primer yang di dapat dari sumber pertama adalah pemilih di Kabupaten bondowoso yang terdiri dari 9 (Sembilan) segmentasi.

Adapun sumber data primer yang akan peneliti gunakan adalah :

1) Basis Pemilih keluarga.

2) Basis pemilih pemula

3) Basis pemilih perempuan

4) Basis pemilih disabilitas

5) Basis pemilih marginal

6) Basis pemilih komunitas

7) Basis pemilih keagamaan

8) Basis pemilih berkebutuhan khusus

9) Basis pemilih warga internet

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data ini diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat, atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data dokumentasi dilakukan sebagai data penguat penelitian pada tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019.

Sumber data primer yang nantinya diperoleh dari hasil wawancara dengan para pemilih. Sumber sekunder diambil dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Stakeholder terkait. Selanjutnya bahan dari data tertier yaitu dari buku-buku petunjuk yang mendukung.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Sugiyono (2015) metode pengumpulan data dengan cara dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh sebuah informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan dengan pemilih pada pemilu 2019, dan pihak-pihak terkait yang meliputi:

1) Pemilih basis keluarga.

2) Basis pemilih pemula

3) Basis pemilih perempuan

4) Basis pemilih disabilitas

5) Basis pemilih marginal

6) Basis pemilih komunitas

7) Basis pemilih keagamaan

8) Basis pemilih berkebutuhan khusus

9) Basis pemilih warga internet

10) Penyelenggara Pemilu

11) Peserta Pemilu

12) stakeholder terkait

b. Dokumentasi

Menurut Dja'man Satori (2014) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini yang dimaksud dokumentasi Yaitu mencari data yang berupa:

1) Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

2) Sertifikat rekapitulasi Hasil pemilu serentak 2019 diKabupaten Bondowoso

Penulis menggunakan metode ini karena lebih mudah, dalam arti apabila sumber datanya ada yang keliru, bukan kesalahan dari penulis.

3.7 Analisis Data

Menurut Dja'man Satori (2014) , analisis merupakan suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau focus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/ tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih mengerti duduk perkaranya. Penggunaan teknik analisa data dalam suatu penelitian sangat tergantung pada tujuan dan pendekatan penelitian. Sesuai dengan tujuan dan pendekatan penelitian yang telah ditetapkan, maka teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisa deskriptif yang bertujuan:

(a) Untuk Mengetahui tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso.

(b) Faktor-faktor yang mempengaruhi tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten bondowoso.

Adapun model yang dipakai dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisa data yaitu: data reduksi, data display, dan conclusion drawing/verification. Menurut Sugiyono (2014) langkah-langkah analisa ditunjukkan pada gambar berikut:

GAMBAR 3.1

komponen Dalam Analisis Data (*Flow Model*) Miles dan Huberman

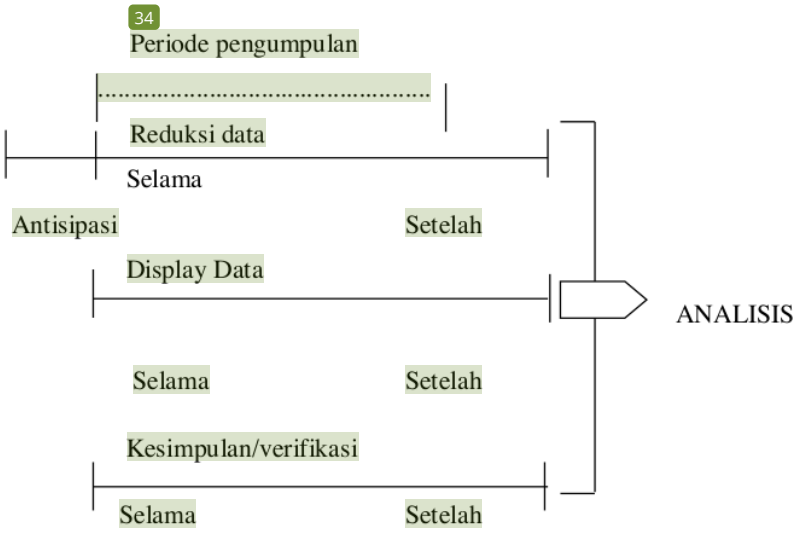

Berdasar gambar 3.1 tersebut terlihat bahwa, setelah penelitian dilakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan anticipatory sebelum melakukan reduksi data. *Anticipatory data reduction is accurring as the research decides (often without full awareness) which conceptual frame work, which sites, which researvh question, which data collection*

approach to choose. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkkan pada gambar berikut:

GAMBAR 3.2

Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

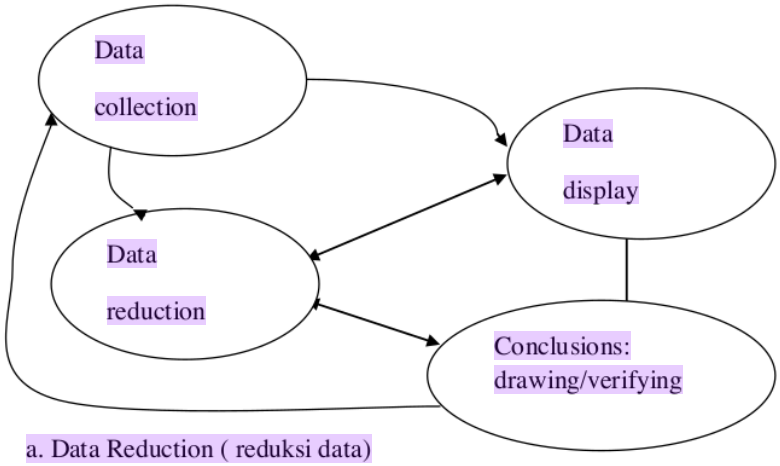

a. Data Reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat*, dan sejenisnya.Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing / verification

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

3.8 Keabsahan Data

Pada penelitian ini akan dilakukan pengecekan keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil.

3.9 Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan adalah

Jenis Kegiatan	BULAN					
	1	2	3	4	5	6
Penyusunan dan persetujuan proposal/ desain penelitian						
Pengurusan izin penelitian						
Perumusan dan penyempurnaan kisi-kisi dan instrumen penelitian						
Studi pendahuluan untuk menentukan lokasi penelitian						
Pengumpulan data dilapangan						
Pengolahan dan analisis data						
Penyusunan laporan						
Pengandaan laporan						
Publikasi hasil penelitian melalui seminar (Jurusan/ Fakultas/ Universitas)						

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1 Deskripsi lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Bondowoso berada di wilayah bagian Timur Propinsi Jawa Timur pada jarak sekitar 200 km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur, Surabaya. Kabupaten Bondowoso terletak pada posisi 7"50'10" sampai 7"56'41" Lintang Selatan dan 113"48'10" sampai 113"48'26" Bujur Timur. wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki luas sekitar 1.560,10 Km2 atau sekitar 3,26 persen dari total luas Jawa Timur yang dibagi menjadi 23 Kecamatan, 209 Desa dan 10 kelurahan. Wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 wilayah kecamatan, 209 desa dan 10 kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2019 luas wilayah administrasi masing-masing kecamatan, yaitu: Tamanan (28,151 km2), Grujugan (74,443 km2), Maesan (56,083 km2), Jambesari Darusholah (30,1054 km2), Tlogosari (110,917 km2), Pujer (39,889 km2), Wonosari (42,277 km2), Sukosari (23,173 km2), Tapen (57,042 km2), Sumber wringin (137,947 km2), Tenggarang (25,795 km2), Curahdami (50,286 km2), Bondowoso (23,158 km2), Pakem (92,082 km2), Wringin (58,010 km2), Binakal 39,039 km2), Taman Krocok (53,00 km2), Tegal ampel (37,028 km2), Klabang (91,204 km2), Prajekan (56,64 km2), Botolinggo (127,414 km2), Ijen (207,20 km2), serta Kecamatan Cerme (129,204 km2).

Kabupaten Bondowoso berada pada Ketinggian dari permukaan laut rata-rata mencapai ± 253 meter diatas permukaan laut. Wilayah tertinggi ± 3.287 meter dan terendah ± 73 meter. Kondisi dataran di Kab. Bondowoso terdiri dari pegunungan dan perbukitan seluas 44,4%, dataran tinggi 24,9 % dan dataran rendah 30,7 % dari luas wilayah secara keseluruhan. Wilayah Kabupaten Bondowoso di

bagian Timur merupakan lereng pegunungan Ijen dan di sebelah barat adalah lereng pegunungan Argopuro. Wilayah Bondowoso dialiri oleh 3 sungai yang cukup panjang yaitu : Sungai Deluang (30 km), sungai Sampeyan Baru (61 km) dan sungai Mrawan (32 km). Keberadaan ketiga sungai tersebut mampu dimanfaatkan sebagai sumber pengairan bagi sebagian besar petani di Kabupaten Bondowoso.

Untuk Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota kecamatan diKabupaten Bondowoso dapat dijelakskan sebagaimana berikut: (1) Bondowoso - Maesan: 13 km, (2) Bondowoso - Grujugan : 7 km, (3) Bondowoso - Pujer : 10 km, (4) Bondowoso - Tamanan : 15 km, (5) Bondowoso -Jambesari DS: 12 km, (6) Bondowoso - Sukosari : 22 km, (7) Bondowoso - Tlogosari : 17 km, (8) Bondowoso - Sbr.Wringin : 27 km, (9) Bondowoso - Tapen : 16 km, (10) Bondowoso - Wonosari : 10 km, (11) Bondowoso - Tenggarang : 2 km, (12) .Bondowoso-Bondowoso: 1,2 km, (13) Bondowoso - Pakem : 18 km, (14) Bondowoso - Binakal : 7 km, (15) Bondowoso - Curahdami : 3 km, (16) Bondowoso - Wringin : 16 km, (17) Bondowoso - Tegalampel : 2 km, (18) Bondowoso - Tm.krocok:12 km, (19) Bondowoso - Ijen: 74 km, (20) Bondowoso - Klabang: 19 km, (21) Bondowoso - Cermee: 32 km., (22) Bondowoso - Prajekan: 24 km, (23) Bondowoso - Botolinggo: 25 km

GAMBAR 4.1

Peta Administrasi Kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Bondowoso dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Awalnya terbagi menjadi 17 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 182 desa. Setelah adanya pemekaran perkembangan wilayah sejak Tahun 2007 Kabupaten Bondowoso terbagi atas 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa. Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 45 orang, dengan 40 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, berasal dari 8 partai politik hasil pemilu legislatif tahun 2019. Latar belakang pendidikan anggota DPRD Kabupaten Bondowoso bervariasi akan tetapi mayoritas adalah lulusan sarjana strata 1 (21 orang), sarjana strata 2 (6 orang) dan 18 lainnya masih berpendidikan SMA. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kabupaten Bondowoso dibentuk 4 komisi yang masing-masing beranggotakan 10 orang. Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Bondowoso, 59,91 persen berpendidikan Sarjana atau sebanyak 4.703

orang, kemudian berpendidikan Diploma I/II/III sebanyak 11,45 persen atau 899 orang, untuk SMA 25,09 persen atau 1.970 orang, SMP 208 orang atau 2,65 persen sedangkan yang masih berada pada tingkat SD hanya 0,90 persen atau 71 orang. Jumlah pegawai yang purna tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Bondowoso selama kurun waktu tahun 2020 sebanyak 408 pegawai.

4.2 Deskripsi Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso

GAMBAR 4.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso

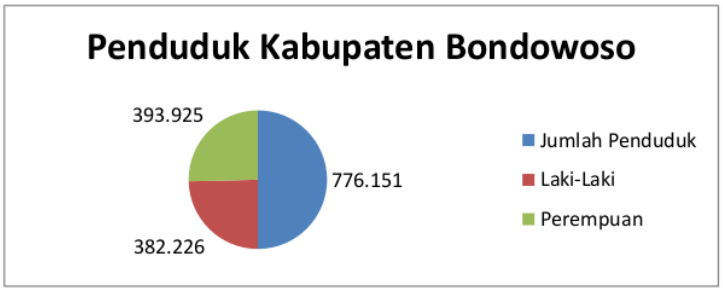

Penduduk Kabupaten Bondowoso berdasarkan Hasil pendataan pada Umur dari Data Administratif dan SP2020 (September) sebanyak 776.151 orang yang terdiri atas 382.226 orang penduduk laki-laki dan 393.925 orang penduduk perempuan. Dibandingkan dengan Sensus Penduduk tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk Bondowoso mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0,52 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 97,0 yang artinya diantara 100 perempuan terdapat 97 orang laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bondowoso tahun 2020 mencapai 498 jiwa/km2 . Kepadatan penduduk di 23 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Bondowoso dengan sebesar 3.300 Jiwa/km2 dan terendah dikecamatan ijen 57 jiwa/km2 Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur,

Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi X menduduki komposisi penduduk terbesar di Bondowoso. Generasi Milenial (usia 24-39 tahun) sebesar 23,54 persen, Generasi Z (usia 8-23 tahun) sebesar 22,88 persen dan Generasi X (usia 40-55 tahun) sebesar 22,74 persen.

4.3 Deskripsi Jumlah Pemilih

TABEL 4.1

Jumlah Pemilih Pemilu 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Lali-laki	Perempuan	Jumlah
1	Binakal	6,529	7,080	13,609
2	Bondowoso	26,575	28,955	55,530
3	Botolinggo	11,427	12,256	23,683
4	Cermee	16,908	18,699	35,607
5	Curahdami	12,060	13,135	25,195
6	Grujugan	13,730	14,462	28,192
7	Jambesari Darusholah	12,780	13,393	26,173
8	Klabang	7,083	7,835	14,918
9	Maesan	18,063	19,053	37,116
10	Pakem	9,285	9,971	19,256
11	Prajekan	9,725	10,663	20,388
12	Pujer	15,197	16,721	31,918
13	Ijen	4,387	4,445	8,832
14	Sukosari	5,861	6,372	12,233
15	Sumber Wringin	13,067	14,085	27,152
16	Taman Krocok	6,330	6,942	13,272
17	Tamanan	14,208	15,085	29,293
18	Tapen	12,880	14,370	27,250
19	Tegalampel	9,620	10,198	19,818
20	Tenggarang	15,458	16,549	32,007
21	Tlogosari	17,088	18,248	35,336
22	Wonosari	14,659	16,088	30,747
23	Wringin	15,132	16,360	31,492
	Total	288,052	310,965	599,017

Sumber Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan Tabel 4.1 Jumlah Pemilih Pemilu 2019 yang didasarkan pada Jenis Kelamin, untuk kecamatan Binakal pemilih laki-laki

berjumlah (6,529) dan pemilih perempuan (7,080), Total (13,609). Kecamatan Bondowoso, pemilih laki-laki berjumlah (26,575) dan pemilih perempuan (28,955), Total (55,530). Kecamatan Botolinggo, pemilih laki-laki berjumlah (11,427) dan pemilih perempuan (12,256), Total (23,683). Kecamatan Cermee, pemilih laki-laki berjumlah (16,908) dan pemilih perempuan (18,699), Total (35,607). Kecamatan Curahdami, pemilih laki-laki berjumlah (12,060) dan pemilih perempuan (13,135), Total (25,195). Kecamatan Grujugan, pemilih laki-laki berjumlah (13,730) dan pemilih perempuan (14,462), Total (28,192). Kecamatan Jambesari Darusholah, pemilih laki-laki berjumlah (12,780) dan pemilih perempuan (13,393), Total (26,173). Kecamatan Klabang, pemilih laki-laki berjumlah (7,083) dan pemilih perempuan (7,835), Total (14,918). Kecamatan Maesan, pemilih laki-laki berjumlah (18,063) dan pemilih perempuan (19,053), Total (37,116). Kecamatan Pakem, pemilih laki-laki berjumlah (9,285) dan pemilih perempuan (9,971), Total (19,256). Kecamatan Prajekan, pemilih laki-laki berjumlah (9,725) dan pemilih perempuan (10,663), Total (20,388). Kecamatan Pujer, pemilih laki-laki berjumlah (15,197) dan pemilih perempuan (16,721), Total (31,918). Kecamatan Ijen, pemilih laki-laki berjumlah (4,387) dan pemilih perempuan (4,445), Total (8,832). Kecamatan Sukosari, pemilih laki-laki berjumlah (5,861) dan pemilih perempuan (6,372), Total (12,233). Kecamatan Sumber Wringin, jumlah pemilih laki-laki (13,067) dan pemilih perempuan (14,085), Total (27,152). Kecamatan Taman Krocok, pemilih laki-laki berjumlah (6,330) dan pemilih perempuan (6,942), Total (13,272). Kecamatan Tamanan, pemilih laki-laki berjumlah (14,208) dan pemilih perempuan (15,085), Total (29,293). Kecamatan Tapen, pemilih laki-laki berjumlah (12,880) dan pemilih perempuan (14,370), Total (27,250). Kecamatan Tegalampel, pemilih laki-laki berjumlah (9,620) dan pemilih perempuan (10,198), Total (19,818). Kecamatan Tenggarang, pemilih laki-laki berjumlah (15,458) dan pemilih perempuan (16,549), Total (32,007). Kecamatan Tlogosari, pemilih laki-laki berjumlah (17,088) dan perempuan (18,248), Total (35,336). Kecamatan

Wonosari, pemilih laki-laki berjumlah (14,659) dan pemilih perempuan (16,088), Total (30,747). Kecamatan Wringin, jumlah pemilih laki-laki (15,132) dan perempuan (16,360), Total (31,492). Sehingga keseluruhan data pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bondowoso adalah jumlah pemilih laki-laki keseluruhan berjumlah (288,052) dan Perempuan keseluruhan berjumlah (310,965), Total (599,017).

4.4 Deskripsi Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Berikut adalah perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten bondowoso, adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4.2

Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2019

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	137.972
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	41.796
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	79.401
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	51.564
5	Partai Nasdem	11.607
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.376
7	Partai Berkarya	6.358
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	34.186
9	Partai Persatuan Indonesia	4.590
10	(PPP) Partai Persatuan Pembangunan	61.019
11	(PSI) Partai Solidaritas Indonesia	1.376

12	(PAN) Partai Amanat Nasional	19.170
13	(HANURA) Partai Hati Nurani Rakyat	878
14	Partai Demokrat	18.755
15	(PBB) Partai Bulan Bintang	2.475
16	(PKPI) Partai Keadilan dan Persatuan lndonesia	771
Total Suara Sah Seluruh Parpol		473.294

Sumber Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat perolehan Perolehan Suara Partai Politik Peseta Pemilu 2019. Partai Kebangkitan Bangsa , mendapatkan suara 137.972 atau 29%. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), mendapatkan suara 41.796 atau 8%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendapatkan suara 79.401 atau 16,7%. Partai Golongan Karya (Golkar), mendapatkan suara 51.564 atau 10,8%. Partai Nasdem, mendapatkan suara 11.607 atau 2,4%. Partai Gerakan Perubahan Indonesia, mendapatkan suara 1.376 atau 0,2%. Partai Berkarya, mendapatkan suara 6.358 atau 1,3%. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan suara 34.186 atau 7,2%. Partai Persatuan Indonesia, mendapatkan suara 4.590 atau 0,9% . Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendapatkan suara 61.019 atau 12,8%. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mendapatkan suara 1.376 atau 0,2%. Partai Amanat Nasional (PAN), mendapatkan suara 19.170 atau 4%. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), mendapatkan suara 878 atau 0,1%. Partai Demokrat, mendapatkan suara 18.755% atau 3,9 %. Partai Bulan Bintang (PBB), mendapatkan suara 2.475 atau 0,5%. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), mendapatkan suara 771 atau 0,1%.

4.5 Deskripsi Jumlah Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Berikut adalah perolehan kursi partai politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten bondowoso, adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4.3

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu 2019

No	Partai Politik	Perolehan Kursi
1	Partai Kebangktan Bangsa (PKB)	14
2	tai Indonesia Perjuangan (PDI-P)	7
3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5
5	(Golkar) Partai Golongan karya	6
6	ai Demokrat	2
7	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	1
	Jumlah	45

Sumber Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat perolehan kursi partai politik peserta pemilu 2019 di Kabupaten Bondowoso. Partai Kebangktan Bangsa (PKB) mendapatkan 14 kursi atau 31%. Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendapatkan 7 kursi atau 15%. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan 6 kursi atau 13%. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 5 kursi atau 11%. Partai Golongan karya (Golkar) mendapatkan 5 kursi atau 11%. Partai Demokrat mendapatkan 2 kursi atau 4%. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendapatkan 4 kusi atau 8%. Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 1 kursi atau 2 %. Adapun Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Partai dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.4

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai dan Jenis kelamin di Kabupaten Bondowoso

No	Partai Politik	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Kebangktan Bangsa (PKB)	12	2	14
2	Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P)	6	1	7
3	(PPP) Partai Persatuan Pembangunan	5	1	6
4	(PKS) Partai Keadilan Sejahtera	5	-	5
5	(Golkar) Partai Golongan karya	5	1	6
6	rtai Demokrat	2	-	2
7	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4	-	4
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	-	1
	Jumlah	40	5	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso

Berdasrakan tabel 4.1 dapat kita lihat jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin: Parta Partai Kebangktan Bangsa (PKB) Laki-laki (12 orang), dan Perempuan (2 Orang). Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) Laki-laki (6 orang), dan Perempuan (1 Orang). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Laki-laki (5 orang), dan Perempuan (1 Orang). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Laki-laki (5 orang), dan Perempuan (- Orang). Partai Golongan karya (Golkar) Laki-laki (5 orang), dan Perempuan (1Orang). Partai Demokrat Laki-laki (2 orang), dan Perempuan (-Orang). Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Demokrat Laki-laki (4 orang), dan Perempuan (-Orang). Partai Amanat Nasional (PAN) Laki-laki (1 orang), dan Perempuan (-Orang). Berdasarkan data ini, secara keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Bondowoso ber jenis kelamin laki-laki 40 orang dan perempuan 5 orang, sehingga anggota DPRD Kabupaten Bondowoso masih didominasi laki dengan 88,8 % dan Perempuan 11%. Adapun jumlah Anggota DPRD menurut partai politik dan tingkat pendidikan adalah sebagaimana berikut:

TABEL 4.5

Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Tingkat Pendidikan

Partai Politik	Tingkat Pendidikan					
	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2
Partai Kebangktan Bangsa (PKB)	-	-	6	-	6	2
Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P)	-	-	2	-	4	1
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	2	-	2	2
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	-	2	-	3	-
Partai Golongan karya (Golkar)	-	-	1	-	2	1
Partai Demokrat	-	-	-	-	2	-
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	-	-	1	-	2	1
Partai Amanat Nasional (PAN)	-	-	1	-	-	-
Jumlah			18		21	6

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Tingkat Pendidikan, Partai Kebangktan Bangsa (PKB) terdiri dari SD (-), SMP (-), SMA (6), DIII (-), S1 (6), S2 (2). Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) terdiri dari SD (-), SMP (-), SMA (2), DIII (-), S1 (4), S2 (1). Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terdiri dari SD (-), SMP (-), SMA (2), DIII (-), S1 (2), S2 (2). Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terdiri dari SD (-), SMP (-), SMA (2), DIII (-), S1 (3), S2 (-). Partai Golongan karya (Golkar),), terdiri dari SD (-), SMP (-), SMA (1), DIII (-), S1 (4), S2 (1). Partai Demokrat, terdiri dari SD (-), SMP (-), SMA (-), DIII (-), S1 (2), S2 (-).Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), terdiri dari SD (-), SMP (-), SMA (1), DIII (-), S1 (2), S2 (1). Partai Amanat Nasional (PAN), terdiri dari SD (-), SMP (-), SMA (1), DIII (-), S1 (-), S2 (-). Berdasarkan data ini dapat kita lihat secara keseluruhan Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Tingkat Pendidikan terdiri dari SD (- orang), SMP (-orang), SMA (18 orang atau 40%), DIII (-), S1 (21 orang atau 46%), S2 (6 orang atau 13%).

BAB V

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Tipologi Pemilih Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso.

Pelaksanaan demokrasi dapat dilihat melalui penggunaan hak pilih universal dalam pemilu, dimana setiap warga negara yang memenuhi persyaratan berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada Tahun 2019 rakyat Indonesia merayakan 2 pesta demokrasi sekaligus yaitu pemilihan Legislatif (anggota DPR RI, DPDRI, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota, Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sehingga kita menyebut pada tahun tersebut sebagai tahun politik rakyat Indonesia.Tak terkecuali juga di Kabupaten Bondowoso yang dilaksnakan pertama kalinya pada 17 April 2019 . Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak dan untuk memilih wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.

Dalam pemilu kita sering melihat kenapa ada orang melakukan tindakan politik sementara yang lain tidak, kenapa orang memilih partai PDIP, kenapa bukan Golkar, PKB, PPP, PAN, PKS, PBB, atau bahkan memilih PKB, kenapa bukan PDIP, PPP, PKS, atau Golkar? Kenapa orang memilih partai politik cenderung konsisten dari Pemilu ke Pemilu, sedangkan yang lain berubah- ubah? kenapa dalam masyarakat tertentu memiliki cenderung punya pilihan politik yang hampir sama atau bahkan berbeda? apa Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang menentukan pilihan dalam suatu penyelenggaraan pemilu? Begitu banyak pertanyaan senada akan muncul apabila kita menganalisis tipologi pemilih dalam Pemilu. Bukan hanya bagi ilmuwan politik Pertanyaan-pertanyaan ini

menarik, masyarakat awam, apalagi menarik bagi politisi. Yang menjadi persoalannya disini, apakah ada teori yang relatif "mapan" yang dapat pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Apakah ada teori yang relatif "baku" yang mampu mengungkap fenomena tipologi pemilih di hampir semua negara yang menerapkan sistem pemilihan umum dengan pemilihan langsung?

Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui apa tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso. Tipologi merupakan karakteristik yang unik serta spesifik yang melekat pada orang-orang tertentu yang membedakannya dengan orang lain. Berikut ada beberapa tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso.

1. Tipologi Pemilih Pe'nte'r

Tipologi pemilih pe'nte'r (pintar atau cerdas) merupakan jenis pemilih yang tidak begitu mementingkan rasa fanatisme pada partai politik tertentu maupun calon, Pada pemilih pe'nte'r kecenderungan mereka akan melihat apa yang telah dilakukan oleh partai politik atau seorang kandidat sebelumnya dengan hitungan untung rugi. seperti yang menjadi temuan dalam penelitian sebagaimana hasil wawancara dengan Dhafir dari basis pemilih keluarga yang terlihat pada kutipan wawancara berikut ini:

> "kule nyoblos e' pemilu 2019 ben me'le' PPP. Kule tak madeng napah se' melatar belakangi partai politik, atabe deri segi partai Islam atabe bunten partai Islam. Kule lebi mapentengagi ponapah se' ampon ekalakoh partai, kapadulien partai e'delem menyelesaikan persoalan pembangunan misalah pembanguna jelen disah se' rosak, pangentasan kamiskinan karena gi' benya' masyarakat e' disa kaentoh se' miskin."
>
> Arttinya:
>
> "Saya ikut memilih pada pemilu 2019 dan memilih partai PPP. Saya tidak melihat apa yang melatar belakangi partai politik,

> baik itu partai Islam atau bukan, saya lebih mementingkan apa yang dilakukan partai seperti bagaimana kepedulian partai dalam penyelesaian masalah pembangunan misalkan pembangunan jalan desa yang rusak, pengentasan kemiskinan karena banyak masyarakat didesa kami masih miskin."

Pada pemilih pe'nte'r ini, diman pemilih tidak terlalu fanatik terhadap suatu partai tertentu, pemilih jenis ini lebih memntingkan pada tawaran program partai politik ketika pelaksaan kampanye, sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Achmad Ilham Wahyudi selaku basis pemilih pemula, bagaimana kutipan wawancara berikut:

> " Kaule ta' fanatik ka partai PKB, PPP, PDI otabeh partai se lain, Kaule lebbi mentengagih nah se' e'pataber delem program kerjanah partai kaesa' e be'toh kampanye. Ponapah pole' kauleh gi' buru nuro' pame'le'an, sae'nggeh jek sampe' sala me'le partai."
>
> Artinya:
>
> "Saya tidak fanatik kepada partai, baik partai PKB, PPP, PDI atau partai yang lain, saya lebih mementingkan apa tawaran program kerja partai tersebut pada waktu kampanye. Apa lagi saya masih baru ikut pemilihan, jadi jangan sampai saya salah memilih partai. "

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dhafir dari pemilih basis keluarga, ia tidak melihat latar belakng dari partai, apakah berideologi islam atau yang lain, pilihan politiknya pada partai politik didasarkan pada sejauhmana partai politik memiliki kepedulian terhadap penyelesain persamasalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Achmad Ilham Wahyudi selaku pemilih basis pemula, dimana ia tidak fanatik terhadap partai politik tertentu, dia lebih menekankan pada tawaran partai politik atau kontestan pada waktu kampaye. Pada pemilih pe'nte'r ini , selain tidak mementingkan fanatisme kepada partai politik dan lebih mementingkankan alterlatif tawaran program kerja yang akan dilakukan jika partai atau calon terpilih

nantinya untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, pemilih jenis ini lebih memperioritaskan pada pencermatan terhadap apa yang sudah dilakukan (track record) atau jejak partai politik pada periode belumnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Abror pemilih basis warga internet, ia mengungkapkan:

> "Pasti saya memilih partai politik yang memiliki track record yang baik, memiliki perhatian dan kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dikabuapaten Bondowowoso. Sekarang gampang untuk melihat rekam jejaknya partai politik tau kontestan. Diinternet sudah sangat memadai untuk kita mencari informasi-informasi terkait peranan partai pilitik atau kontestan yang terpilih pada masa pemilu sebelumnya. Apa yang ia lakukan? Apakah hanya diam saja ketika ada persoalan ataukah ia betul-betul mengambil peran terdepan dalam menyelesaikan persoalan tersebut."

Hasil wawancara dengan Abror sangat jelas sekali bahwa tipologi pemilih penter lebih berorientasi pada track record atau rekap jejak partai politik atau anggota DPRD yang sudah terpilih pada pelaksanaan pemilu sebelumnya. Senada dengan yang disampaikan oleh Nuraini dari basis pemilih perempuan, ia mengungkapkan:

> "E'pemilu 2019 kule me'le' partai se' endi' kaperdulian de'ka penyelesain masalah ompamanah masalanah oreng bini'(kakaresan e delem Romah tangga) . Pemberdayaan oreng bini'. Kule mandeng partai tak deri asal usulah partai, agemah memang deddhi pertimbangan, tape'h mempengaruhu pe'lean kule sae'nggeh kuleh ngabes ka se perdulih beih."
>
> Artinya:
>
> "Pada pemilu tahun 2019 saya memilih partai yang memiliki kepedulian terhadap penyelesain permasalahan seperti penyelesain permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan seperti KDRT, pemberdayaan perempuan. Ia saya juga melihat partai politik tidak berdasrakan asal-usulnya, agama memang jadi pertimbangan, cuman tidak begitu mempengaruhi pilihan saya, sehingga saya lebih melihat pada kepeduliannya partai tersebut."

Sebagai mana hasil wawancara dengan Abror dan Nuraini, dapat kita lihat bahwa dasar yang dijadikan pertimbangan dalam memilih partai politik atau calon adalah berdasarkan rekam jejak parati politik dimasa lampau, apa yang sudah dilakukan selama partai tersebut berkuasa/ anggota legislative tersebut. Pemilih pe'nte'r memiliki orientasi tinggi pada sejauhmana atas tawaran solusi penyelesaian masalah dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pada pemilih pe'nte'r faktor seperti asal usul, faham, nilai , agama, tradisional, budaya dan psikografis memang dipertimbangkan, tapi bukan hal yang signifikan. Pemilih pe'nte'r ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon dalam program kerjanya yang akan dilakukan dalam 5 tahun yang akan datang. Program kerja (platform) dilihat dari: kinerja partai dimasa lalu serta janji program untuk menyelesaikan masalah yang ada. Partai politik yang memiliki rekam jejak yang bagus memiliki peluang untuk dipilih kembali, sementara partai politik yang rekam jejaknya kurang bagus memiliki kecenderungan untuk tidak dipilih pada pemilu yang akan datang.

2. Tipologi Pemilih Fokal

Tipologi pemilih Fokal merupakan pemilih yang senantiasa kritis dalam mencermati terkait dengan ideologi partai politik atau calon dengan kebijakan partai yang sudah dilaksanakan dan yang akan dialakukan untuk 5 tahun yang akan datang, sehingga mereka akan selalu memiliki keinginan memperbaiki kenerja dan kebijakan partai politik dan kandidat. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Wahyudi dari basis pemilih keagamaan, Ia mengungkapkan:

> " Kauleh edelem menentukan pe'le'an kapartai e' pemilu 2019 e'desaragi ka iologinah partai ben calona. E'samping ka'essa' nah se deddhi kebijakanna partai ben karepah e delem memperbaiki arah kebijakan partai e delem penyelesaian persoalan e daerah. Kauleh ta' segan-segan aberrri' saran ka

> pangurus partai se bede. Jika kebijakan ta' berpihak ka rakyat kene'."
>
> Artinya:
>
> "Saya dalam menetukan kepada partai apa yang saya pilih pada pemilu 2019 saya dasarkan pada ideology partai atau dan siapa calonnya. Disamping itu juga seperti apa kebijakan partai politik dan keinginan dalam memperbaiki kerja partai dalam menyelesaikan permasalah didaerah. Saya tidak akan segan-segan mengkritik dan memberikan saran kepada pengurus partai yang ada, jika kebijakannya tidak memihak pada rakyat kecil."

Dari hasil wawancara dengan Wahyudi sangat jelas bahwa ia dalam menentukan pilihannya dengan menganalisis ideologi dari partai tersebut dan kebijakan partai politik dan calonnya akan permasalahan yang dihadapi. Pada pemilih jenis ini, pemilih tidak akan segan-segan untuk memberikan kritik atau masukan kepada paratai atau calon, jika kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Slamet dari basis pemilih komunitas yang mengungkapkan:

> "Se kule kalakoh se belum mele partai otabeh calon, kule pahami kade' nilai se' e'anut partai kaessa' ben nah se deddhi parogram kerja se' e pataber, ponapah sami kalaben nilai ideeolgi se e'anut. Saterrosah manabi bedeh perbedaan kalaben nilai partai gi kauleh aberri' masukan ben kriti'. Manabi tak epeduliagi otabe ta' sesuai gi ta' ke'ra e'pe'le pole' e'pemilu se'detenga."
>
> Artinya:
>
> "Yang saya lakukan sebelum saya memilih partai atau calon, saya memahami apa nilai yang dianut oleh partai tersebut, dan apa program kerja yang ditawarkan apakah sama dengan nilai ideology yang anutnya. Kemudian apabila ada perbedaan dengan nilai partai itu maka saya akan memberikan masukan dan kritik. Apabila juga tidak dindahkan atau tidak sesuai maka saya tidak akan memilih partai itu lagi pada pemilu yang akan dating."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudi dan Slamet tersebut dapat kita lihat, dalam menentukan pilihannya dengan

menganalisis ideology dari partai tersebut dan kebijakan partai politik dan calonnya akan permasalahan yang dihadapi. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka mereka kan mengalihkan pilihan politiknya pada partai politik atau kandidat lainnya. Dengan begitu tipologi ini merupakan perpaduan antara orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kandidat dan akan orientasi mereka hal-hal yang bersifat ideologis. Ikatan dan kedekatan ideologis membuat para pemilih loyalis terhadap sebuah partai atau seorang calon sangat kuat dan tidak semudah *"pemilih pe'nte'r"* untuk berpaling kepartai yang lain. Pemilih menjadikan nilai ideologi sebagai pijakan kepada partai politik mana meraka akan berpihak. Selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan dan sudah dilakukan. Pemilih jenis ini, tertarik dulu kepada program kerja yang ditawarkan sebuah partai politik atau kontestan, kemudian mereka mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih fokal selalu akan menganalisa hubungan antara system nilai, ideologi partai dengan kebijakan yang dijalankan. Jika ada perbedaan nilai ideology dengan platform partai , maka mereka memberikan kritik internal, frustasi, dan membuat partai baru yang memiliki kemiripan dengan karakteristik ideologi dengan partai lama, atau memilih partai yang baru dan memiliki kemiripan dengan partai lama.

3. Tipologi Pemilih Nuro' Ulama'

Pada tipologi pemilih nuro' ulama' (pengikut ulamak) ini pemilih mempunyai orientasi ideologi yang sangat tinggi dalam pengambilan keputusan politik mereka serta tidak mempedulikan aspek rasional maupun kritis. Pilihan politik mereka didasarkan pada kedekatan nilai, agama, faham, asal-usul, dan sosial-budaya. Pada pemilih jenis ini mereka sudah terbiasa di kultuskan dengan bahasa *Odi' mateh Noro' Ulama'* (hidup mati ikut ulamak) artinya mereka mempunyai keyakinan yang sangat kuat, apa yang dikatakan ulama', tingah laku ulama' dan

pentunjuk ulama' dalam pilihan politikknya adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Saudi dari basis pemilih keagamaan yang mengungkapkan:

> " Kule me'le, partai e'desaragi ka faham ben agemana, kule ore'ng Islam dan berfaham Ahlisunnah Waljamaah (NU), Deddhi kule me'le' partai se benya' ulama'en. *Odi' mateh Noro' Ulama',* napah se' eesampayagi ulam' gi partai gerue se'e'pele e'pemilu."
>
> Artinya:
>
> " Pilihan kepada partai politik saya didasarkan pada faham dan agama, saya kan orang islam dan berfaham Ahlisunnah Waljamaah (NU), maka saya memilih partai yang banyak ulama'nya, *Odi' mateh Noro' Ulama'*, apa yang disampaikan ulama', itu partai yang saya pilih dalam pemilu."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudi, bahwa pertimbangan ia memilih partai karena adanya kedekatan faham dan agama. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Asnawi dari basis pemilih marginal, ia mengungkapkan:

> "Saya memilih partai yang berbasis NU (PKB) dalam setiap pemilu. Saya juga aktif mengikuti kegiatan kampanye yang dilaksanakan partai pada waktu pemilu."

Berdasarkan hasul wawancara dengan Asnawi tersebut, bahwa partai politik yang dipilih adalah partai yang memiliki kedekatan faham dengan pemilih, seperti Nahdlatul uluma' atau NU. Kemudian yang bersangkutan juga aktif dalam kegiatan kampanye yang dilaksnakan oleh partai politik atau calon. Pemilih nuro' Ulama' merupakan pemilih yang gampang dimobilisasi selama periode kampanye, mempunyai loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri yang paling tampak pada pemilih jenis ini. Pemilih nuro' ulama' ini mempunyai orientasi ideology yang sangat tinggi. Senada dengan wawacara yang disampaikan oleh Muhammad Holis dari basis pemilih keluarga:

> “E’pemilu 2014 kuleh mile’ PKB ben e’pemilu 2019 gi mele PKB jugen. Kule arassah partai nika endi’ kadekatan sosial sareng budeye. Kule ta’ mandeng napa program kejana. Karena kule ampon coco’ karena benya’ Ke’yaeh ben Ulama’en.
>
> Artinya:
>
> “Pada pemilu 2014 saya memilih PKB dan pada pemilu 2019 saya juga memilih PKB, saya merasa partai ini memiliki kedekatan sosial dan budaya. Saya tidak melihat sampai sejauhmana program kerjanya. Karena menurut saya partai PKB sudah cocok karena banyak Kiyai dan ulama’nya”.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Muhammad Holis bahwa ia tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih nuro’ ulama’ sangat mengutamakan kedekatan social-budaya, nilai, Agama paham, usul asal, dan sebagai tolak ukur dalam memilih partai politik. Sementara menurut Moh Hazein dari pemilih basis Pemilih marginal, ia megungkapkan:

> “Kule me’le’ PKB e’pemilu 2014 jugen e’pemilu 2019 me’le’ PKB, Karena kule senneng ka figur ben keprinadiennah calona. Bennya’ calon e’partai PKB kaessa’ bede ustad bede kiyaeh, sa’'nggena calon se enga’ nika se pantes e’pe’le’.”
>
> Artinya:
>
> “Saya memilih PKB dipemilu 2014 dan pemilu 2019 juga PKB, karena saya suka dengan figure dan keperibadian calonnya. Banyak calon yang di partai PKB itu ada yang ustad dan ada juga yang kiyai, sehingga calon seperti ini yang layak untuk dipilih.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Moh. Hazein dapat kita lihat bahwa ia memilih partai politik atau calon tersebut mengutamakan figure dan kepribadian pemimpin. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Rizqi Kurnia Setiawan dari pemilih basis keluarga, ia megungkapkan:

> “ Ampon deri bile kule semenjak endi’ hak soara ka angguy mile’, pele’an kule partai golkar.Engggi setiap pemulu kule

> nyoblos golkar, karna ampon deri nenek moyang kaloarga kuleh kaesa' mile' Golkar."
>
> Artinya:
>
> "Dari dulu semenjak saya mempunyai hak untuk memilih, pilihan politik saya kepada Partai Golkar, ia dalam setiap pemilu saya memilih golkar, karena sudah dari nenek moyang keluarga saya itu memilih golkar."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizqi Kurnia Setiawan , ia memilih partai yang disarkan pada pertimbangan nilai histori dan mitos, sebuah partai politik atau kontestan. Pemilih jenis ini mempunyai pendidikan yang relatif rendah dan sangat konservatif dalam memegang paham serta tata nilai yang dianutnya. Pada pemilih jenis ini yang sangat mudah untuk digerakkan selama masa kampanye, dimana pemilih nuro' ulama' ini memiliki loyalitas tinggi kepada partai politik. Apa yang dikatakan oleh pimpinan partai politik adalah sebuah kebenaran yang sulit dibantah. Pemilih nuro' ulama' ini mempunyai kecenderungan memandang ideologi sebagai suatu dasar utama untuk membuat keputusan dalam pilihan politiknya, serta terkadang kebenarannya tidak bisa diganggu gugat.

4. Tipologi Pemilih Ta' Ro'nuro'

Pada ta' ro'nuro', (tidak ikut-ikut) dimana pemilih dangan partai atau calon mempunyai ikatan yang sangat rendah, dengan demikian maka prefensi politiknya sangat kurang. Pemilih ta' ro'nuro' tesersebut mempunyai sikap yang apatis, acuh tak acuh terhadap prosen pemilu. Kecenderungan pemilih ta'ro'nurok itu tidak memperdulikan program kerja dan kebijakan partai politik maupun calon serta ideologi partai manapun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fathorrasit dari basis pemilih keluarga, ia mengungkapkan:

> " kauleh ta' memperdulikan partai kaesa' berideolgi napah, ben program kerjanya napah, karena menurut kauleh padeh beih, programan coman e'nga' gerueh sobung sebegus. Mun ampon

> terpe'le belum tentu mempu nyelesaiagi persoalan se'bede e'bendebesah. E'pemilu 2014 kule ta' nyoblos ben 2019 kule nyoblos."
>
> Artinya:
>
> "saya tidak terlalu mempedulikan partai itu punya ideology apa, dan program kerjanya apa, karena bagi saya sama saja, programnya itu-itu saja dan tidak ada yang bagus. Kalaupun sudah terpilih belum tentu ia mampu menyelesaikan persoalan yang ada di bondowoso, pada pemilu tahun 2014 saya tidak menggunakan hak pilih saya dan pemilu tahun 2019 saya menggunakan hak pilih saya".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fathorrasit dapat disimpulkan bahwa ia tidak terlalu memperdulikan ideology partai, disamping itu juga ia tiak mmeperdulikan program kerja dan kebijakan partai politik, mau seperti apa kebijakan dan program kerja partai politik dan calon tidak ia perdulikan. Pemilh ta'ro'nuro' ini tidak memiliki orientasi ideologi tinggi dengan partai politik atau calon,dan tidak menjadikan kebijakan sebagai dasar atas pertimbangan untuk memilih partai. Pada pemilih ta' ro'nuro' itu diamana kemauan utnuk berpartisipasi / atau terlibat dengan partai politik sangatlah kurang sebagiaman hasil wawancara dengan Mohammad Ali dari basis pemilih marginal, ia mengatakan:

> "E'nten kule ta' tertari' ro'nuro' edelem politi'. Dinahlah se'laen beih ma'se'nuro'. De'remmah gi…..kule ta'minat e'politik. Pun pon pemilu kue mun se'mpat gi deteng, mun ta' sempat gi ta'detang ka ponglompong kaangguy mile."
>
> Artinya:
>
> "Saya tidak tertarik ikut berpartisipasi dalam politik, biarkan yang berminat saja bisa berproses dipartai politik. Gimana ya……saya gak berminat dipolitik. Dalam pemilu kalau sempat ya saya datang ke TPS, kalau tidak sempat ya saya tidak datang ke TPS untuk memilih".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mohammad Ali dapat kita lihat bahwa Keinginan berpartisipasi / atau terlibat dengan partai politik untuk jenis pemilih ta' ro'nuro' ini sangatlah kurang karena ikatan

ideologi mereka sangat rendah sekali, mereka juga kurang mempedulikan program kerja dan kebijakan partai politik atau calon. Selain orientasi idiologi yang rendah pemilih jenis ini didominasi oleh golongan putih (golput). Sebagaimana hasil wawancara dengan Fathollah dari basis pemilih berkebutuhan khusus, ia menyampaikan:

> "E'delem berempah pemilu kule ta' nyoblos, nyamanan alakoh nyareh kasap untuk keluarga e'tembeng nyoblos marenah gebikah pas tade' perubahan se sae, pembangunan, pangentasan kamiskinan. Kan parcomah kule nyoblos, mending ta'usa nyoblos."
>
> Artinya:
>
> " Dalam beberapa pelaksanaan pemilu ini saya tidak mencoblos (memilih), lebih baik saya berkerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari pada menggunakan hak pilih saya tapi setelah itu tidak ada perubahan yang baik, baik pembangunan, pengentasan kemiskinan. Kan percuma kalau begitu saya mencoblos, kan mending tidak mencoblos".

Sebagaimana hasil wawancara dengan Fathollah, dapat dilihat bahwa sangat rendah sekali keinginan berpartisipasi didalam pemilu, tidak adanya keinginan dalam menggunakan hak pilihnya. Pada golongan putih (golput) golongan putih tersebut manyoritas adalah pemilih jenis ta'ro'nurok , meskipun yang bersangkitan ikut serta dalam pemilu, biasanya mereka memilih secara acak atau ramdom. Mereka mempunyai keyakianan siapapun, apapun partai atau siapaun calonnya yang terpilih tidak akan membawa bangsa kearah yang lebih baik atau perbaikan menurut harapan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunfi Fahlawati sebagai Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten Bondowoso, ia mengungkapkan:

> "Pada pemilu serentak 2019 masih ada 95.450 pemilih yang tindak menggunakan hak pilihnya atau 15,93%. Mereka (pemilih) kurang tertarik dengan calon yang ikut kontestasi, adanya rangsangan untuk datang ke TPS masih kurang, sehingga perlu diminimalisir dan harus ditingkatkan kedepannya pada pemilu yang akan datang. Pendidikan pemilih perlu diperluas kepada

> semua segmenatasi, harus ada kiat-kiat yang perlu dilakukan terhadap semua basis pemilih atau segmentasi pemilih masih perlu dimaksimalkan dalam proses sosialisasinya. Mereka harus diedukasi, pemilu merupakan momen untuk pemenuhan haknya pemilih".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa pada pemilu serentak 2019 angka ketidakhadiran pemilih sejumlah 95.450 atau 15,93%, satu faktor yang menjadikan orientasi pemilih skiptis sangat lemah dikarenakan mereka kurang tertarik kepada calon kontestan pad pemilu serentak 2019. Selain itu juga perlunya memaksimalkan pendidikan pemilih, edukasi pemilih merupakan hal yang sangat penting dimana pemilu merupakan momen untuk penmenuhan hak sebagai warga Negara yang baik.

5.Tipologi Pemilih Pa Pe'sse'an

Tipologi pemilih pa pe'sse'an merupakan jenis pemilh yang memiliki orientasi kepada pe'sse' (uang) atau dalam bentuk yang lainnya seperti barang. Jenis pemilih ini masih memandang kedekatan ideologi partai dan calon dengan pemilih tetapi sudah agak lemah, tidak sekuat pemilih nuro'ulama' atau pemilih fokal. Termasuk juga track record partai politik dan calon dimasa lampau masih menjadi pertimbangan dalam pilihan politiknya.Seperti yang hasil wawancara dengan Ahmad Samsul Arifin dari pemilih basis marginal, ia mengungkapkan:

> "E'nggi pertimbangan ponapa se'ampon ekalakoh partai otabeh calon e'masa lalu ben janji politikah tetap dedhi pertimbangan delem nantoagi pe'le'an deggi pas pemilu, cuman ge koduh tetep bedeh obengah (pe'sse')."
>
> Artinya:
>
> "iya pertimbangan apa yang sudah dilakukan oleh partai atau calon dimasa lalu dan janji politiknya tetatp menajadi pertimbanagan nanti dalam menentukan pilihan pada waktu pemilu, cuman ya tetap ada uangnya."

Sebagamana hasil wawancara tersbut, bahawa apa yang dilakukan oleh partai politik dan calon dimasa yang lalu (periode sebelumnya) tetap menjadi pertimbangan, dalam pilihan politik mereka ketika pemilu, akan tetatpi faktor uang masih menjadi pertimbangan kepada partai apa dan siapa calon yang akan dipilihnya. Pada pemilih jenis ini kecenderungan pilihan politiknya selalu berubah-ubah. Senada dengan hasil wawancara dengan Sri Agustiningsih dari pemilih basis perempuan, sebagaimana berikut:

> " Kule me'le e'pemilu 2014 partai PKB ben pemilu 2019 me'le' partai Golkar, enggi abe obe, tergantung program kerjanah ben sanapah pe'sse'nah, enggi…koduh bedeh pe'sse'nah."
>
> Artinya: Saya memilih Partai PKB pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 memilih partai Golkar. Iya berubah-ubah tergantung program kerjanya dan seberapa besar uangnya. Iya…..harus ada uangnya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Agustiningsih, dapat dilihat bahawa ia memilih partai politik pada pemilu 2015 memilih Partai PKB dan pemilu 2019 memilih Partai Golkar. Pilihan politiknya pada setiap pemilu cenderung berubah-ubah, itu didasarkan pada program kerja partai atau calon dan seberapa besar uang yang diterima oleh pemilih. Termasuk juga, pemilih pa pe'sse'an ini mempunyai kecenderungan ikut berpartisipasi dalam kampanye harus ada embel-embelnya, seperti pengganti uang lelah atau pengganti uang bensin. Seperti hasil wawancara dengan Surakwi dari pemilih basis berkebutuhan Khusus, ia menyampaikan:

> "Enggi kule noro mun e'yaje' akampanye partai, coman koduh bede uang bensinah mas otabeh pengganti obeng mogukah mas, kan paddengan alakoh ka sabe munta' olle napah?."
>
> Artinya:
>
> "Iya saya ikut jika diajak kampanye partai, cuman harus ada uang bensinya mas atau pengganti uang capek mas, kan lebih baik bekerja disawah kalau tidak dapat apa-apa?."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Surakwi dapat kita lihat, bahwa pemilih pa pe'sse'an biasanya jika iku kegiatan kampanye selalu ada embel-embel uang bensin atau pengganti uang lelah, ia lebih memilih bekerja jika tidak mendapatkan apa-apa (pe'sse'), karena ia meganggap percuma ikut kampanye jika tidak mendapatkan apa-apa (pe'sse'). Tipologi Pemilih Pa pe'sse'an ini semakin menjamur akibat dari praktik amae'n pe'sse' (main uang) yang dilakukan oleh partai politik, calon atau tim sukses. Praktik amae'n pe'sse' tidak bisa dihindari lagi, siring dengan sistem pemilu (pemilihan langsung oleh rakyat) dimana pemilih bisa secara memilih wakil-wakilnya yang akan duduk diparlemen. Kekuatiran yang sangat berlebihan dari partai politik dan calon legislatif tidak akan dipilih dalam pemilu, sehingga mereka juga berlomba-lomba mencari simpatik pemilih termasuk didalamnya menggunakan praktik amae'n pe'sse' (main uang). Praktik amae'n pe'sse' tidak bisa dielakkan lagi, seiring dengan semakin runtuhnya ikatan ideologi partai politik atau calon legislatif dengan pemilih, orientasi pemilih semakin pragmatis, ia mendasarkan pilihan politiknya atas seberapa besar uang yang diberikan oleh partai politik atau calon, maka itu kemungkinan besar yang akan dipilih dalam pemilu.

5.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tipologi Pemilih Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan pembahasan diatas terkait dengan tipologi pemilih pada pemilu serentak di Kabupaten Bondowoso, bagaimana orientasi pemilih didasarkan dengan masing-masing tipologi atau krakteristiknya. Selanjutnya, disini kita akan mengemukakan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten bondowoso. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso dapat dilihat pada hasil penelitian berikut:

1. Faktor karakteristik Pemilih

Faktor pemilih sendiri dapat digambarkan sebagai kondisi awal pemilih yaitu memiliki karakteristik yang melekat pada pemilih. Karakteristik pemilih merupakan factor pendorong, sehingga seseorang dapat berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih partai atau calon. Pemilih memiliki watak sosial yang memiliki kepekaan sosial terhadap permasalahan sosial-ekonomi dan sosial-budaya tersebut dapat dilihat dari aktivitas politiknya dalam pemilu. Bedasarkan hasil wawancara dengan informan dengan beberapa pemilih di Kabupaten Bondowoso, pada dasarnya mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun sebagaian besar dari mereka pada umumnya memiliki kesadaran dalam berpartisipasi untuk memilih partai politik atau calon legislatif. Ini juga diperkuat dengan data partisipasi pemilih pada pemilu serentak di Kabupaten Bondowoso yang mencapai 84%. Faktor karakteristik pemilih itu dipengaruhi oleh faktor:

a. Faktor Kondisi Sosial Budaya Dan Sistem Nilai

Kondisi sosial budaya dan sisten nilai menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tipologi pemilih. Karakteristik sosial budaya pemilih seperti lingkungan sosial itu mempengaruhi tipologi pemilih dalam penagmbilan keputusan untuk memilih partai atau calon. Faktor lingkungan sangat berpengaruh, dimana pemilih tinggal dan berinteraksi sangatlah penting, seperti nilai tradisionalnya dan kondisi kehidupan sosial budaya mereka. Apa yang ada pada dilingkungan akan mempengaruhi cara berfikir dan bersikap setiap pemilih. Dalam lingkungan keluarga, pemilih contohnya; dibesarkan dalam keluarga yang memiliki ideology Islam, maka terdapat kecenderungan individu tersebut untuk menganbil tata nilai Islam itu, oleh karenanya mereka sudah terbiasa dengan prinsip-prinsp Islam dalam kehidupan keseharian mereka. Mayoritas pemilih yang ada dikabupaten Bondowoso menganut Islam Ahlussunah Waljama'ah atau Nahdlatul Ulama' (NU). Maka tradisi ala NU sangatlah mempengaruhi tata nilai

dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Setiap pemilih memiliki dan mewarisi tata nilai serta keyakianana yang berbeda satu pemilih dengan lainnya. Mayoritas pemilihnya berlatar belakang Nahdiyin maka kiyai sangat memberikan pengaruh dalam menentukan pilihan politiknya kepada partai politik untuk dipilih dalam pemilihan umum. Dengan faktor ini kemudian Pemilih memandang ideologi sebagai suatu dasar dalam mengambil keputusan serta bertindak, acapkali terkadang ideologi tersebut memiliki kebenaran tidak bisa diganggu gugat Kecenderungan pemilih ini dalam menentukan pilihan politiknya kepada partai politik seperti PKB atau PPP. Kiyai masih menjadi simpul yang dapat mengendalikan terhadap prefensi dan pilihan politik mereka, dan ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat patrimonial dengan pola sosial *Patron–Clien*. Kiyai ataupun ulama-ulama sebagai patron yang sangat dihormati sekaligus akan menjadi panutan dalam kehidupan keseharian mereka baik pada sisi spiritualnya baik dalam bentuk pengejewantahan nilai penting pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Bondowoso terkhusus pesantren. Ini secara tidak langsung diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi yang kemudian diperkuat dengan kegiatan keagamaan yang marak seperti acara pengajian, Sholawatan, istighosah, yasinan, tibaan, ziarah kemakam wali songo dan kegiatan keagamaan lainnya yang merupakan ciri yang sangat nampak pada kelompok ini yang menjadikan tidak sama dengan kelompok lainnya.

b. Faktor Pendidikan dan Ekonomi

Pemilih yang mempunyai pendidikan rendah akan lebih condong mengunakan aspek non-rasional dalam pilihan politik mereka. Faktor isu, rumor, emosional pemilih serta opini publik terkait partai politik dan calon merupakan hal utama dalam proses pengambilan keputusan pada pilihan politik mereka. Masing–masing

indiividu mempunyai kemampuan untuk berbeda antara satu pemilih dengan pemilih lainnya, ini akan sangat mempengaruhi dalam proses menetukan pilihan. Faktor ekonomi dan tingkat pendidikan diyakini dapat berpengaruh pada pemilih dalam membuat memilih kepada partai politik atau kontestan. Sementara itu pemilih yang mempunyai pendidikan tinggi akan condong lebih selektif dalam proses memilih partai dan calon. Informasi yang mereka peroleh tidak kemudian semerta-merta langsung diterima, namun mereka akan mengelompkkan dan menganalisa apakah informasi tersebut berasal dari referensi yang dapat dipercaya atau tidak.

c. Faktor Kekerabatan/Kekeluargaan

Faktor kekrabatan/ kekeluargaan dapat mempengaruhi tipologi pemilih di Kabupaten Bondowoso. Pemilih yang ada di Kabupaten Bondowoso sangat menjunjung tinggi kekerabatan atau kekeluargaan. Sistem kekeluargaan dan kekrapatan pada pemilih di Kaupaten Bondowoso sangatlah kuat, seperti dalam kehidupan keseharian mereka, budaya gotong royong masih sangat melekat pada aktivitas sehari-hari, seperti saling membantu dalam membangun rumah, bercocok tanam, sehingga ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan maka tidak segan-segan keluarga yang lain akan membantunya, meskipun yang berangkutan tidak secara langsung meminta pertolongan. Faktor kekerabatan atau kekeluargaan juga bukan hanya ditonjolkan dalam aktivitas keseharian mereka dalam kehidupan bermasyarakat, namun dalam pilihan politik mereka juga dipengaruhi oleh faktor kekerabatan atau kekeluargaan. Pemilih yang mengedeepankan faktor kekeluargaan atau kekerabatan ini mempunyai kecenderungan pilihan politiknya dalam pemilu akan memilih partai atau calon yang masih ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Seperti hasil wawancara dengan Ade Bagus Tumarta dari pemilih basis keluarga, ia mengatakan bahwa:

> " e'pemilu 2014 kule me'le' partai gerindra ben pemilu 2019 kule me'le' partai gerindra. Kule me'le' partai gerindra karna bedeh keluarga se' nyalon e'gerindra. Ta'nyaman mun ta' mile', nampa pole kan gi' kaluarga debi', sae me'le' keluarga se'nyalon katembeng me'le ore'ng laen, napa pole' pas ta'kennal kaorengah."
>
> Artinya:
>
> "Pada pemilu 2014 saya memilih partai gerindra dan pemilu 2019 saya juga memilih partai gerindra. Saya memilih partai gerindra kaena ada keluarga yang mencalonkan digerindra. Tidak enak (sungkan) kalau tidak memilihnya, apalagi masih ada hubungan keluarga, lebih baik memeilih keluarga yang mencalonkan ketimbang memilih orang lain apalagi tidak mengenal sama orangnya (calonnya)."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Bagus Tumarta, bahwa ia memilih partai atau calon karena mementingkan faktor kekerabatan atau kekeluargaan. Pemilih lebih memperioritaskan hubungan kekeluargaan dalam pilihan politik mereka dibandingkan harus memilih partai atau calon yang tidak memiliki hubungan keluarga. Masyarakat di Kabupaten Bondowoso, yang nerupakan suku madura pandalungan, sangatlah mempertimbangkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilu.

2. Faktor Media Massa

Media massa yang mempengaruhi pemilih, bahwa media massa mempunya kemampuan untuk mendistribusikan informasi, menggiring opini serta merupakan kekuatan untuk membentuk opini publik. Lokasi geografis juga mempengaruhi cara pemilih dalam menganalisa informasi, pemilih yang hidup didaerah kota cenderung sudah terbiasa dengan beragam informasi dan bertolak belakang dibandingkan dengan pemilih yang tinggal dipedesaan. Maka seberapa besar opini publik tersebut didasarkan oleh seberapa luas informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketika pemberitaan media massa terhadap partai politik

bersifat positif, maka masyarakat cenderung menilai partai tersebut positif. Dan juga sebaliknya jika media massa ramai-ramai memberitakan keburukan partai politik, maka masyarakat cenderung menilai partai atau kontestan tersebur negatif. Hubungan partai politik dengan media massa tidak selalu netral dan objektif, bahkan terkadang cenderung bisa dalam memberikan deskripsi dan informasi terkait partai politik dan calon legislatif, Faktor- faktor biasnya informasi tersebut disebabkan karena jurnalis atau wartawan yang membuat berita memiliki sistem nilai, moralitas, memiliki tingkat pendidikan dan budaya yang dapat mempengaruhi analisis terhadap berita yang ditulis. Bahkan, diperparah lagi dengan adanya media massa dan wartawan memang memiliki keberpihakan pada partai tertentu karena memang menjadi simpatisan atau kader partai politik tertentu. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan media yang biasanya mereka lihat adalah TV, Media elektoronik dan sosial media.

3. Faktor karakteristik partai politik dan calon

Partai politik memiliki atribut seperti reputasi, citra, image, ideology, latar belakang serta kualitas para politikusnya akan mempengaruhi penilain masyarakat. Seringkali masyarakat mencampuradukan antara kualitas kontestan dengan partai politik yang menjadi kedaraannya. Aktivitas dan perilaku para politikus partai politik sangat mudah dinilai oleh masyarakat melalui kualitas orasi, program kerja, kepedulian, sikap yang ditunjukkannya sebagai barometer sebuah partai politik. Dalam membangun citra partai politik atau calon dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan merupakan hasil dari akumulasi inforamasi serta kinerja yang baik dalam jangka waktu yang sangat lama. Disinilah peran ketua umum/pimpinan pada partai politik sangat dibutuhkan, Seorang ketua umum bisa memberikan deskripsi dan petunjuk jelas tentang seberapa berkualitas partainya tersebut. Hal demikian begitu berguna bagi pemilih ketika yang bersangkutan

dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainly) tentang partai apa yang harus dipilih. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pemilih dikabupaten bondowoso, orientasi kedekatan ideology partai menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan politik pemilih, suatu contoh pemilih yang memiliki faham Islam Ahlussunah waljama'ah atau NU akan memilki kecenderungan untuk memilih partai yang memiliki platform NU seperti PKB dan PPP. Sementara itu pemilih yang memiliki faham nasional ada kecenderungan untuk memilih partai nasionalis, seperti PDI-P, Golkar dan yang lainnya. Selain itu maka faktor track record partai politik dan calon terpilih selama masa ia menjabat akan senantiasa diananlisis dan dicermati oleh pemilih, sampai sejauhmana kepedulianya dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang terkahir adalah program kerja yang ditawarkan oleh partai politik dan calon pada saat kampanye. Seberapa menariknya program yang ditawarkan dapat mencari simpati pemilih, sehingga dapat memilih partai dan calonnya tersebut. Kecenderungan penilaian pemilih, terhadap partai atau kontestan, jika dinilai baik maka kemunginan dipilih kembali, sementara jika penilaian pemilih urang baik maka kemungkinan besar tidak akan dipilih kembali pada pemilu 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilih maka pilihan politiknya jika didasarkan urutan adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar dan seterusnya.

4. Faktor amae'n Pe'sse'

Fenomena amae'n pe'sse' yang ada dimasyarakat sangat sulit dihentikan dan justru menjadi kebiasaan atau tradisi yang tidak bisa dielakkan yang dilakukan oleh partai politik atau calon legislatif untuk meraih simpati dan dukungan suara terbanyak dari pemilih. Fenomena amae'n pe'sse' sebagai interaksi sosial antara individu dengan partai politik atau calon dalam pelaksanaan pemilu. Pemilih sebagai actor

sosial dapat mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang didapat dalam praktik politik uang, sehingga menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu. Praktik amae'n pe'sse' terjadi pada pemilu serentak 2019 dikabupaten bondowoso diakibatkan oleh keterbatasan ekonomi, Mayoritas masyarakat bondowoso yang mayoritas berada pada garis kemiskinan membuka peluang terjadinya praktik politik uang. Berasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 yang berada pada garis kemiskinan adalah 380.350, sedangkan jumlah penduduk miskin adalah 103.330 atau 13,33%. Sementara itu pada tahun 2020 penduduk yang berada pada garis kemiskinan adalah 408.352, sedangkan jumlah penduduk miskin adalah 110.240 atau 14.17%. Kemiskinan membuat pemilih tidak dapat lagi berfikir rasional untuk mendapatkan sejumlah imbalan uang dari partai politik atau kontestan. Selanjutnya adalah faktor rendahnya pendidikan, kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Bondowoso masih relative rendah. Rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan rendahnya pengetahuan terhadap politik dan efek atau hukuman bagi pelaku praktik maney politik. Rendahnya pengetahuan pemilih dalam praktik money politik itu bisa terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Maksun Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, ia mengungkapkan:

> " yang pasti kita sudah mendengar dalam pileg 2019 kemaren itu terjadi money politik, cuman tidak ada keberanian untuk melaporkan, mereka tidak melaporkan karena tidak ada buktinya. Kalau dari sisi bawaslu tidk ada laporan ya tidak bisa diproses. Pada waktu Bawaslu melakukan survey dan dari data survey itu bahwa ada 28 % itu meng iyakan dengan praktik money politik. Pemahaman pemilih ternyata memang tidak tau kalau money politik itu tidak boleh, mereka juga tidak enak untuk menolak, karena yang memberikan (amplop) dianggap figure. Yang lain karena factor ekonomi, karena mereka memiliki kebutuhan makanya mereka menerima praktik money politik".

Berdasarkan wawancara dengan M.Maksun dapat disimpulkan bahwa praktik amae'n pe'sse' itu terjadi dalam pemilu serentak 2019. Mereka yang mengetahui adanya praktik money politik tidak memiliki keberanian untuk melaporkan. Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh Bawaslu ada 28% menerima dan menghendaki praktik amae'n pe'sse'. Rendahnya pemahaman pemilih menjadi factor utama, mereka tidak memamhmi bahwa amae'n pe'sse' itu dilarang. Sementara itu Fricas Abdillah divisi Hukum data informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso, ia mengungkapkan:

> "Sebenarnya money politik itu ada, tapi seperti apa ya istilahnya, kita mendengar money politik tetapi ketika pendalaman kelapangan kita sulit membuktikan, kalau temuan kita yang menangani. Para pelaku politik itu lebih rapi, dia punya metode banyak cara melakukan money politik. Perspektif hukmnya pasti dipidana, baik penerima atau pemberi pada praktik money politik. Praktik money politik berkaitan dengan pandangan pemilih yang harus dibarengi dengan pendidikan politik. Praktik money politik itu menciderai demokrasi, merampas hak politik seseorang dengan menukar hak pemilih dengan uang, maknanya money politik itu luas, termasuk menjanjikan sesuatu itu money politik".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fricas Abdillah, ia membenarkan bahwa amae'n pe'sse' itu ada cuman ketika pendalam kelapangan itu sulit untuk membuktikan. Para pelaku politik itu lebih rapi, dia punya metode dan banyak cara melakukan amae'n pe'sse'. Perspektif hukmnya pasti dipidana, baik penerima atau pemberi pada praktik amae'n pe'sse'. Praktik amae'n pe'sse' berkaitan dengan pandangan pemilih yang harus dibarengi dengan pendidikan politik. Praktik amae'n pe'sse' itu menciderai demokrasi, merampas hak politik seseorang dengan menukar hak pemilih dengan uang, maknanya amae'n pe'sse' itu luas, termasuk menjanjikan sesuatu itu amae'n pe'sse'.

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Dafir Ketua DPC PKB kabupaten Bondowoso, ia mengungkapkan:

> "Tipologi pemilih pada pemilu berubah, yang sebelumnya mereka pemilih militan partai politik menjadi pemilih pragmatis. Ini merupakan kegagalan partai politik dalam memberikan pemahaman bahwa Negara ini adalah Negara demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilih memandang elit politik dipandang hanya untuk pengantarkan calon untuk duduk dikursi DPRD dan mendapatkan penghasilan, sementara apa yang didaptkan pemilih?. Partai politik lupa untuk memberikan pemahaman kepada rakyat. PKB sebagai partai yang dilahirkan oleh NU. Pemilih terjebak pada pemikiran bahwa politik itu kotor, maka penting adanya pendidikan politik. Faktor pragmatis pemilih akibat money politik, kemudian pemilih menerima praktik money politik, Maka praktik money politik tersebut dilakukan oleh semua partai, termasuk PKB".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Dafir, dapat disimpulkan bahwa berubahnya tipologi pemilih dari pemilih militant partai politik menjadi pemilih pragmatis itu diakibatkan oleh pemahaman pemilih bahwa memilih calon itu hanya sekedar mengantarkan seseorang untuk menjadi anggota DPRD, dan mereka mendapatkan penghasilan, sementara pada sisi pemilih sendiri mendapatkan apa. Disisi yang lain ia menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat untu kmemberikan pemahaman akan pentingnya politik. Ia mengakui bahwa pragmatisme pemilih itu diakibatkan oleh praktik amae'n pe'sse' yang dilakukan oleh semua partai politi, termasuk PKB. Senada dengan yang disampaikan oleh Ady Kriesna ketua DPD Partai Golkar, ia mengungkapkan:

> "Pendidikan politik merupakan proses pencerdasan, bagaimana menjadi pemilih yang rasional, dan mendukung partai dan calon bukan berdasarkan aspek like and dislike dan non rasional, bagaimana pemilih memilih berdasarkan tawaran program kerjanya seperti digolkar ada program karya kekaryaan kepada masyarakat umum berdasarkan faktor rasionalitas. Money politik memang kita tidak bisa munafik dalam pemilu, sejak dipilih secara langsung anggota DPRD, maka disitulah visi-misi partai dan caleg yang sifatnya ideologis runtuh, sehingga pendekatan caleg menggunakan money politik, hampir tidak ada caleg yang tidak menggunakan money politik, meskipun tidak semuanya menggunakan uang dan ada juga barang. Praktek jual

beli suara tidak bisa dibohongi dengan segala macam kemasan sudah bukan rahasia umum".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ady Kriesna, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan politik merupakan proses pencerdasan terhadap pemilih, bagaimana menjadi pemilih pe'nte'r, dan mendukung partai dan calon bukan berdasarkan aspek like and dislike dan non rasional, bagaimana pemilih memilih berdasarkan tawaran program kerjanya seperti digolkar ada program karya kekaryaan kepada masyarakat umum berdasarkan faktor rasionalitas. Praktik amae'n pe'sse' memang kita tidak bisa munafik dalam pemilu, sejak pemilu menggunakan system dipilih secara langsung untuk memilih anggota DPRD, maka disitulah visi-misi partai dan caleg yang sifatnya ideologis runtuh, sehingga pendekatan caleg amae'n pe'sse', hampir tidak ada caleg yang tidak amae'n pe'sse', meskipun tidak semuanya menggunakan uang dan ada juga barang. Praktek jual beli suara tidak bisa dibohongi dengan segala macam kemasan sudah bukan rahasia umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahawa praktik amae'n pe'sse' biasanya terjadi pada waktu pelaksanaan kampaye, baik kampanye tertutup atau pada kegiatan kampanye terbuka. Proses memobilisai pemilih untuk hadir pada kegiatan kampanye di kita sering dipertontonkan dengan praktik amae'n pe'sse' baik berupa uang bensin, uang lelah, kerudung dan sembako. Partai politik dan calon legislatif seolah-olah berlomba-lomba dalam mencari simpatik untuk meraih dukungan pemilih. Selanjutnya praktik amae'n pe'sse' terjadi pada malam hari atau dini hari yang biasa kita sebut dengan istilah "serangan fajar. Kemudian yang terakhir pada praktik amae'n pe'sse' biasanya terjadi pada hari pelaksanaan pemungutan suara, ketika pemilih akan menuju Tempat pemungutan suara (TPS), dimana para tim sukses bergerilya mencari pemilih yang masih belum hadir ke TPS dan memungkinkan untuk dilobby untuk mendukung partai dan calonnya dengan diberikan pe'ssse' (uang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilih, rata-rata mereka pernah mendapatkan imbalan, baik dalam bentuk barang atau uang sebagai bentuk imbal balik dukungan dan pilihan kepada partai politik atau kontestan yang besarannya berfariasi atara 25.000, 35.000, ada yang 50.000 atau bahkan lebih dari 100.000, tegantung sampai sejauh mana kesepakatan yang dibangun antara partai politik atau kontestan dengan pemilih tersebut.

BAB VI

DISKUSI DAN IMPLIKASI TEORITIK

6.1 Tipologi Pemilih Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa terdapat beberapa tipologi pemilih pada pemilihan umum serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso. Tipologi pemilih ini merupakan karakteristik yang khusus atau spesifik yang melekat pada masing-masing pemilih yang membedakannya dengan pemilih lainnya. Adapun tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso meliputi: tipoogi pemilih pe'nte'r, tipologi pemilih fokal, tipologi pemilih nuro' ulama', tipologi pemilih ta'ro'nuro', dan tipologi pemilih pa pe'sse'an.

Pertama tipologi pemilih pe'nte'r (pintar atau cerdas), pada pemiih yang mempunyai tipologi pemilih pe'nte'r, mereka tidak begitu melihat rasa fanatisme pada partai politik tertentu maupun calon, Pada pemilih pe'nte'r kecenderungan mereka akan melihat apa yang sudah diperbuat oleh partai politik atau seorang kandidat sebelumnya dengan hitungan untung rugi atau bukti nyata dari implementasi program sebelumnya. Pengalaman pada pemilu sebelumnya (track record) partai politik partai politik dan calon yang telah menjabat di DPRD kabupaten pada masa sebelumnya sangatlah penting untuk dianalisis dan diberikan penilaian. Pemilih pe'nte'r akan selalu menjadikan pertimbangan pengalaman selama masa jabatan sebelumnya, sebagai tolak ukur apakah partai politik atau calon itu konsisten atas apa yang sudah ditawarkan pada program kerja atau janji politiknya. Keberhasilan partai politik dan calon dalam memperjuangkan program pro rakyat senantiasa akan diapresiasi oleh pemilih dengan memberikan dukungan suara pada pemilu berikutnya, sebaliknya kegagalan dalam memperjuangkan aspirasi program pro rakyat sebagaimana janji politiknya akan cenderung untuk tidak dipilih lagi. Pada pemilih Pe'nte'r ini

dimana mereka akan memperhitungkan untung dan rugi ketika menjatuhkan pilihan politik mereka atas pilihan kepada partai politik atau calon legislatif. Pertimbangan-pertimbangan apakah partai politik mempunyai tawaran program yang bagus, pro rakyat yang akan ia jalankan selama 5 tahun yang akan datang (dalam masa periode jabatan). Selanjutnya pemilih pe'te'r akan merasa rugi ketika, ia salah dalam pengambilan keputusan pilihan kepada partai politik atau calon legislatif. Ini sejalan dengan konsep pilihan rasional yang dikemukakan Budge dan Farlie (1977) menerangkan dua faktor penting dalam pendekatan pilihan rasional. Pertama, partai politik yang menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Kedua, pemilih yang ingin memenuhi kepentingan politik dan ekonomi mereka. Proses pemilihan didasarkan pada "*lembaga pertukaran"* antara pemilih dan partai politik untuk saling mencapai keuntungan masing-masing. Pemiloh pe'nte'r pada pemilu 2019 di Kabupaten Bondowoso senantiasan dalam menggunakan pilihan politiknya didasarkan untuk memaksimalkan manfaat yang hendak diperoleh oleh pemilih, Sementara partai politik harus memformulasikan kebijakan dan program pro rakyat agar meraih suara dalam pemilihan umum. Argumentasi utama yang melatarbelakangi teori pilihan rasional adalah konsep "pertukaran yang rasional" (rasionalitas). Maka pertimbangan untung dan rugi dari dalam proses pertukaran ini adalah sampai sejauh mana manfaat yang akan diperoleh oleh pemilih dari proses kebijakan partai politik atau calon ketika sudah menjabat atau terpilih.

Disamping pertimbangan untung dan rugi, pada pemilih pe'nte'r ini, dimana mereka akan melakukan urutan dan alternatif prefensi pilihan politik kepada partai politik calon, apakah dia akan memilih PKB, PDI, Golkar atau partai yang lainnya. Pertimbangan-pertimbangan sebagai mana urutan prefensi pilihan politik mereka, ia akan melihat pada track record atau rekam jejak partai poliitk pada masa sebelumnya atau masa lalu dan tawaran program kerja pada masa kampanye. Pemilih Pe'nte'r pada pemilu 2019 di Kabupaten Bondowoso, secara notabene sudah melek politik,

informasi-informasi terkait perkambangan politik daerah selalu mereka ikuti baik dalam partisipasi langsung pada waktu kampanye atau melalui akses informasi dimedia massa dan elektronik. Pemilih pe'nte'r ini jika didasarkan pada basis pemilih, mereka yang memiliki pendidikan relatif tinggi. Pada pelilih Pe'nte'r ini, mereka sudah terbiasa dengan keberagaman infromasi yang bervarisai dan kontradiktif, ia mampu memilah-milih mana informasi yang bersumber dari sumber yang dapat dipercaya ataukah tidak. Proses cek dan recek terhadap kebenaran suatu informasi akan ia lakukan sampai menemukan informasi yang akurat.

Kedua tipologi pemilih fokal merupakan pemilih yang senantiasa kritis dalam mencermati terkait dengan ideologi partai politik atau calon dengan kebijakan partai yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilakukan untuk 5 tahun yang akan datang, sehingga mereka akan selalu memiliki kemauan memperbaiki kinerja, kebijakan pada masa mendatang yang akan dilakukan partai politik dan calon . Pada pemilih fokal ia dalam menentukan pilihannya dengan menganalisis ideologi dari partai tersebut dan kebijakan partai politik dan calonnya akan permasalahan yang dihadapi. Pada pemilih jenis ini, pemilih tidak akan segan-segan untuk memberikan kritik atau masukan kepada partai atau calon, jika kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ketika harapan pemilih tidak sesuai dengan kenyataan maka mereka kan memindahkan pilihan politiknya pada partai politik atau calon lainnya. Dengan begitu tipologi fokal ini merupakan penggabungan antara orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang calon dan akan orientasi mereka hal-hal yang bersifat ideologis. Pemilih jenis ini merupakan penggabungan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang calon pada upaya penyelesaian persoalan yang ada didalam masyarakat dan tingginya keinginan mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis partai. Korelasi antara ikatan ideologis membuat pemilih loyalis yang fanatik kepada partai sangat kuat dan tidak semudah *"pemilih pe'nte'r"* untuk berpaling kepartai yang lain. Pemilih

fokal menjadikan nilai ideologi sebagai sebuah pijakan kepada partai politik apa meraka akan menentukan pilihan. Selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan dan sudah dilakukan. Pemilih jenis ini, tertarik dulu kepada program kerja yang janjikan sebuah partai politik atau calon, setelah itu pemilih fokal akan mencoba memahami faham dan nilai-nilai yang mendasari penyusunan sebuah kebijakan partai. Pemilih fokal senantiasa akan melihat dan menganalisa diantara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dijalankan. Jika ada perbedaan nilai ideologi partai dengan platform partai , maka mereka memberikan kritik internal, jika mereka frustasi, maka akan pindah kepada partai yang memiliki kemiripan dengan karakteristik ideologi dengan partai lama, atau memilih partai yang baru dan memiliki kemiripan dengan partai lama.

Ketiga tipologi pemilih nuro' ulama' (pengikut ulama') ini pemilih mempunyai orientasi ideologi yang sangat kuat dalam pembuatan keputusan politik mereka serta tidak mempedulikan aspek rasional maupun kritis. Pilihan politik mereka didasarkan pada kedekatan nilai, agama, faham, asal-usul, dan sosial-budaya. Pada pemilih jenis ini mereka sudah terbiasa di kultuskan dengan bahasa *Odi' mateh Noro' Ulama'* (hidup mati ikut ulama') artinya mereka mempunyai keyakinan yang sangat kuat, apa yang dikatakan ulama', tingah laku ulama' dan pentunjuk ulama' dalam pilihan politikknya adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Bahwa pertimbangan ia memilih partai karena adanya kedekatan faham dan agama. Kecenderungan pemilih jenis ini menilai bahwa partai politik yang dipilih adalah partai yang memiliki kedekatan faham dengan pemilih, seperti Nahdlatul uluma' atau NU. Kemudian yang bersangkutan juga aktif dalam kegiatan kampanye yang dilaksnakan oleh partai politik atau calon. Pemilih nuro' Ulama' merupakan pemilih yang gampang digerakkan pada masa kampanye, mempunyai loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling gampang dilihat pada pemilih jenis ini. Pemilih nuro' ulama' ini mempunyai orientasi ideologi yang sangat tinggi. Pada pemilih nuro'

Ulama', mereka tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau calon sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih nuro' ulama' sangat mengutamakan kedekatan social-budaya, nilai, Agama paham, usul asal, dan sebagai tolak ukur dalam memilih partai politik. Pada pemilih nuro' Ulama' mereka cenderung memilih partai politik atau calon tersebut mengutamakan figure dan kepribadian pemimpin. Pemilih nuro' Ulama' mereka memilih partai yang didasarkan pada pertimbangan nilai histori dan mitos, sebuah partai politik atau kontestan. Pemilih nuro' ulama' sangat konservatif dalam memegang kepercayaan, paham dan tata nilai yang diyakininya dan mempunyai pendidikan yang relatif rendah. Pada pemilih nuro' ulama' ini yang sangat mudah untuk digerakkan pada waktu pelaksanaan kampanye, dimana pemilih nuro' ulama' ini mempunyai loyalitas tinggi kepada partai politik. Apa yang dikatakan oleh pimpinan partai politik adalah sebuah keharusan atas keyakianan yang sulit dibantah. Pemilih nuro' ulama' ini mempunyai kecenderungan memandang ideologi sebagai suatu dasar utama untuk membuat keputusan dalam pilihan politiknya, serta terkadang kebenarannya sangat sulit untuk digoyahkan.

Ke empat tipologi Pemilih Ta' Ro'nuro' (tidak ikut-ikut) dimana pemilih dangan partai atau calon mempunyai ikatan yang sangat rendah, dengan demikian maka prefensi politiknya sangat kurang. Pemilih ta' ro'nuro' tesersebut mempunyai sikap yang apatis, acuh tak acuh terhadap proses pemilu. Kecenderungan pemilih ta'ro'nurok itu tidak memperdulikan program kerja dan kebijakan partai politik maupun calon serta ideologi partai manapun. bahwa ia tidak terlalu memperdulikan ideologi partai, disamping itu juga ia tiak memperdulikan program kerja dan kebijakan partai politik, mau seperti apa kebijakan dan program kerja partai politik dan calon tidak ia perdulikan. Pemilh ta'ro'nuro' ini tidak memiliki orientasi ideologi tinggi dengan partai politik atau calon, dan tidak menjadikan kebijakan partai sebagai dasar atas pertimbangan untuk memilih partai. Pada

pemilih ta' ro'nuro' itu diamana kemauan utnuk berpartisipasi / atau terlibat dengan partai politik sangatlah kurang.

Pada pemilih ta'ro'nuro'dimana keinginan berpartisipasi atau terlibat dengan partai politik untuk jenis pemilih ta' ro'nuro' ini sangatlah kurang karena ikatan ideologi mereka sangat rendah sekali, mereka juga kurang mempedulikan program kerja dan kebijakan partai politik atau calon. Selain orientasi idiologi yang rendah pemilih jenis ini didominasi oleh golongan putih (golput). Pemilih jenis ini sangat rendah sekali keinginan berpartisipasi didalam pemilu, tidak adanya keinginan dalam menggunakan hak pilihnya. Pada golongan putih (golput) golongan putih tersebut manyoritas adalah pemilih jenis ta'ro'nurok , meskipun yang bersangkutan ikut serta dalam pemilihan biasanya mereka melakukannya secara ramdom atau acak. Faktor pemilu serentak dimana pemilu dilaksanakan bersamaan antara legislatif dan presiden maka pada pemilih ini dalam pilihan politiknya dilakukan secara acak atau randem, seperti dimasing-masing tingkatan (DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten akan berbeda pilihan partai politik dan calonya. Mereka berkeyakinan siapapun, apapun partai atau siapaun calonnya yang terpilih tidak akan membawa bangsa kearah yang lebih baik atau perbaikan menurut harapan mereka.

Berdasarkan pada pemilu serentak 2019 angka ketidakhadiran pemilih sejumlah 95.450 atau 15,93%, satu faktor yang menjadikan orientasi pemilih ta' ro'nuro' sangat lemah dikarenakan mereka kurang tertarik kepada calon kontestan pad pemilu serentak 2019. Selain itu juga perlunya memaksimalkan pendidikan pemilih, edukasi pemilih merupakan hal yang sangat penting dimana pemilu merupakan momen untuk penmenuhan hak sebagai warga Negara yang baik.

Ke lima tipologi pemilih pa pe'sse'an merupakan jenis pemilih yang memiliki orientasi kepada pe'sse' (uang) atau dalam bentuk yang lainnya seperti barang. Jenis pemilih ini masih memandang kedekatan

ideologi partai dan calon dengan pemilih tetapi sudah agak lemah, tidak sekuat pemilih nuro'ulama' atau pemilih fokal. Termasuk juga track record partai politik dan calon dimasa lampau masih menjadi pertimbangan dalam pilihan politiknya. Dalam pandangan pemilih Pa pe'sse'an apa yang dilakukan oleh partai politik dan calon dimasa yang lalu (periode sebelumnya) tetap menjadi pertimbangan, dalam pilihan politik mereka ketika pemilu, akan tetatpi faktor uang masih menjadi pertimbangan kepada partai apa dan siapa calon yang akan dipilihnya. Pada pemilih jenis ini kecenderungan pilihan politiknya selalu berubah-ubah, misalkan ia memilih partai politik pada pemilu 2015 memilih Partai PKB dan pemilu 2019 memilih Partai Golkar. Pilihan politiknya pada setiap pemilu cenderung berubah-ubah, itu didasarkan pada program kerja partai atau calon dan seberapa besar uang yang diterima oleh pemilih. Termasuk juga, pemilih pa pe'sse'an ini mempunyai kecenderungan ikut berpartisipasi dalam kampanye harus ada embel-embelnya, seperti pengganti uang lelah atau pengganti uang bensin. Bahwa pemilih pa pe'sse'an biasanya jika iku kegiatan kampanye selalu ada embel-embel uang bensin atau pengganti uang lelah, ia lebih memilih bekerja jika tidak mendapatkan apa-apa (pe'sse'), karena ia meganggap percuma ikut kampanye jika tidak mendapatkan apa-apa (pe'sse'). Tipologi Pemilih Pa pe'sse'an ini semakin menjamur akibat dari praktik amae'n pe'sse' (main uang) yang dilakukan oleh partai politik, calon atau tim sukses. Praktik amae'n pe'sse' tidak bisa dihindari lagi, siring dengan sistem pemilu (pemilihan langsung oleh rakyat) dimana pemilih bisa secara memilih wakil-wakilnya yang akan duduk diparlemen. Kekuatiran yang sangat berlebihan dari partai politik dan calon legislatif tidak akan dipilih dalam pemilu, sehingga mereka juga berlomba-lomba mencari simpatik pemilih termasuk didalamnya menggunakan praktik amae'n pe'sse' (main uang). Praktik amae'n pe'sse' tidak bisa dielakkan lagi, seiring dengan semakin runtuhnya ikatan ideologi partai politik atau calon legislatif dengan pemilih, orientasi pemilih semakin pragmatis, ia mendasarkan pilihan politiknya atas seberapa besar uang yang diberikan oleh partai

politik atau calon, maka itu kemungkinan besar yang akan dipilih dalam pemilu.

Secara garis besar berdasarkan tipologi yang sudah dijabarkan diatas terdapat lima tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowso, yaitu tipologi pemilih pe'nte'r, tipologi pemilih Nuro' Uama', tipologi pemilih pemilih fokal tipologi pemilih ta' ro'nuro' dan tipologi pemilih pa pe'sse'an. Yang membedakan antara tipologi yang ada adalah pada derajat masing-masing tipologi pemilih, maka tipologi pemilih yang mendominasi pada pemilu serentak di Kabupaten Bondowoso adalah tipologi nuro' ulama'. Sebagaimana kita ketahui diwilayah tapal kuda terkhusus di Kabupaten Bondowoso mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam dengan latar belakang Nahdiyin yang memiliki kecenderungan pilihan politiknya kepada partai politik yang memiliki kedekatan ideology, faham, agama yang biasa disebut sebagai pemilih nuro' ulama'. Pemilih nuro' ulama' mempunyai orientasi ideologi yang sangat tinggi, Pemilih jenis ini tidak terlalu memandang kebijakan partai politik atau calon sebagai sesuatu yang mendasar, penting dalam proses pengambilan keputusan. Pemilih nuro' ulama' sangat mengutamakan kedekatan Agama, nilai, paham, social-budaya, asal usul, dan sebagai ukuran dalam memilih partai politik. Pemilih jenis ini mengutamakan nilai, mitos, figure dan kepribadian pemimpin dan histori sebuah partai politik atau calon. Pemilih jenis ini biasanya memiliki pendidikan yang relatif rendah dan sangat konservatif dalam memegang paham nilai yang dianut. Pemilih nuro' ulama' yang sangat mudah digerakkan selama masa kampanye. Pemilih nuro' ulama' memiliki loyalitas tinggi, apa yang disampaikan oleh ketua umum/pimpinan partai adalah sebuah keyakianan yang diyakini kebenarannya dan sulit digeser. Sebagai pemilih nuro' ulama' yang mayoritas pemilihnya berlatar belakang Nahdiyin maka kiyai sangat memberikan pengaruh dalam menentukan pilihan politiknya kepada partai politik untuk dipilih dalam pemilihan umum. Terkait ideologi dalam

pandangan nuro' ulama' sebagai suatu pedoman atau dasar dalam membuat pilihan serta bersikap, terkadang kebenarannya tidak bisa digoyahkan. Kecenderungan pemilih ini dalam menentukan pilihan politiknya kepada partai politik seperti PKB atau PPP. Kiyai masih menjadi panutan sekaligus simpul pengendali, ia dapat memberikan petunjuk terhadap pilihan politik masyarakat, dan ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat patrimonial dengan pola sosial *Patron–Clien*. Kiyai atau ulama-ulama sebagai patron yang sangat dihormati sekaligus akan menjadi panutan dalam kehidupan spiritualnya dalam bentuk pengejewantahan nilai penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bondowoso terkhusus masyarakat pesantren atau santri. Ini secara tidak langsung diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi yang kemudian diperkuat dengan kegiatan keagamaan yang marak seperti acara pengajian Sholawatan, istighosah, yasinan, tibaan, ziarah kemakam wali songo dan kegiatan keagamaan lainnya yang mempunyai karakteristik yang mudah dilihat dan diamati dari kelompok ini yang membedakan dengan kelompok lainnya. Namun seiring perjalanan waktu, dengan semakin terbukanya akses informasi maka pemilih jenis ini berangsur-angsur mengalami perubahan. Kiyai sebagai *patron* dan masyarakat (santri) sebagai *clien*, tidak kemudian semerta-merta apa yang disampaikan kyai atau menjadi petunjuk dalam pilihan politik kemudian dijalankan begitu saja. Dalam kontek ini ada pergeseran tipologi pemilih yang semula memiliki tipologi pemilih tradisional bergeser kepada tipologi pemilih jenis pa pe'sse'an.

Melihat pada fenomena pada pergeseran tipologi nuro'ulama' menjadi tipologi pemilih pa pe'sse'an tersebut diperkuat dengan hasil rekapitulasi KPU kabupaten Bondowoso tahun 2009 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 23 kursi, kemudian pada tahun 2009 mendapatkan 6 kursi, pada pemilu 2014 mendapatkan 12 kursi dan pada tahun 2019 mendapatkan 14 kursi. Dari data ini PKB mendominasi perolehan kursi pada pemilu 2004 yaitu 23 kursi dibandingkan perolehan

partai yang lain, perolehan kursi ini mendominasi lebih dari 50% dari total kursi yaitu 45 kursi di DPRD. Sementara itu mengalami penurunan perolehan kursi pada tahun 2009 yang hanya memperoleh 6 kursi dan kembali mengalami kenaikan kursi ditahun 20014 yaitu 12 kursi kemudian pada pemilu tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 14 kursi. Jika kita analisa dari data perolehan kursi diatas, bahwa puncak perolehan kursi PKB itu berada pada tahun 2004 dengan 23 kursi, jika dibandingkan dengan perolehan kursi periode penyelenggaraan pemilu terakhir yaitu 14 kursi tentu masih sangat jauh perolehan kursinya dibandingkan pada pemilu 2009. Artinya jika kita bandingkan antara perolehan kursi PKB di 2004 dengan pemilu 2019 , partai ini telah mengalami pengurangan perolehan kursi 9 kursi. Sementara perolehan partai politik yang berideologi nasionalis/pancasila cenderung stabil memperoleh kursi dalam pelaksanaan pemilu, misalkan perolehan partai PDIP pada pemilu 2004 mendapatkan 6 kursi, pemilu 2009 mendapatkan 5 kursi, pemilu 2014 mendapatkan 8 kursi dan pada pemilu 2019 mendapatkan 7 kursi, perolehan kursi di DPRD partai ini cenderung stabil, baik kenaikan perolehan kursi dan penurunan perolehan kursinya. Termasuk juga partai Golkar, pada pemilu 2004, memperoleh 7 kursi, pemilu 2009 memperoleh 4 kursi, dan pada pemilu 2014 memperoleh 5 kursi, kemudian pada pemilu 2019 memperoleh kursi 6 kursi. Termasuk juga partai-partai yang lain dalam memperoleh kursi dalam setiap pelaksanaan pemilu cenderung stabil, jika pun mengalami kenaikan perolehan kursi berkisar mendapatan penambahan 1 kursi, demikian juga jika mengalami penurunan perolehan kursi hanya berkisaran 1 kursi. Jika dibandingkan dengan perolehan kursi PKB pada pemilu 2004 mendapatkan 23 kursi kemudian pada pemiu 2019 hanya mendapatkan 14, tentu ini penurunan kursi yang sangat drastis, artinya dari data ini ada pengurangan 9 kursi.

Maka jika dilihat dari perolehan partai politik diatas khususnya PKB yang sebelumnya sangat mendomininasi dalam memperoleh 23 kursi

pada pemilu 2004 dan mengalami penurunan ditahun 2019 hanya memperoleh 14 kursi. Maka berdasarkan fenomena tersebut dan jika dikaitkan dengan tipologi pemilih di Kabupaten Bondowoso, maka ada pergeseran tipologi pemilih dari semula bertipologi pemilih nuro' ulama' bergeser kepada tipologi pemilih pa pe'sse'an dikarenakan maraknya praktik amae'n pe'sse' sehingga pemilih ini dalam menentukan pilihan politiknya didasarkan pada siapa yang memberikan pe'sse' (uang), baik berbentuk barang atau uang kepada pemilih tersebut, atau seberapa besar nominal uang yang diterima pemilih itu yang akan dipilih dalam pemilu.

6.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tipologi Pemilih Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso

Adanya beberapa tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: 1) faktor karakteristik pemilih, diamana faktor ini didasarkan pada faktor kondisi sosial budaya dan sistem nilai, faktor pendidikan dan ekonomi dan faktor kekerabatan/kekeluargaan, 2) faktor Media Massa, 3) faktor karakteristik partai politik dan calon, 4) faktor amae'n Pe'sse'.

Faktor pemilih sendiri dapat digambarkan sebagai kondisi awal pemilih yaitu memiliki karakteristik yang melekat pada pemilih. Karakteristik pemilih merupakan faktor pendorong, sehingga seseorang dapat berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih partai atau calon. Pemilih ini berwatak sosial yang memiliki kepekaan sosial terhadap permasalahan sosial-ekonomi dan sosial-budaya tersebut dapat dilihat dari aktivitas politiknya dalam pemilu. Pada dasarnya mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun sebagaian besar dari mereka pada umumnya memiliki kesadaran dalam berpartisipasi untuk memilih partai politik atau calon legislatif. Ini juga diperkuat dengan data partisipasi pemilih pada pemilu serentak di Kabupaten Bondowoso yang mencapai 84%. Faktor karakteristik pemilih itu dipengaruhi oleh faktor:

faktor kondisi sosial budaya dan sistem nilai. Kondisi sosial budaya dan sisten nilai menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tipologi pemilih. Karakteristik sosial budaya pemilih seperti lingkungan sosial itu mempengaruhi tipologi pemilih dalam penagmbilan keputusan untuk memilih partai atau calon. Faktor lingkungan sangat berpengaruh, dimana pemilih tinggal dan berinteraksi sangatlah penting, seperti kondisi nilai tradisional dan kehidupan sosial budaya mereka. Apa yang terjadi pada cara berfikir dan pola bertindak setiap pemilih dipengaruhi oleh dilingkungan eksternal pemilih itu tinggal. Dalam lingkungan keluarga, pemilih misalnya dibesarkan dalam keluarga yang memiliki ideologi Islam, maka terdapat kecenderungan individu tersebut untuk menganbil ajaran Islam tersebut, karena mereka sudah terbiasa dengan prinsp ke-Islaman pada kehidupan sehari-hari mereka. Mayoritas pemilih yang ada dikabupaten Bondowoso menganut Islam Ahlussunah Waljama'ah atau Nahdlatul Ulama' (NU). Maka tradisi ala NU sangatlah mempengaruhi tata nilai dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Setiap pemilih memiliki dan mewarisi kepercayaan serta tata nilai yang berbeda satu sama lainnya. Mayoritas pemilihnya berlatar belakang Nahdiyin maka kiyai sangat memberikan pengaruh dalam menentukan pilihan politiknya kepada partai politik untuk dipilih dalam pemilihan umum. Dengan faktor ini kemudian Pemilih memandang ideologi sebagai suatu dasar dalam mengambil keputusan serta bertindak, acapkali terkadang ideologi tersebut memiliki kebenaran tidak bisa diganggu gugat Kecenderungan pemilih ini dalam menentukan pilihan politiknya kepada partai politik seperti PKB atau PPP. Kiyai masih menjadi simpul yang dapat mengendalikan terhadap prefensi dan pilihan politik mereka, dan ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat patrimonial dengan pola sosial *Patron–Clien*. Kiyai ataupun ulama-ulama sebagai patron yang sangat dihormati sekaligus akan menjadi panutan dalam kehidupan keseharian mereka baik pada sisi spiritualnya baik dalam bentuk pengejewantahan nilai penting pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Bondowoso terkhusus pesantren. Ini secara tidak langsung

diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi yang kemudian diperkuat dengan kegiatan keagamaan yang marak seperti acara pengajian, Sholawatan, istighosah, yasinan, tibaan, ziarah kemakam wali songo dan kegiatan keagamaan lainnya yang merupakan karakteristik yang mudah dilihat, diamati pada kelompok ini yang tidak sama dengan kelompok yang lainnya. Faktor pendidikan dan ekonomi mempengaruhi tipologi pemilih, Pemilih yang tidak mempunyai pendidikan tinggi akan condong mengunakan aspek non-rasional dalam menentukan pilihan. Faktor kedekatan emosional pemilih isu, rumor, serta opini publik terkait partai politik dan calon merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan terhadap pilihan politiknya. Masing–masing indiividu mempunyai kemampuan untuk tidak sama antara satu pemilih dengan pemilih lainnya, ini akan sangat mempengaruhi dalam proses menetukan pilihan. Taraf ekonomi pemilih dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pemilih dalam membuat keputusan dalam pilihan politiknya kepada partai politik atau calon. Sementara itu pemilih yang memiliki pendidikan tinggi akan condong sangat selektif dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang mereka peroleh tidak kemudian semerta-merta langsung diterima, namun mereka akan memverifikasi, melakukan kroscek apa informasi itu sumber dari referensi yang dapat dipercaya ataukah tidak. Faktor kekrabatan atau kekeluargaan dapat mempengaruhi tipologi pemilih di Kabupaten Bondowoso. Pemilih yang ada di Kabupaten Bondowoso sangat menjunjung tinggi kekerabatan atau kekeluargaan. Sistem kekeluargaan dan kekerabatan pada pemilih di Kaupaten Bondowoso sangatlah kuat, seperti dalam kehidupan keseharian mereka, budaya gotong royong masih sangat melekat pada aktivitas sehari-hari, seperti saling membantu dalam membangun rumah, bercocok tanam, sehingga ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan maka tidak segan-segan keluarga yang lain akan membantunya, meskipun yang berangkutan tidak secara langsung meminta pertolongan. Faktor kekerabatan atau kekeluargaan juga bukan hanya ditonjolkan dalam aktivitas keseharian mereka dalam kehidupan bermasyarakat, namun dalam

pilihan politik mereka juga dipengaruhi oleh faktor kekerabatan atau kekeluargaan. Pemilih yang mengedeepankan faktor kekeluargaan atau kekerabatan ini mempunyai kecenderungan pilihan politiknya dalam pemilu akan memilih partai atau calon yang masih ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Pemilih di Kabupaten Bondowoso akan memilih partai atau calon karena mementingkan faktor kekerabatan atau kekeluargaan. Pemilih lebih memperioritaskan hubungan kekeluargaan dalam pilihan politik mereka dibandingkan harus memilih partai atau calon yang tidak memiliki hubungan keluarga. Masyarakat di Kabupaten Bondowoso, yang nerupakan suku madura pandalungan, sangatlah mempertimbangkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilu.

Faktor Media Massa, Media massa yang mempengaruhi pemilih, bahwa kemampuan media massa untuk menyebarkan informasi merupakan kekuatan untuk membentuk opini publik. Lokasi geografis juga mempengaruhi cara pemilih dalam menganalisa informasi, pemilih yang hidup didaerah kota cederung sudah terbiasa dengan beragam informasi yang bervariatif dibandingkan dengan pemilih yang tinggal dipedesaan.Maka seberapa besar opini publik tersebut didasarkan oleh seberapa luas informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketika pemberitaan media massa terhadap partai politik bersifat positif, maka masyarakat cenderung menilai partai tersebut positif. Dan juga sebaliknya jika media massa ramai-ramai memberitakan keburukan partai politik, maka masyarakat cenderung menilai partai atau kontestan tersebur negatif. Korelasi partai politik dan media massa tidak selalu netral dan objektif, bahkan terkadang mempuyai kecondongan dalam memberikan deskripsi berita dan informasi terkait partai politik dan calon, Faktor- faktor biasnya informasi tersebut disebabkan karena wartawan dan jurnalis yang menulis berita memiliki sistem nilai, moralitas, memiliki tingkat pendidikan dan budaya yang dapat mempengaruhi analisis terhadap berita yang ditulis.

Bahkan, diperparah lagi dengan adanya media massa dan wartawan tersebut telah nyata berpihak pada suatu partai tertentu karena memang menjadi simpatisan atau kader partai politik tertentu. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan media yang biasanya mereka lihat adalah TV, Media elektoronik dan sosial media.

Faktor karakteristik partai politik dan calon, partai politik memiliki atribut seperti citra, reputasi, image, ideologi dan latar belakang serta kualitas para politikusnya dan calonnya akan mempengaruhi penilain masyarakat. Seringkali masyarakat mencampuradukan antara kualitas kontestan dengan partai politik yang menjadi kedaraannya. Aktivitas dan perilaku para politikus partai politik sangat mudah dinilai oleh masyarakat melalui kualitas program kerja, orasi, kepedulian, sikap yang ditunjukkannya sebagai barometer sebuah partai politik. Bahwa pembangunan brands image, citra terhadap partai politik atau calon legislatif dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dan merupakan hasil dari akumulasi inforamasi serta kinerja nyata dalam jangka waktu yang relatif lama. Disinilah fungsi ketua umum/pimpinan dalam partai politik sangat dibutuhkan, Seorang pimipinan bisa memberikan deskripsi dan arahan yang jelas tentang kualitas partainya. Demikian ini sangat berguna bagi pemilih ketika yang bersangkutan dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainly) tentang partai apa yang akan dipilih. Pemilih dikabupaten bondowoso, yang mempunyai orientasi kedekatan ideologi partai menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan politik pemilih, suatu contoh pemilih yang memiliki faham Islam Ahlussunah waljama'ah atau NU akan memilki kecenderungan untuk memilih partai yang memiliki platform NU seperti PKB dan PPP. Sementara itu pemilih yang memiliki faham nasional ada kecenderungan untuk memilih partai nasionalis, seperti PDI-P, Golkar dan yang lainnya. Selain itu maka faktor track record partai politik dan calon terpilih selama masa ia menjabat akan senantiasa diananlisis dan dicermati oleh pemilih, sampai sejauhmana kepedulianya dalam penyelesaian

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang terkahir adalah program kerja yang ditawarkan oleh partai politik dan calon pada saat kampanye. Seberapa menariknya program yang ditawarkan dapat mencari simpati pemilih, sehingga dapat memilih partai dan calonnya tersebut. Kecenderungan penilaian pemilih, terhadap partai atau kontestan, jika dinilai baik maka kemunginan dipilih kembali, sementara jika penilaian pemilih urang baik maka kemungkinan besar tidak akan dipilih kembali pada pemilu 2019. Faktor amae'n Pe'sse', merupakan fenomena pada masyarakat dipemilu serentak 2019 yang sangat sulit dihentikan dan justru menjadi kebiasaan atau tradisi yang tidak bisa dielakkan yang dilakukan oleh partai politik atau calon legislatif untuk meraih simpati dan dukungan suara terbanyak dari pemilih. Fenomena amae'n pe'sse' sebagai interaksi sosial antara individu dengan partai politik atau calon dalam pelaksanaan pemilu. Pemilih sebagai actor sosial dapat mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang didapat dalam praktik politik uang, sehingga menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu. Praktik amae'n pe'sse' terjadi pada pemilu serentak 2019 dikabupaten bondowoso diakibatkan oleh keterbatasan ekonomi, Mayoritas masyarakat bondowoso yang mayoritas berada pada garis kemiskinan membuka peluang terjadinya praktik politik uang. Berasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 yang berada pada garis kemiskinan adalah 380.350, sedangkan jumlah penduduk miskin adalah 103.330 atau 13,33%. Sementara itu pada tahun 2020 penduduk yang berada pada garis kemiskinan adalah 408.352, sedangkan jumlah penduduk miskin adalah 110.240 atau 14.17%. Kemiskinan membuat pemilih tidak dapat lagi berfikir rasional untuk mendapatkan sejumlah imbalan uang dari partai politik atau kontestan. Selanjutnya adalah faktor rendahnya pendidikan, kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Bondowoso masih relative rendah. Rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan rendahnya pengetahuan terhadap politik dan efek atau hukuman bagi pelaku praktik maney politik. Rendahnya pengetahuan pemilih dalam praktik money politik itu bisa

terjadi. Praktik amae'n pe'sse' itu terjadi dalam pemilu serentak 2019. Mereka yang mengetahui adanya praktik money politik tidak memiliki keberanian untuk melaporkan. Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh Bawaslu ada 28% menerima dan menghendaki praktik amae'n pe'sse'. Rendahnya pemahaman pemilih menjadi factor utama, mereka tidak memamhmi bahwa amae'n pe'sse' itu dilarang. Bahwa praktik amae'n pe'sse' itu ada, akan tetapi prose pembuktiannya itu sulit untuk membuktikan. Para pelaku politik itu lebih rapi, dia punya metode dan banyak cara melakukan amae'n pe'sse'. Perspektif hukmnya pasti dipidana, baik penerima atau pemberi pada praktik amae'n pe'sse'. Praktik amae'n pe'sse' berkaitan dengan pandangan pemilih yang harus dibarengi dengan pendidikan politik. Praktik amae'n pe'sse' itu menciderai demokrasi, merampas hak politik seseorang dengan menukar hak pemilih dengan uang, maknanya amae'n pe'sse' itu luas, termasuk menjanjikan sesuatu itu termasuk kategori amae'n pe'sse'. Bahwa berubahnya tipologi pemilih dari pemilih militan partai politik menjadi pemilih pragmatis itu diakibatkan oleh pemahaman pemilih bahwa memilih calon itu hanya sekedar mengantarkan seseorang untuk menjadi anggota DPRD, dan mereka mendapatkan penghasilan, sementara pada sisi pemilih sendiri mendapatkan apa. Disisi yang lain, pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman akan pentingnya politik. Pemilih pa pe'sse'an itu diakibatkan oleh praktik amae'n pe'sse' yang dilakukan oleh semua partai politik, calon dan tim sukses. Bahwa Pendidikan politik merupakan proses pencerdasan terhadap pemilih, bagaimana menjadi pemilih pe'nte'r, dan mendukung partai dan calon bukan berdasarkan aspek like and dislike dan non rasional, bagaimana pemilih memilih berdasarkan tawaran program kerjanya seperti digolkar ada program karya kekaryaan kepada masyarakat umum berdasarkan faktor rasionalitas. Praktik amae'n pe'sse' memang kita tidak bisa munafik dalam pemilu, sejak pemilu menggunakan system dipilih secara langsung untuk memilih anggota DPRD, maka disitulah visi-misi partai dan caleg yang sifatnya ideologis runtuh, sehingga pendekatan caleg

amae'n pe'sse', hampir tidak ada caleg yang tidak amae'n pe'sse', meskipun tidak semuanya menggunakan uang dan ada juga barang. Praktek jual beli suara tidak bisa dibohongi dengan segala macam kemasan sudah bukan rahasia umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahawa praktik amae'n pe'sse' biasanya terjadi pada waktu pelaksanaan kampaye, baik kampanye tertutup atau pada kegiatan kampanye terbuka. Proses memobilisai pemilih untuk hadir pada kegiatan kampanye di kita sering dipertontonkan dengan praktik amae'n pe'sse' baik berupa uang bensin, uang lelah, kerudung dan sembako. Partai politik dan calon legislatif seolah-olah berlomba-lomba dalam mencari simpatik untuk meraih dukungan pemilih. Selanjutnya praktik amae'n pe'sse' terjadi pada malam hari atau dini hari yang biasa kita sebut dengan istilah "serangan fajar. Kemudian yang terakhir pada praktik amae'n pe'sse' biasanya terjadi pada hari pelaksanaan pemungutan suara, ketika pemilih akan menuju Tempat pemungutan suara (TPS), dimana para tim sukses bergerilya mencari pemilih yang masih belum hadir ke TPS dan memungkinkan untuk dilobby untuk mendukung partai dan calonnya dengan diberikan pe'ssse' (uang). Pemilih tersebut rata-rata mereka pernah mendapatkan imbalan, baik dalam bentuk barang atau uang sebagai bentuk imbal balik dukungan dan pilihan kepada partai politik atau calon. Praktik amae'n pe'sse'yang lumrah dalam masyarakat seperti tongket atau settong se'ke't (1 suara 50.000) atau tong tos, se'ttong saratos (1 suara 100.000) yang besarannya berfariasi antara 25.000, 35.000, ada yang 50.000 atau bahkan lebih dari 100.000, tegantung sampai sejauh mana kesepakatan yang dibangun antara partai politik atau kontestan dengan pemilih tersebut.

6.3. Implikasi Teoritik

Implikasi teoritik yang berdasarkan beberapa teori dan pendapat para ahli yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Bahwa penelitian tentang tipologi pemilih pada pemilu, maka Pemilih dalam pengambilan keputusan, selalu dihadapkan dengan pilihan yang rasional atau tidak

rasional yang menurut Weber membedakan rasionalitas nilai (*value-rationallity*) dengan rasionalitas tujuan (*goal-rationallity*). Rasionalitas nilai diartikan sebagai orientasi aksi berdasarkan suatu nilai apakah itu etika, moralitas, agama, hal-hal yang bersifat estetika, kesukaan, atau asal usul. Rasionalitas individu diukur dari sejauhmana dalam mengambil keputusan atas nilai-nilai yang ia pegang dan bukan dari tujuan yang hendak ia capai. Sementara iru rasionalitas tujuan merupakan kesesuain dengan tujuan akhir yang didasarkan pada orientasi keputusan dan aksi. Metode pencapainnya dan konsekuensi individu akan dinilai rasional ketika keputusan dan aksinya mendukung tujuan akhir.

Sementara itu Firmanzah membagi tipologi pemilih kedalam kelompok-kelompok: tipologi pemilih rasional, tipologi pemilih tradisional, tipologi pemilih kritis dan tipologi pemilih skeptis. Kemudian firmanzah menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tipologi pemilih meliputi:faktor kondisi awal pemilih, faktor media massa dan faktor partai politik atau kontestan.

Apabila penelitian ini dikaitkan dengan teori yang telah dijelaskan diatas, maka tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di kabupaten, meliputi: tipologi pemilih pe'nte'r, tipologi pemilih nuro' ulama', tipologi pemilih fokal, tipologi pemilih ta' ro'nuro' dan tipologi pa pe'sse'an. Mayoritas pemilih di kabupaten memiliki tipologi nuro'ulama'. Namun dalam perjalannya terjadi pergeseran tipologi, yaitu dari tipologi nuro'ulama' kepada tipologi pa pe'sse'an. Adapun faktor yang mempengaruhi tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso adalah 1) faktor karakteristik pemilih yang meliputi: faktor kondisi sosial budaya dan sistem nilai, faktor pendidikan dan ekonomi, faktor kekerabatan atau kekeluargaan, 2) faktor edia Massa, 3) faktor karakteristik partai politik atau calon legislatif dan 4) faktor amae'n pe'sse'.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan , yang terdiri dari:

1. Tipologi Pemilih Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bondowoso, terdiri dari: tipologi pemilih pe'nte'r, tipologi pemilih nuro' ulama', tipologi pemilih fokal, tipologi pemilih ta' ro'nuro' dan tipologi pemilih pa pe'sse'an.
2. Tipologi pemilih pe'nte'r (pintar atau cerdas), pada pemiih ini, mereka tidak begitu mementingkan rasa fanatisme pada partai politik tertentu maupun calon, Pada pemilih pe'nte'r kecenderungan mereka akan melihat apa yang telah dilakukan oleh partai politik atau seorang calon sebelumnya dengan hitungan untung rugi. Pemilih pe'nte'r akan selalu menjadikan pertimbangan pengalaman selama masa jabatan sebelumnya, sebagai tolak ukur apakah partai politik atau calon itu konsisten atas apa yang sudah dijanjikan pada program kerja atau janji politiknya. Keberhasilan partai politik dan calon dalam memperjuangkan program pro rakyat senantiasa akan diapresiasi oleh pemilih dengan memberikan dukungan suara pada pemilu berikutnya, sebaliknya kegagalan dalam memperjuangkan aspirasi program pro rakyat sebagaimana janji politiknya akan cenderung untuk tidak dipilih lagi. Pada pemilih Pe'nte'r ini dimana mereka akan memperhitungkan untung dan rugi ketika menjatuhkan pilihan politik mereka atas pilihan kepada partai politik atau calon legislatif. Pertimbangan-pertimbangan apakah partai politik mempunyai tawaran program yang bagus, pro rakyat yang akan ia jalankan selama 5 tahun yang akan datang (dalam masa periode jabatan). Disamping pertimbangan untung dan rugi, pada pemilih pe'nte'r ini, dimana mereka akan melakukan urutan dan alternatif prefensi pilihan politik kepada partai politik calon,

apakah dia akan memilih PKB, PDI, Golkar atau partai yang lainnya. Pertimbangan-pertimbangan sebagai mana urutan prefensi pilihan politik mereka, ia akan melihat pada track record atau rekam jejak partai poliitk pada masa sebelumnya atau masa lalu dan tawaran program kerja pada masa kampanye. Pemilih Pe'nte'r pada pemilu 2019 di Kabupaten Bondowoso, secara notabene sudah melek politik, informasi-informasi terkait perkambangan politik daerah selalu mereka ikuti baik dalam partisipasi langsung pada waktu kampanye atau melalui akses informasi dimedia massa dan elektronik. Pemilih pe'nte'r ini jika didasarkan pada basis pemilih, mereka yang memiliki pendidikan relatif tinggi. Pada pemilih Pe'nte'r ini, mereka sudah terbiasa dengan keberagaman infromasi yang bervariasi dan kontradiktif, ia mampu memilah-milih mana informasi yang bersumber dari sumber yang dapat dipercaya ataukah tidak. Proses chek dan rechek terhadap kebenaran suatu informasi akan ia lakukan sampai menemukan informasi yang akurat.

3. Tipologi pemilih fokal merupakan pemilih yang senantiasa kritis dalam mencermati terkait dengan ideologi partai politik atau calon dengan kebijakan partai yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilakukan untuk 5 tahun yang akan datang, sehingga mereka akan selalu memiliki keinginan memperbaiki kenerja dan kebijakan partai politik dan calon . Pada pemilih fokal ia dalam menentukan pilihannya dengan menganalisis ideologi dari partai tersebut dan kebijakan partai politik dan calonnya akan permasalahan yang dihadapi. Pada pemilih jenis ini, pemilih tidak akan segan-segan untuk memberikan kritik atau masukan kepada partai atau calon, jika kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ketika harapan pemilih tidak sesuai dengan kenyataan maka mereka kan memindahkan pilihan politiknya pada partai politik atau calon lainnya
4. Tipologi pemilih nuro' ulama' (pengikut ulamak), Pada tipologi nuro' ulama' mempunyai orientasi ideologi yang sangat tinggi dalam pengambilan keputusan politik mereka serta tidak mempedulikan aspek rasional maupun kritis. Pilihan politik mereka didasarkan pada kedekatan

nilai, agama, faham, asal-usul, dan sosial-budaya. Pada tipologi pemilih nuro' ulama' ini mereka sudah terbiasa di kultuskan dengan bahasa *Odi' mateh Noro' Ulama'* (hidup mati ikut ulama') artinya mereka mempunyai keyakinan yang sangat kuat, apa yang dikatakan ulama', tingah laku ulama' dan pentunjuk ulama' dalam pilihan politikknya adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Bahwa pertimbangan ia memilih partai karena adanya kedekatan faham dan agama. Kecenderungan pemilih jenis ini menilai bahwa partai politik yang dipilih adalah partai yang memiliki kedekatan faham dengan pemilih, seperti Nahdlatul uluma' atau NU. Kemudian yang bersangkutan juga aktif dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik atau calon. Pemilih nuro' Ulama' merupakan pemilih yang gampang dimobilisasi pada masa kampanye, mempunyai loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri yang paling tampak pada pemilih jenis ini. Pada pemilih nuro' Ulama', mereka tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau calon sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih nuro' ulama' sangat mengutamakan kedekatan Agama, paham, nilai, social-budaya, dan usul asal sebagai tolak ukur dalam memilih partai politik. Pada pemilih nuro' Ulama' mereka cenderung memilih partai politik atau calon tersebut mengutamakan figure dan kepribadian pemimpin. Pemilih nuro' Ulama' mereka memilih partai yang didasarkan pada pertimbangan nilai histori dan mitos sebuah partai politik atau calon legislatif. Pemilih nuro' ulama' mempunyai pendidikan yang relatif rendah dan sangat konservatif dalam memegang kepercayaan, tata nilai dan paham yang diyakininya.

5. Tipologi Pemilih Ta' Ro'nuro' (tidak ikut-ikut) dimana pemilih dangan partai atau calon mempunyai ikatan yang sangat rendah, dengan demikian maka prefensi politiknya sangat kurang. Pemilih ta' ro'nuro' tesersebut mempunyai sikap yang apatis, acuh tak acuh terhadap proses pemilu. Kecenderungan pemilih ta'ro'nurok itu tidak memperdulikan program kerja dan kebijakan partai politik maupun calon serta ideologi partai manapun. bahwa ia tidak terlalu memperdulikan ideologi partai, disamping itu juga ia

tiak memperdulikan program kerja dan kebijakan partai politik, mau seperti apa kebijakan dan program kerja partai politik dan calon tidak ia perdulikan. Pemilh ta'ro'nuro' ini tidak memiliki orientasi ideologi tinggi dengan partai politik atau calon, dan tidak menjadikan kebijakan partai sebagai dasar atas pertimbangan untuk memilih partai. Pada pemilih ta' ro'nuro' itu diamana kemauan utnuk berpartisipasi / atau terlibat dengan partai politik sangatlah kurang. Pada pemilih ta'ro'nuro'dimana keinginan berpartisipasi atau terlibat dengan partai politik untuk jenis pemilih ta' ro'nuro' ini sangatlah kurang karena ikatan ideologi mereka sangat rendah sekali, mereka juga kurang mempedulikan program kerja dan kebijakan partai politik atau calon. Selain orientasi idiologi yang rendah pemilih jenis ini didominasi oleh golongan putih (golput). Pemilih jenis ini sangat rendah sekali keinginan berpartisipasi didalam pemilu, tidak adanya keinginan dalam menggunakan hak pilihnya. Pada golongan putih (golput) golongan putih tersebut manyoritas adalah pemilih jenis ta'ro'nurok , meskipun yang bersangkutan ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara biasanya mereka melakukannya secara ramdom atau acak. Mereka berkeyakinan siapapun, apapun partai atau siapaun calonnya yang terpilih tidak akan membawa bangsa kearah yang lebih baik atau perbaikan menurut harapan mereka.

6. Tipologi pemilih pa pe'sse'an merupakan jenis pemilih yang memiliki orientasi kepada pe'sse' (uang) atau dalam bentuk yang lainnya seperti barang. Jenis pemilih ini masih memandang kedekatan ideologi partai dan calon dengan pemilih tetapi sudah agak lemah, tidak sekuat pemilih nuro'ulama' atau pemilih fokal. Termasuk juga track record partai politik dan calon dimasa lampau masih menjadi pertimbangan dalam pilihan politiknya. Dalam pandangan pemilih Pa pe'sse'an apa yang dilakukan oleh partai politik dan calon dimasa yang lalu (periode sebelumnya) tetap menjadi pertimbangan, dalam pilihan politik mereka ketika pemilu, akan tetatpi faktor uang masih menjadi pertimbangan kepada partai apa dan siapa calon yang akan dipilihnya. Pada pemilih jenis ini kecenderungan pilihan politiknya selalu berubah-ubah, misalkan ia memilih partai politik

pada pemilu 2015 memilih Partai PKB dan pemilu 2019 memilih Partai Golkar. Pilihan politiknya pada setiap pemilu cenderung berubah-ubah, itu didasarkan pada program kerja partai atau calon dan seberapa besar uang yang diterima oleh pemilih. Termasuk juga, pemilih pa pe'sse'an ini mempunyai kecenderungan ikut berpartisipasi dalam kampanye harus ada embel-embelnya, seperti pengganti uang lelah atau pengganti uang bensin. Bahwa pemilih pa pe'sse'an biasanya jika iku kegiatan kampanye selalu ada embel-embel uang bensin atau pengganti uang lelah, ia lebih memilih bekerja jika tidak mendapatkan apa-apa (pe'sse'), karena ia meganggap percuma ikut kampanye jika tidak mendapatkan apa-apa (pe'sse'). Tipologi Pemilih Pa pe'sse'an ini semakin menjamur akibat dari praktik amae'n pe'sse' (main uang) yang dilakukan oleh partai politik, calon atau tim sukses. Praktik amae'n pe'sse' tidak bisa dihindari lagi, siring dengan sistem pemilu (pemilihan langsung oleh rakyat) dimana pemilih bisa secara memilih wakil-wakilnya yang akan duduk diparlemen. Kekuatiran yang sangat berlebihan dari partai politik dan calon legislatif tidak akan dipilih dalam pemilu, sehingga mereka juga berlomba-lomba mencari simpatik pemilih termasuk didalamnya menggunakan praktik amae'n pe'sse' (main uang). Praktik amae'n pe'sse' tidak bisa dielakkan lagi, seiring dengan semakin runtuhnya ikatan ideologi partai politik atau calon legislatif dengan pemilih, orientasi pemilih semakin pragmatis, ia mendasarkan pilihan politiknya atas seberapa besar uang yang diberikan oleh partai politik atau calon, maka itu kemungkinan besar yang akan dipilih dalam pemilu.

Secara garis besar berdasarkan tipologi sebagaiaman dalam simpulan ini, dari tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bondowso, yaitu tipologi pemilih pe'nte'r, tipologi pemilih Nuro' Uama', tipologi pemilih pemilih fokal, tipologi pemilih ta' ro'nuro' dan tipologi pemilih pa pe'sse'an. Yang membedakan antara tipologi yang ada adalah pada derajat masing-masing tipologi pemilih, maka tipologi

pemilih yang mendominasi pada pemilu serentak di Kabupaten Bondowoso adalah tipologi nuro' ulama'. Kabupaten Bondowoso berada diwilayah tapal kuda terkhusus di Kabupaten Bondowoso mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam dengan latar belakang Nahdiyin yang memiliki kecenderungan pilihan politiknya kepada partai politik yang memiliki kedekatan ideology, faham, agama yang biasa disebut sebagai pemilih nuro' ulama'. Terkait ideologi dalam pandangan pemilih nuro' ulama' sebagai suatu fondasi atau dasar dalam mengambil keputusan dalam bersikap dan bertindak, terkadang kebenarannya tidak bisa digoyahkan. Kecenderungan pemilih ini dalam menentukan pilihan politiknya kepada partai politik seperti PKB atau PPP. Kiyai masih menjadi panutan sekaligus simpul pengendali, ia dapat memberikan petunjuk terhadap pilihan politik masyarakat, dan ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat patrimonial dengan pola sosial *Patron–Clien*. Kiyai atau ulama-ulama sebagai patron yang sangat dihormati sekaligus akan menjadi panutan dalam kehidupan spiritualnya dalam bentuk pengejewantahan nilai penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bondowoso terkhusus masyarakat pesantren atau santri. Ini secara tidak langsung diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi yang kemudian diperkuat dengan kegiatan keagamaan yang marak seperti acara pengajian Sholawatan, istighosah, yasinan, tibaan, ziarah kemakam wali songo dan kegiatan keagamaan lainnya yang merupakan karakteristik yang mudah dilihat dan diamati pada kelompok ini yang menjadikan tidak sama dengan kelompok lainnya. Namun seiring perjalanan waktu, dengan semakin terbukanya akses informasi maka pemilih jenis ini berangsur-angsur mengalami perubahan. Kiyai sebagai *patron* dan masyarakat (santri) sebagai *clien*, tidak kemudian semerta-merta apa yang disampaikan kyai atau menjadi petunjuk dalam pilihan politik kemudian dijalankan begitu saja. Dalam kontek ini ada pergeseran tipologi pemilih yang semula memiliki tipologi pemilih nuro' ulama' bergeser kepada tipologi pemilih jenis pa pe'sse'an.

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi tipologi pemilih pada pemilu serentak 2019 di kabupaten bondowoso, Adapun faktor itu meliputi:

a. Faktor karakteristik pemilih, memiliki karakteristik yang melekat pada pemilih. Karakteristik pemilih merupakan faktor pendorong, sehingga seseorang dapat berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih partai atau calon. Pemilih memiliki watak sosial yang mempunyai kepedulian sosial terhadap problem sosial , politik, ekonomi, sosial budaya tersebut dapat dilihat dari aktivitas politiknya dalam pemilu. Pada factor karakteristik pemilih ini dipengaruhi oleh: 1) Faktor kondisi sosial budaya dan sistem nilai, karakteristik sosial budaya pemilih seperti lingkungan sosial itu mempengaruhi tipologi pemilih dalam penagmbilan keputusan untuk memilih partai atau calon. Faktor lingkungan dimana pemilih tinggal dan berinteraksi sangatlah penting, seperti kondisi sosial budaya dan nilai tradisional. Mayoritas pemilih yang ada dikabupaten Bondowoso menganut Islam Ahlussunah Waljama'ah atau Nahdlatul Ulama' (NU). Maka tradisi ala NU sangatlah mempengaruhi tata nilai dalam kehidupan sosial budaya. 2). Faktor pendidikan dan ekonomi**,** Pemilih yang memiliki pendidikan rendah akan condong mengunakan aspek non-rasional dalam pilihan politiknya. Faktor ekonomi dan tingkat pendidikan difahami akan mempengaruhi pemilih dalam pengambilan keputusan kepada partai politik atau calon legislatif. Sementara itu pemilih yang memiliki pendidikan yang relative tinggi akan condong lebih selektif dalam proses pengambilan keputusan pada pilihan politik mereka. 3) Faktor kekerabatan atau kekeluargaan dapat mempengaruhi tipologi pemilih di Kabupaten Bondowoso. Pemilih yang ada di Kabupaten Bondowoso sangat menjunjung tinggi kekerabatan atau kekeluargaan. Sistem kekeluargaan dan kekerabatan pada pemilih di Kaupaten Bondowoso sangatlah kuat, seperti dalam kehidupan keseharian mereka, budaya gotong royong masih sangat melekat pada aktivitas sehari-hari, seperti

saling membantu dalam membangun rumah, bercocok tanam. Faktor kekerabatan atau kekeluargaan juga bukan hanya ditonjolkan dalam aktivitas keseharian mereka dalam kehidupan bermasyarakat, namun dalam pilihan politik mereka juga dipengaruhi oleh faktor kekerabatan atau kekeluargaan.

b. Faktor media massa, kekuatan media massa dalam penyebar luasan informasi, pewacanaan yang bertujuan untuk pembentukan opini publik. Lokasi geografis juga mempengaruhi cara pemilih dalam menganalisa informasi, pemilih yang hidup didaerah kota sudah terbiasa dengan beragam informasi dan bahkan berlawanan, dibandingkan dengan pemilih yang tinggal dipedesaan.

c. Faktor karakteristik partai politik dan calon legislatif**,** Partai politik memiliki atribut seperti image, citra, reputasi, latar belakang ideology, serta kualitas para politikusnya akan berpengaruh pada penilain masyarakat luas. Seringkali kualitas calon legislatif dengan partai politik yang mencalonkannya juka akan dinilai oleh masyarakat. Aktivitas dan perilaku para politikus partai politik sangat mudah dinilai oleh masyarakat melalui kualitas orasi, program kerja Selain itu maka faktor track record partai politik dan calon terpilih selama masa ia menjabat akan senantiasa diananlisis dan dicermati oleh pemilih, sampai sejauhmana kepeduliaanya dalam penyelesaian masalah.

d. Faktor a mae'n pe'sse'yang ada dimasyarakat sangat sulit dihentikan dan justru menjadi kebiasaan atau tradisi yang tidak bisa dielakkan yang dilakukan oleh partai politik atau calon calon untuk meraih simpati dan dukungan suara terbanyak dari pemilih. Fenomena amae'n pe'sse' sebagai interaksi sosial antara pemilih dan partai politik atau calon legislatif dalam pelaksanaan pemilu. Pemilih sebagai actor sosial dapat mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang didapat dalam praktik amae'n pe'sse', sehingga menjadi pertimbangan pemilih dalam

menentukan pilihan politiknya dalam pemilu. Praktik amae'n pe'sse' terjadi pada pemilu serentak 2019 di kabupaten bondowoso diakibatkan oleh keterbatasan ekonomi, diaman mayoritas masyarakat di Kabuapetn Bondowoso berada pada garis kemiskinan membuka peluang terjadinya praktik amae'n pe'sse'.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pendidikan politik oleh partai politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami akan hak dan kewajibannya, terkhusus dalam pelaksanaan pemilu.

2. Perlunya meningkatan sosialisasi terkai bahayanya praktik amae'n pe'sse' oleh Bawaslu, sehingga masyarakat memahami bahwa money politik itu dilarang dan memiliki konsekuensi hukum baik bagi pemberi dan penerima.

3. Perlunya meningkatkan pelaksanaan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik berupa kegiatan sosialisasi pemilu atau bentuk lainnya, sehingga masyarakat dapat memahami esensi dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).

4. Perlunya dukungan pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi pemilu kepada masyarakat.

REFERENSI

Achmad Husein Hasni dan Melis Hasan. 2019. *Tipologi Pemilih Mahasiswa Pada Pemilihan Umum 2019 (Suatu Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo)*. Gorontalo:Universitas Negeri Gorontalo.

Agus Nurulsyam Suparman dkk. 2018. *Tipe Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018*. Ciames: Universitas Galuh.

Agustino, Leo. 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intras Publishing.

Ali, Hasan. 2017. *Millenial Nusantara, Pahami Karakternya, Rebut Simpatinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Alie, Marzuki. 2013. *Pemasaran Politik di Era Multipartai*. Bandung: Expose.

Aminah, 2019. *Pengantar Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta Timur: Prenadamedia group.

Asshiddiegie, Jimly.1992. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta:Rajawali Pers.

Bakran Suni. 2013. *Program kerja Calon Kepala Daerah dan Tipologi Pemilih Dalam PILKADA*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Budiatri, Imawan, Aisyah. 2020. *Pemilu Serentak 2019, Sistem Kepartaain dan penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Buyung, Adnan.2007. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*: Tata Negara. Jakarta:Kata Penerbit.

Dja'man Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Dwi, A. Zulian I. *Korelasi Identifikasi Apatisme Politik Dengan Kebijakan Publik Kota Medan*. Jurnal Power in International Relations, 3 no. 1 (2018): 29-53. http://e-journal.potensiutama.ac.id/ojs/index.php/PIR/article/ view/445/499

Edi handok. 2014. *Tipologi Pemilih Pada Pemilihan Umum kepala Daerah Kota Tanjung Pinang Tahun 2012 (Studi Tipologi Pemilih di Kelurahan Pinang kencana)*. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raha Ali Haji.

Ekatjahjana, Widodo.2015. Negara hokum, Konstitusi, dan Demokrasi. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.

Evangella N. Markaki dan Theodore Chadjipantells. 2016. *A Typology Of Voter: Creating Voter's Profile Via Clustering.* Yunani: Departemen Ilmu Politik, Aristoteles University of Thessaloniki.

Faya Prima Dewi dkk . 2020. *Analisis Tipologi Pemilih Pemula Dalam memilih Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2019 Di Kota Mataram Dalam Perspektif Pemasaran*. Mataram: Universitas Mataram.

Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, Dan Marketing Politik*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Rakyat.

Firmanzah. 2012. *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Frets Alfet Goraph dan herson Keradjaan. 2018. *Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Budaya Politik Pemilih Desa Adat (Studi Kasus Tentang Tipologi Pemilih Desa Kakara Dalam pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara)*. Halmahera: Universitas Halmahera.

G.J. Wolhoff. 1960. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Indonesia. Djakarta:Timun Mas.

Gafar, Afan.1992. Javanese Voter. Yogyakarta:Gajdjah Mada University Press.

Haris, Syamsuddin. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI.

Heryanto, Gun,Gun, dkk. 2019. *Literasi Politik; Dinamika konsolidasi Demokrasi Indonwsia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD

JA, Denny. 2020. *Membangun Legacy 10P Untuk Marketng Politik: Teori dan Praktik*. Jakarta Selatan: Cerah Budaya Indonesia.

Jufri, Fajlurrahman.2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umu*m.Jakarta:Prenadamedia Group.

Karimi, Faizin, Admad. 2012. *Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Gresik: MUHI Pres.

Kherid, Nizar. 2021. *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 19955-2019 sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. Jakarta:Rayyana Komunikasi.

Lely Arrianie. 2017. *Memetakan Tipologi Pemilih DKI Dalam PILKADA 2017*. Jakarta: Universitas Jayabaya.

Malik, Abdul, Asmiati. 2020. *Politik Ekonomi Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.

Michael,Rush, Phillip, Althoff.1997. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung Remaja

Nivada, Aryos. 2019. *Wajah Politik & Keamanan Aceh*. Yogyakarta: Deepublish

Nurhasin, Moch. 2020. *Distorsi dan Problematka Pemilu Serentak 2019*. Surabaya: Airlangga Iniversitas Press.

Nurjaman, Asep. 2019. *Partai Dan Pemilu; Perilaku Politik Di Aras Lokal Pasca Orde Baru*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Pahlevi Indra. 2015. *Sistem Pemilu di Indonesia antara proporsional dan Mayoritarian*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Peter Schroder.2009. *Strategi Plitik edisi Revisi Untuk Pemilu 2009*, Fredrich Naumann Sirtung Fu die Freiheit.

Prasetyo,Teguh, 2017. *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Pureklolo,Tokan,Thomas.2020. *Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Pureklolon, Thomas. 2019. *Demokrasi dan Politik*. Malang: Intrans Publishing.

Ridho, Zainur. 2019. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.

Rohaniah,Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik, Kajian Mendasar Ilmu Politik*.Malang: Intrans Publishing.

Roni Jaya winangun dan Dini Valdiani. 2020. *Tipologi Partisipasi Politik Pemilih Laki-laki Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Penggunaan Sumber Informasi*. Bogor: Universitas Pakuan.

Roni Jayawinangun. 2019. *Tipologi Pemilih Pemula berdasarkan Akses Informasi Politik Di Media Sosial*.Bogor: Universitas Pakuan.

Rosdakarya, Ramli Mahmud, *Orientasi Budaya Politik Perempuan*, Jurnal Politico Vol. 8, No 1, Januari 2019

Sakir, Al-Hamdi, Ridho. 2021. *Disenchanted Voter; Varian dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah*. Yogyakarta: Samudra Biru

Subagyo, Agus. 2020. *Aplikasi Metode Riset: Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Mix Method*. Malang: Inteligesia Media.

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif Dan R&D.Bandung*: Alfabeta.

Sugiyono.2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:Grasindo.

Syarbaini Syahrial. 2013. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor:Ghalia Indonesia).

Thaib, Dahlan.2009. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*.Yogysksrts:Total Media.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Wasesa, Agung, Silih. 2011. *Political Branding & Public Realtions*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wasi, Imron. 2020. *Politik, Partai Politik Dan perempuan Prontage And BackStage Sebuah Catatan*. Yogyakarta: Deepublish.

Widnyani, Sri, Putu, Ayu, Ida. 2020. *Perilaku dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legistatif*. Sidoarjo: Zifatama.

Zamroni. 2007. *Pemetaan Tipologi Pemilih PPP Kabupaten Jepara; Sebuah Strategi Pemenangan Pemilihan Umum*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Cek Plagiasi

ORIGINALITY REPORT

34%	34%	5%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	3%
2	fisip.ilearn.unand.ac.id Internet Source	2%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	2%
6	kpu.go.id Internet Source	1%
7	firmanrestuh.blogspot.com Internet Source	1%
8	dddhouse.wordpress.com Internet Source	1%
9	Repository.umy.ac.id Internet Source	1%

10	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
12	123dok.com Internet Source	1 %
13	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %
14	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
15	jdih.kpu.go.id Internet Source	1 %
16	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	1 %
17	adoc.pub Internet Source	<1 %
18	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
20	id.scribd.com Internet Source	<1 %
21	nanopdf.com Internet Source	<1 %

22	www.scribd.com Internet Source	<1 %
23	bappeda.bantenprov.go.id Internet Source	<1 %
24	media.neliti.com Internet Source	<1 %
25	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
26	cunrachun.blog.fisip.uns.ac.id Internet Source	<1 %
27	id.123dok.com Internet Source	<1 %
28	docplayer.info Internet Source	<1 %
29	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
30	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.siwah.com Internet Source	<1 %
32	kpud-malangkab.go.id Internet Source	<1 %
33	es.scribd.com Internet Source	<1 %

34	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
35	eprints.unwahas.ac.id Internet Source	<1 %
36	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
37	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
38	sundux.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	www.mkri.id Internet Source	<1 %
40	iqbalunimed.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
42	sumselupdate.com Internet Source	<1 %
43	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
44	ellmanyun.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	<1 %

46	riolan.id Internet Source	<1 %
47	repository.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
48	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
49	rafikaterritory.wordpress.com Internet Source	<1 %
50	www.batamnews.co.id Internet Source	<1 %
51	Tristania R.A Pangaribuan. "KREDIBILITAS MEDIA SOSIAL DALAM PEMBERITAAN PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA", Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, 2017 Publication	<1 %
52	jmsos.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
53	herususetyodotcom.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
54	studentjournal.petra.ac.id Internet Source	<1 %
55	www.tribratanewsbantul.id Internet Source	<1 %
	eprints.undip.ac.id	

56	Internet Source	<1%
57	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
58	jurnal.dpr.go.id Internet Source	<1%
59	Fauzi Wahyu Pradika, Happy Anugraha Putra, Anwar Noris. "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2020 Publication	<1%
60	fliphtml5.com Internet Source	<1%
61	kalbar.kpu.go.id Internet Source	<1%
62	mkri.id Internet Source	<1%
63	jmm.unram.ac.id Internet Source	<1%
64	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	<1%
65	journal.kpu.go.id Internet Source	<1%
66	jurmafis.untan.ac.id Internet Source	<1%

67	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
68	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
69	www.neraca.co.id Internet Source	<1 %
70	Herawati Herawati, Hazilina Hazilina, Firdaus Zar'in. "Feasbylity Study Perlindungan Hukum untuk Anak Usia Dini yang Bercompetitive Advantage", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2020 Publication	<1 %
71	documents.mx Internet Source	<1 %
72	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
73	portalsatu.com Internet Source	<1 %
74	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
75	ejournal.iaiibrahimy.ac.id Internet Source	<1 %
76	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
	zombiedoc.com	

77	Internet Source	<1%
78	jurnal.upnyk.ac.id Internet Source	<1%
79	www.merdeka.com Internet Source	<1%
80	kuninganmass.com Internet Source	<1%
81	library.jakarta.bawaslu.go.id Internet Source	<1%
82	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
83	pemikirankonstitusifirdaus.blogspot.com Internet Source	<1%
84	repositori.unsil.ac.id Internet Source	<1%
85	repository.uki.ac.id Internet Source	<1%
86	Richo Richardo Turangan, Theodora M. Katindagho, Benu Olfie L.S. "PARTISIPASI ANGGOTA PADA KELOMPOK TANI KALELONDI DESA KAUNERAN, KECAMATAN SONDER, KABUPATEN MINAHASA", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2017 Publication	<1%

87	antikorupsi.org Internet Source	<1 %
88	dhearaisad.blogspot.com Internet Source	<1 %
89	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
90	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
91	ojs.unm.ac.id Internet Source	<1 %
92	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
93	vhykumiko.wordpress.com Internet Source	<1 %
94	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
95	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
96	repository.unwira.ac.id Internet Source	<1 %
97	jurnal.upgriplk.ac.id Internet Source	<1 %
98	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %

99	kpu-bengkulukota.go.id Internet Source	<1 %
100	okikab.bps.go.id Internet Source	<1 %
101	pemilukadajateng2010.wordpress.com Internet Source	<1 %
102	repository.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
103	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
104	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
105	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
106	issuu.com Internet Source	<1 %
107	melatriandaniblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
108	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
109	www.rumahpemilu.com Internet Source	<1 %
110	Jerry Indrawan, M Prakoso Aji. "Penyederhanaan Partai Politik Melalui	<1 %

	Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat", Jurnal Penelitian Politik, 2020 Publication	
111	Repository.Umsu.Ac.Id Internet Source	<1 %
112	ariswahyoedhie.blogspot.com Internet Source	<1 %
113	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
114	elib.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
115	fardinlaia.blogspot.com Internet Source	<1 %
116	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
117	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
118	katalog.data.go.id Internet Source	<1 %
119	klh.tegalkota.go.id Internet Source	<1 %
120	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %

121	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1%
122	www.valora.co.id Internet Source	<1%
123	Agam Primadi, David Efendi, Sahirin Sahirin. "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif", Journal of Political Issues, 2019 Publication	<1%
124	Maret Priyanta. "THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE : The Legal Studies of Implementation Paradigm Polluter Pay Principle in Environmental Law Enforcement in Indonesia", Tadulako Law Review, 2016 Publication	<1%
125	Mushaddiq Amir. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication	<1%
126	archive.org Internet Source	<1%
127	badandiklat.jatengprov.go.id Internet Source	<1%

128	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
129	docslide.us Internet Source	<1 %
130	dokument.pub Internet Source	<1 %
131	edoc.pub Internet Source	<1 %
132	ejournal.uksw.edu Internet Source	<1 %
133	iminblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
134	interlnalportaltr7.wordpress.com Internet Source	<1 %
135	jamberita.com Internet Source	<1 %
136	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
137	journal.unj.ac.id Internet Source	<1 %
138	kip-acehprov.go.id Internet Source	<1 %
139	slamethar.wordpress.com Internet Source	<1 %

140	www.coursehero.com Internet Source	<1%
141	Dairani Dairani. "Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara", HUKMY : Jurnal Hukum, 2021 Publication	<1%
142	idoc.pub Internet Source	<1%
143	kintamanicity.wordpress.com Internet Source	<1%
144	Ardhiwinda Kusumaputra, Endang Retnowati, Ronny Winarno. "PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2020 Publication	<1%
145	Irtanto Irtanto. "Perilaku Politik Pemilih Perempuan Kota Mojokerto Pada Pemilu Legislatif 2014", Jurnal Penelitian Komunikasi, 2015 Publication	<1%
146	Syahrul Ibad. "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik", HUKMY : Jurnal Hukum, 2021 Publication	<1%

147	dosen.univpancasila.ac.id Internet Source	<1%
148	limbagoadam.blogspot.com Internet Source	<1%
149	moam.info Internet Source	<1%
150	qdoc.tips Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		